PERAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT (*COMMUNITY DEVELOPMENT*)

(Studi pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RATNA MAGFIROH
0710310121

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2011

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

Belajarlah mencari ilmu, karena dengan ilmu

bisa membuat seseorang diam dan mempunyai harga diri

(HR: Abu Na'im dari Umar)

"Intelektualisme, tauhid, dan tawakkal

Didukung tombak kepandaian dan kecerdasan

serta tameng tawadlu' dan kerendahan hati

7 vektor kunci untuk menemukan

hidup dan mati yang indah"

"It is true that economis and social objectives
have long been as distinct and often competing
But this is a false dichotomy ...
Companies do not function in isolation
from the society around them
In fact, their ability to compete depend heavily
on the circumstances of locations where they operate"
(Michael E. Porter and Mark R. Kramer, 2002: 5)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	PERAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT (*COMMUNITY DEVELOPMENT*) (Sudi pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)
Disusun oleh	:	Ratna Magfiroh
NIM	:	0710310121
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Jurusan	:	Adminitrasi Publik

Malang, Oktober 2011

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Mochamad Makmur, MS	**Farida Nurani, S.Sos, M.Si**
NIP. 19511028 198003 1 002	**NIP. 19700721 200501 2 001**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	13 Desember 2011
Jam	:	09.00 WIB
Skripsi atas nama	:	Ratna Magfiroh
Judul	:	Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) (Sudi pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Mochamad Makmur, MS	**Farida Nurani, S.Sos, M.Si**
NIP. 19511028 198003 1 002	**NIP. 19700721 200501 2 001**
Anggota	Anggota
Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	**Drs. Romula Adiono, MAP**
NIP. 19610905 198601 1 002	**NIP. 19620401 198703 1 003**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) (Studi pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan) tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 2 dan pasal 70).

Malang, Oktober 2011

Ratna Magfiroh
0710310121

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Ratna Magfiroh, 2011, Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) (Sudi pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan), Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Mochamad Makmur, MS; Anggota Komisi Pembimbing: Farida Nurani, S.Sos, M.Si, 160 Halaman + xx

Penelitian ini didasari atas fenomena meningkatnya kesadaran dan munculnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyebabkan perusahaan di Indonesia melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui program pengembangan masyarakat (*community development*) sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Selain itu, pelaksanaan CSR oleh perusahaan telah menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan legitimasi dari masyarakat serta menjadi alat untuk meningkatkan reputasi perusahaan dengan menerapkan konsep *triple bottom lines*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran CSR dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I serta mendeskripsikan dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I.

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Peran CSR dalam rangka pengembangan masyarakat pada PPK Sampoerna yaitu untuk memotivasi masyarakat memiliki jiwa kewirausahaan sehingga usaha yang dijalankan memiliki keunggulan yang kompetitif, dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta mengidentifikasi potensi usaha wirausaha baru; (2) Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat ring I yaitu ketepatan pemberian dana dari PPK Sampoerna kepada masyarakat ring I dan keterampilan awal dalam berwirausaha yang telah dimiliki oleh masyarakat ring I, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak tersedianya fasilitas transportasi dan pengelolaan modal.

Rekomendasi: Perlu peningkatan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat, mengikutsertakan mitra binaan ke dalam pameran, penambahan sarana transportasi, membeli hasil produksi pengusaha kecil dan menengah lokal.

Kata kunci: Peran, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Community Development*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Ratna Magfiroh, 2011, Role of Corporate Social Responsibility (CSR) In Order to Community Development (Study at Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) of Countryside Gunting District of Sukorejo, Pasuruan Regency), Supervisor: Dr. Mochammad Makmur, MS; Co-Supervisor: Farida Nuraini, S.Sos, M.Si, 160 pages + xx

The background of research the increasing of appearance and awareness various society demand to company which managing natural resources and environment causing company in Indonesia execute Corporate Social Responsibility (CSR) through community development program as arranged in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 25 Year 2007 concerning Capital Investment. Besides, executions of CSR by company have come to the part of company strategy to increase legitimacy of society and also become appliance to increase company reputation by applying conception triple bottom lines.

Target of this research is to describe and analyze role of CSR in order to community development at Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) in improving local society independence at society of ring I and also describe and know supplementary factor and resistor factor influencing performance of Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) in its effort conduct construction and training at society of ring I.

Method of research is descriptive study with qualitative approach. Data sources are primary and secondary. Data collection techniques include observation, interview and documentation. The data analysis tool is Miles and Huberman's interactive data analysis model, which comprises to data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

Result of research indicates that (1) role of CSR in order to community development at Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) that is to motivate society so that owning soul of entrepreneurship so that the effort which is run have excellence which is competitive, can lessen poorness and unemployment and also identify potency of effort new busnessman; (2) Supplementary factor influencing performance of Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) in its effort do construction and training to society of ring I that is accuracy of giving of fund of Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) to society of ring I and skilled early in entrepreneurship which have been owned by society of ring I, while its resistor factor that is not available of transportation facility and management of capital.

Recommendation that the socialization must be conducted through the community, involve partner of guidance into exhibition, addition of transportation medium, buying result of local middle and small entrepreneur products.

Keyword:Role, Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) (Studi pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)"**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang secara empiris telah memberikan dukungan moral.
2. Bapak Dr. Khairul Muluk, M.Si. S.Sos selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang secara empiris telah memberikan dukungan moral.
3. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, tuntunan, dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

4. Ibu Farida Nurani, S.Sos, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, tuntunan, dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk mengevaluasi dan memberikan saran perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Romula Adiono, MAP selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk mengevaluasi dan memberikan saran perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Kelas Publik E Angkatan 2007 yang telah memberikan dukungan moral dan memberikan arahan-arahan dan nasehat kepada penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan Ilmu dan wawasan selama penulis belajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
9. Ibu Wido selaku *Community Development Executive* PT HM Sampoerna yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Christamam Herry Wijaya selaku *Site Manager* PPK Sampoerna yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh karyawan dan staff PPK Sampoerna dari PT Primakelola Agribisnis Agroindustri yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
12. Masyarakat ring I PPK Sampoerna yang telah memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
14. Teman-teman Jurusan Administrasi Publik 2007 yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ..... **i**
MOTTO ..... **ii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
TANDA PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **v**
RINGKASAN ..... **ix**
SUMMARY ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Kontribusi Penelitian 12
E. Sistematika Pembahasan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Administrasi Pembangunan 19
1. Definisi Pembangunan 19
2. Administrasi Pembangunan 20
3. Pembangunan Berkelanjutan 23
B. *Good Corporate Governance* (GCG) 25
1. Definisi GCG 25
2. Prinsip-Prinsip GCG 28
3. Manfaat GCG 30
C. *Corporate Social Responsibility* (CSR) 32
1. Definisi CSR 32
2. Prinsip-Prinsip CSR 35
3. Tahap-Tahap Penerapan CSR 36
4. Kategori Perusahaan Menurut Implementasi CSR 38
5. Pembagian Wilayah dan Alokasi Dana CSR 39
6. Konsep *Triple Bottom Line* 41
D. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) 43
1. Definisi *Community Development* 43
2. Ruang Lingkup Program COMDEV 48
3. Tujuan COMDEV 49

BAB III METODE PENELITIAN **50**
A. Jenis Penelitian 50
B. Fokus Penelitian 52

C. Lokasi dan Situs Penelitian 53
D. Sumber Data 55
E. Teknik Pengumpulan Data 57
F. Instrumen Penelitian 59
G. Analisis Data 60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 63
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs penelitian 63
1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 63
a. Letak Geografis 63
b. Visi, Misi dan Lambang Kabupaten Pasuruan 63
1. Visi 63
2. Misi 64
3. Lambang Kabupaten Pasuruan 64
c. Geologi 66
d. Topografi 68
e. Jenis Tanah 70
f. Iklim dan Curah Hujan 70
g. Hidrologi 71
h. Penggunaan Lahan 72
i. Wilayah Administratif 73
j. Ekonomi 75
k. Kependudukan 77
l. Pendidikan 79
m. Pekerjaan 81
2. Gambaran Umum PPK Sampoerna 82
a. Sejarah 82
b. Visi, Misi, Logo, Tujuan, dan Penerima Manfaat dari PPK Sampoerna 85
1. Visi PPK Sampoerna 85
2. Misi PPK Sampoerna 85
3. Logo PPK Sampoerna 85
4. Tujuan 86
5. Penerima Manfaat 86
c. Fasilitas 87
d. Jenis-Jenis Pelatihan 89
e. Struktur Organisasi 90
B. Penyajian Data Fokus Penelitian 100
1. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT HM Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Lokal pada Masyarakat Ring I 100
a. Bentuk Pelaksanaan Program CSR PT HM Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) pada Masyarakat Ring I PPK Sampoerna 103

b. Proses Pelatihan dan Pembinaan yang Dilakukan oleh PPK Sampoerna melalui Program *Community Development* dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Lokal pada Masyarakat Ring I 121
1. Tahap Perencanaan 121
2. Tahap Pelaksanaan 123
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi 124
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kinerja PPK Sampoerna dalam Usahanya Melakukan Pelatihan dan Pembinaan
3. pada Masyarakat Ring I 126
a. Faktor Pendukung 126
1. Ketepatan Pemberian Dana dari PPK Sampoerna kepada Masyarakat Ring I 126
2. Keterampilan Awal dalam Berwirausaha yang Telah Dimiliki oleh Masyarakat Ring I 127
b. Faktor Penghambat 129
1. Tidak Tersedianya Fasilitas Transportasi 129
2. Pengelolaan Modal 130
C. Pembahasan 131
1. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT HM Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Lokal pada Masyarakat Ring I 131
a. Bentuk Pelaksanaan Program CSR PT HM Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) pada Masyarakat Ring I PPK Sampoerna 137
b. Proses Pelatihan dan Pembinaan yang Dilakukan oleh PPK Sampoerna melalui Program *Community Development* dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Lokal pada Masyarakat Ring I 145
1. Tahap Perencanaan 145
2. Tahap Pelaksanaan 148
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi 151
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kinerja PPK Sampoerna dalam Usahanya Melakukan Pelatihan dan Pembinaan pada Masyarakat Ring I 154
a. Faktor Pendukung 154
1. Ketepatan Pemberian Dana dari PPK Sampoerna pada Masyarakat Ring I 154
2. Keterampilan Awal dalam Berwirausaha yang Telah Dimiliki oleh Masyarakat Ring I 156
b. Faktor Penghambat 156
1. Tidak Tersedianya Fasilitas Transportasi 156

2. Pengelolaan Modal 157
BAB V PENUTUP 158
A. Kesimpulan 158
B. Saran 159

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Pembagian Wilayah CSR	40
2.	Alokasi Dana CSR	40
3.	Wilayah Kabupaten Pasuruan menurut Struktur Geologi Tahun 2010	67
4.	Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2010	73
5.	Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) menurut Kecamatan Tahun 2010	74
6.	Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2010	76
7.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010	78
8.	Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2010	80
9.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2010	81
10.	Fasilitas Terpadu PPK Sampoerna Tahun 2010	87
11.	Lingkup Layanan PPK Sampoerna	104
12.	Program Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan	108
13.	Jenis Pelatihan PPK Sampoerna Bulan Januari-Desember Tahun 2010	112
14.	Daftar Kunjungan PPK Sampoerna Bulan Januari-Desember Tahun 2010	113
15.	Perbandingan Jumlah Pendapatan Masyarakat Ring I Sebelum dan Setelah Mengikuti Pelatihan	116
16.	Peran PPK Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) dalam Melakukan Pemasaran Produk-Produk Masyarakat Ring I	144

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Konsep *Triple Bottom Lines*	43
2.	Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	60
3.	Lambang Kabupaten Pasuruan	64
4.	Logo PPK Sampoerna	85
5.	Struktur Organisasi PPK Sampoerna	91
6.	Hubungan Struktur Organisasi PPK Sampoerna dengan Pekerja Lapang	92
7.	Beberapa Pelatihan yang Diselenggarakan oleh PPK Sampoerna	107
8.	Grafik Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pelatihan Bulan Januari-Desember Tahun 2010	110
9.	Diagram Persentase Peserta Pelatihan Berdasarkan Bentuk Pelatihan Bulan Januari-Desember Tahun 2010	112
10.	Diagram Presentase Jumlah Kunjungan Bulan Januari-Desember Tahun 2010	114
11.	Pemasaran Produk Masyarakat Ring I Melalui PPK Sampoerna Expo 2010	119
12.	Pemasaran Produk Masyarakat Ring I Melalui Kampoeng UKM Pasuruan 2010	119
13.	Ruang *Display Product*	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik secara umum dipersepsikan sebagai "*the work of government*", memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008: 3) didefinisikan sebagai seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan di berbagai bidang itulah dapat dikaitkan dengan pembangunan karena pembangunan dalam konteks administrasi publik merupakan suatu upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana Siagian (2001: 4) yang mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Implementasi kegiatan-kegiatan pembangunan di suatu negara telah menimbulkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan suatu disiplin ilmiah baru yang menjadi sarana dalam mencapai pembangunan suatu negara dan bangsa ditinjau dari segi administrasi. Tanpa melupakan produk ilmu lama, disiplin ilmu

dalam melaksanakan agenda-agenda pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat tersebut dikenal dengan administrasi pembangunan.

Administrasi pembangunan merupakan suatu cabang ilmu administrasi publik yang mengerjakan urusan pemerintah berkaitan dengan pembangunan menyeluruh (Afiffuddin, 2010: 62). Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1995: 222) mendefinisikan administrasi pembangunan tidak hanya kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik dan diperinci melalui rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan nyata secara efektif dalam menangani urusan pemerintahan, tetapi juga terkait dengan respon dan kerja sama seluruh rakyat dalam proses pembangunan. Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan.

Pembangunan pada hakikatnya mempunyai tujuan jangka panjang yang berarti pembangunan yang sedang dilaksanakan seharusnya bukan terfokus pada pemenuhan kebutuhan pada masa atau generasi yang sekarang saja, tetapi pembangunan juga harus mempertimbangkan kebutuhan di masa depan khususnya kebutuhan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu segala sesuatu yang digunakan untuk pembangunan baik itu sumber daya alam, lingkungan ataupun teknologi yang digunakan harus diperhitungkan secara matang dan teliti karena semua faktor-faktor tersebut sebenarnya adalah merupakan hak bagi generasi mendatang, agar generasi mendatang tetap bisa melakukan pembangunan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan baik dalam hal mencapai kesejahteraan bagi masyarakat ataupun keberlangsungan dari lingkungan yang ada, maka sesuai dengan teori *Good Governance* (GG) ada tiga pelaku utama dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara, yaitu negara (*state*), masyarakat (*civil society*) dan pihak swasta (*privat sector*). Ketiga sektor ini harus bersinergi agar dapat menjalankan roda perekonomian dengan baik. Hal ini sesuai dengan konsep *triple bottom line* yang diungkapkan oleh John Elkington (dalam Wibisono, 2007: 32) apabila suatu perusahaan ingin tetap eksis dalam kegiatan produksinya maka perlu untuk memperhatikan keseimbangan dari ketiga aspek, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan.

Selain perusahaan mengejar keuntungan dalam setiap kegiatan perusahaannya maka perlu diperhatikan pula kedua aspek yang lain yaitu sosial dan lingkungan, perlu diperhatikan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dan perlu diperhatikan pula keberlangsungan dari lingkungan sekitar agar tidak rusak dan tetap bisa menunjang pembangunan bagi generasi mendatang. Dengan diperhatikannya keseimbangan pada ketiga aspek tersebut maka akan berdampak pada harmonisnya hubungan masyarakat dengan perusahaan dan keberlanjutan lingkungan.

Seiring meningkatnya kesadaran dan munculnya berbagai tuntutan terhadap perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan lingkungan, maka konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Pelaksanaan CSR oleh perusahaan telah menjadi bagian

dari strategi perusahaan untuk meningkatkan legitimasi dari masyarakat serta menjadi alat untuk meningkatkan reputasi perusahaan. CSR pun menjadi kewajiban perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab perusahaan secara sosial menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (dalam Budimanta dan Rudito, 2004: 72) adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Pemerintah Republik Indonesia juga sudah mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan lingkungan untuk melaksanakan CSR. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 2 mempertegas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Tanggung jawab perusahaan memberikan konsep yang berbeda dimana perusahaan tersebut secara sukarela menyumbangkan sesuatu demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Tanggung jawab sosial

perusahaan didasarkan pada semua hubungan, tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor.

Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang tertuang dalam Pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU tersebut disebutkan bahwa jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Kabupaten Pasuruan dikenal sebagai kawasan segitiga emas karena terletak pada poros distribusi ekonomi tiga kawasan, yaitu jalur Surabaya-Jember/ Banyuwangi/ Bali, Surabaya-Malang dan Malang-Jember/ Banyuwangi/ Bali. Kabupaten Pasuruan juga disesaki oleh 1.300 unit usaha mayoritas skala Usaha Kecil Menegah (UKM) dan sejumlah pabrikan besar. Kabupaten ini memang aktif mengembangkan potensinya seperti terlihat dari kehadiran Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) yang memiliki unit usaha kawasan industri seluas 500

hektare dan dikelola PT Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER). Sederetan nama pabrikan berbagai produk terkenal seperti HM Sampoerna, Matsushita (Panasonic), Nestle, Coca Cola, Aqua, dan Pocari Sweat, menjadi aset Kabupaten Pasuruan yang juga terkenal ke mancanegara dengan wisata alamnya. Namun, deretan investasi tersebut tetap saja belum mampu menihilkan pengangguran di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data dari Updating Database Kabupaten Pasuruan Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang tidak/belum bekerja mencapai 578.014 orang dari 1.510.261 jiwa penduduk.

Kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya terwujud melalui adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR juga dilaksanakan oleh oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. PT HM Sampoerna merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Kabupaten Pasuruan yang telah diakuisisi oleh Philip Morris Indonesia (PM Indonesia). PM Indonesia sendiri merupakan bagian dari grup perusahaan Philip Morris International Inc. (PMI), yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat, yang merupakan pihak terafiliasi dari PM Indonesia. Pada tahun 2005, PM Indonesia telah menyelesaikan akuisisi terbesar dalam sejarah korporasi Indonesia dengan memiliki 98% saham Sampoerna. Tanggal 18 Mei 2005 menandai dimulainya era baru dalam sejarah perusahaan rokok yang telah berdiri di Kota Surabaya sejak tahun 1913 ini (Laporan Tahunan 2005 PT HM Sampoerna Tbk.).

Kiprah CSR tersebut sudah diterapkan oleh PT HM Sampoerna sejak tahun 90-an pada masyarakat di daerah. Misalnya saja mulai tahun 1994, PT HM

Sampoerna menciptakan kemitraan melalui program Mitra Produksi Sigaret (MPS), yang melibatkan kerja sama dengan koperasi pondok pesantren serta pengusaha lokal dalam rangka memproduksi Dji Sam Soe dan Sampoerna Hijau. Dengan didirikannya mitra produksi di daerah atau *rural*, hal ini sekaligus menjadi salah satu solusi untuk menekan laju urbanisasi. Selain itu, keberadaan MPS juga menumbuhkan perekonomian daerah melalui efek ekonomi berantai ditandai dengan tumbuhnya usaha-usaha berskala mikro dan menengah di antaranya usaha perangkutan, toko-toko, pasar, dan sebagainya yang turut menikmati pertumbuhan ini. Hingga tahun 2007, PT HM Sampoerna telah menjalin kemitraan dengan 37 MPS yang berlokasi di Jawa Timur.

CSR yang telah dilaksanakan oleh PT HM Sampoerna terbukti dari diterimanya penghargaan *Corporate Social Responsibility Award* pada Tahun 2005 oleh PT HM Sampoerna versi majalah SWA (Sumber: Memorabilia PT HM Sampoerna Tbk.). Penghargaan ini semakin berarti karena PT HM Sampoerna merupakan perusahaan rokok pertama dan satu-satunya yang telah mendapatkan CSR Award. Keberhasilan Program *Corporate Social Responsibility* merupakan hasil kerjasama *Public Relation* PT HM Sampoerna dengan berbagai pihak, salah satunya adalah *community development*.

Pengembangan masyarakat (*community development*) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip pasrtisipasi sosial (dalam hal ini masyarakat dengan industri). Sehingga masyarakat di tempat

tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT menyebutkan bahwa program *community development* sudah menjadi kewajiban hukum para pengusaha dan juga bentuk tanggung jawab kepada lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Lebih lanjut Badaruddin (2008) menyebutkan bahwa pendekatan CSR hendaknya dilakukan secara holistik, artinya pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dalam kegiatan bisnis semata, melainkan juga bergerak dari yang sifatnya derma (*charity*) menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan *community development*. Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (*sustainability*) sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, CSR lebih dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang melakukannya. Perusahaan yang mengedepankan konsep *community development* lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli

lingkungan. Selain itu, akan tumbuh *trust* (rasa percaya) dari masyarakat. *Sense of belonging* (rasa memiliki) perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Berkaitan dengan hal tersebut, industri tidak lagi dituntut untuk hanya mewujudkan citranya melalui kampanye yang baik namun juga harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Perusahaan yang dapat bertanggung jawab akan memperhatikan *corporate social responsibility* semaksimal mungkin, yang didukung oleh *good corporate governance*. Di sinilah dapat dilihat bahwa program pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan wujud *social responsibility* perusahaan. Program CSR Sampoerna dibagi menjadi beberapa program utama, yaitu: *Sampoerna goes to campus*, pendidikan, *community development*, lingkungan, sosial, dan *employee*. Melalui profil program CSR Sampoerna dapat dilihat bahwa program CSR yang telah dilakukan oleh Sampoerna meliputi berbagai sektor kehidupan di dalam masyarakat, yakni: pendidikan, pemanfaatan potensi dan sumber daya masyarakat sekitar, kesehatan, sosial dan budaya, pengembangan infrastruktur, dan aspek strategis lainnya.

Selain MPS, di bawah payung program "Sampoerna untuk Indonesia", kiprah perhatian PT HM Sampoerna untuk memberdayakan masyarakat diwujudkan dengan mendirikan dan mengembangkan *Sampoerna Entrepreneurship Training Centre* (SETC) atau Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. PPK Sampoerna didirikan sebagai salah satu perwujudan program *Corporate Social*

Responsibility (CSR) melalui pengembangan potensi lokal dengan sasaran masyarakat ring I. Dalam hal ini, masyarakat ring I yaitu masyarakat di sekitar wilayah operasional PT HM Sampoerna dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi wirausaha di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, juga termasuk industri kreatif. Selain itu, PPK Sampoerna ingin menjadi model pemberdayaan dan bisnis bagi usaha kecil di Indonesia, serta menjadi sarana penelitian langsung di lapangan (*action research*) mengenai sistem pertanian terpadu (*integrated farming system*). Bentuk fasilitasi yang ditujukan untuk kelompok petani tersebut berupa pembelajaran dan pelatihan usaha, sekaligus teknis pascapanen hingga menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sampai saat ini, PPK Sampoerna telah melakukan total pendampingan kepada 36 kelompok UMKM binaan yang terdiri dari 241 anggota dalam berbagai bidang usaha, baik bidang peternakan, perikanan, hortikultura, produk pangan hasil olahan pertanian, sampai pemasaran. Selain itu, pada tahun 2010 PPK Sampoerna telah menggelar beragam program pelatihan kepada sekitar 1.977 orang dan menerima kunjungan sekitar 9.975 orang yang ingin belajar dari berbagai fasilitas yang terdapat di sana. Alumni pelatihan diharapkan memiliki bekal mewujudkan kemandirian ekonominya melalui berbagai jenis usaha berskala UMKM yang dijalankan mereka. Munculnya sentra UMKM tersebut dapat memacu pertumbuhan jejaring ekonomi di tempat usaha.

Berangkat dari fenomena yang telah diuraikan di atas muncul ketertarikan untuk lebih mendalami lagi tentang kegiatan administrasi pembangunan di era

demokratisasi yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk CSR, khususnya dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development)* di Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. Oleh karena itu, peneliti akan membahasnya lebih lanjut dengan judul **"Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) (Studi pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dideskripsikan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, maka perumusan masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I.

D. Kontribusi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) terhadap semua pihak, baik yang terkait dengan penerapan konsep peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) secara akademis maupun praktis. Adapun kontribusi dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Akademis
   a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama berkenaan dengan

peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan swasta dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*).

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi info pembanding bagi penelitian yang telah lalu dan sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan datang dengan judul dan topik yang sama.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi perusahaan terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, evaluasi dan rekomendasi kepada perusahaan, khususnya PT HM Sampoerna, pemerintah, dan kelompok kepentingan lainnya untuk bisa melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan menerapkan konsep *triple bottom lines*.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih terbuka bagi masyarakat mengenai peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi *stakeholders*, khususnya masyarakat ring I untuk memilih dan mengajukan program CSR yang cocok untuk mereka.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang dituangkan secara sitematis dan terdiri dari lima bab, dimana bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan menyangkut masalah peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. Untuk mempermudahkan dalam pemahaman tulisan ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima subbab. *Pertama,* latar belakang yang menjelaskan identifikasi masalah tentang meningkatnya kesadaran dan munculnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan lingkungan, kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan di Indonesia, beberapa program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT HM Sampoerna, serta pemaparan sekilas tentang salah satu perwujudan CSR PT HM Sampoerna dalam program pengembangan masyarakat (*community development)* dalam bentuk Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. *Kedua*, perumusan masalah penelitian yang meliputi bagaimanakah peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian

masyarakat lokal pada masyarakat ring I dan apa sajakah faktor pendukung serta faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I. *Ketiga*, tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I serta mendeskripsikan dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I. *Keempat*, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi secara akademis dan praktis. *Kelima*, sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain tentang teori pembangunan, administrasi pembangunan, pembangunan berkelanjutan, definisi *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip-prinsip GCG, manfaat GCG, definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR), prinsip-prinsip CSR, tahap-tahap penerapan CSR, kategori perusahaan menurut implementasi CSR, pembagian wilayah dan alokasi dana CSR, konsep

triple bottom line, definisi pengembangan masyarakat (*community development*), ruang lingkup program pengembangan masyarakat (*community development*) dan tujuan pengembangan masyarakat (*community development*). Teori-teori tersebut digunakan dalam analisis untuk memperkuat hasil penelitian di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh. *Pertama*, mengenai jenis penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Kedua*, fokus penelitian antara lain peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I yang terdiri dari bentuk pelaksanaan program CSR PT. HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada masyarakat ring I PPK Sampoerna; proses pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh PPK Sampoerna melalui program *community development* dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I terdiri dari faktor pendukung dalam pelatihan dan pembinaan serta faktor

penghambat dalam pelatihan dan pembinaan. *Ketiga*, lokasi penelitian di Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan situs penelitian di Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. *Keempat*, sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan sekunder. *Kelima*, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. *Keenam*, instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan perangkat lainnya. *Ketujuh*, analisis data dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari tiga subbab. *Pertama*, akan menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Pasuruan dan Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. *Kedua*, menguraikan hasil data fokus penelitian mengenai peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I. *Ketiga*, pembahasan hasil data fokus penelitian mengenai peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat

Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua subbab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dengan menemukan benang merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*Community Development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan, khususnya PT HM Sampoerna, Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna, pemerintah, *stakeholders* (khususnya masyarakat ring I), dan kelompok kepentingan lainnya untuk bisa meningkatkan peran program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Istilah pembangunan sudah tidak asing lagi bagi setiap warga negara. Pembangunan selalu menjadi fokus utama kegiatan negara dan telah menjadi sesuatu yang dapat memotivasi untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan. Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menurut Siagian (2001: 4) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pertahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami

secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Menurut Todaro (2000) pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan dan *output* pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat serta kepercayaan.

Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Secara umum, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Dalam pembangunan nasional manusia merupakan titik sentral, yang berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harus diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dimana pembangunan didefinisikan sebagai proses untuk melakukan perubahan.

2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun. Oleh karena itu, karakteristik utama administrasi pembangunan adalah memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-

sebaiknya kepada masyarakat. Dari sudut praktek, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Menurut Siagian (2001: 4) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Menurut Afiffuddin (2010: 62) administrasi pembangunan adalah suatu cabang ilmu administrasi publik yang mengerjakan urusan pemerintah berkaitan dengan pembangunan menyeluruh. Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1995: 222) mendefinisikan administrasi pembangunan tidak hanya kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik dan diperinci melalui rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan nyata secara efektif dalam menangani urusan pemerintahan, tetapi juga terkait dengan respon dan kerjasama seluruh rakyat dalam proses pembangunan. Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat luas sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan.

Sementara Siagian (2001: 10-11) mengemukakan beberapa ciri administrasi pembangunan, antara lain:

a. Administrasi pembangunan memiliki peran aktif dan kepentingan (*commited*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan

kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.

b. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat di masa depan.

c. Lebih berorientasi kepada pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai *development agent*.

d. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan kata lain, administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.

e. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).

f. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara dan bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanfaatkan sumber daya pendukungnya. Pembangunan biasanya diupayakan dengan pertumbuhan ekonomi guna mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan. Dampak tersebut berupa pencemaran dan kemerosotan kualitas sumber daya alam serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu, muncul paradigma atau pemikiran baru tentang pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh rakyat yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan berkelanjutan bermula dari permasalahan lingkungan yang diangkat oleh Komisi Brundland (*World Commision on Environment and Development*) (dalam Konferensi Stockholm, 1972) mengenai pentingnya pembangunan yang memperhatikan faktor lingkungan. Menurut Komisi Brundland sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Sutikno dan Maryunani

(2006: 223), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam perspektif yang lain, Soemarwoto (2006: 29) mendefiniskan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung padanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usaha.

Jakobs sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Hadi (2005: 43) mengemukakan empat prinsip pencapaian pembangunan berkelanjutan, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia (*fullfillment of human needs*), memelihara integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*), keadilan sosial (*social equity*), dan kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*).

Pembangunan berkelanjutan umumnya dilakukan di negara-negara berkembang dengan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai pilarnya. Tujuan sosial dapat berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pengakuan jati diri, dan pengembangan masyarakat. Sedangkan tujuan ekonominya dapat diorientasikan pada pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi. Sementara itu, dilihat dari aspek lingkungan dengan adanya pembangunan berkelanjutan diharapkan adanya perbaikan kualitas lingkungan seperti sanitasi lingkungan, industri yang bersih, dan kelestarian sumber daya alam.

B. *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Definisi GCG

Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktek GCG terus berevolusi dari waktu ke waktu.

Komite Cadbury (dalam Surya dan Yustiavandana, 2006) mendefinisikan GCG sebagai berikut:

> "*Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya."

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (dalam Surya dan Yustiavandana, 2006) mendefinisikan GCG sebagai:

> "Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien."

Jadi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Pengertian GCG dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan *stakeholder*. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Dengan demikian, definisi GCG yang umum digunakan adalah GCG sebagai sistem hukum dan praktek untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kegiatan ini meliputi hubungan khusus antara pemegang saham, komisaris dan komite-komitenya, direksi, pejabat eksekutif, dan konstituen lainnya (seperti pegawai, masyarakat lokal, pelanggan, dan pihak *supplier*).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (dalam Khairandy dan Malik, 2007:63-64) GCG adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan tersebut, mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam

hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur, dan calon kreditur perseroan. Dengan demikian dapat dikatan bahwa GCG merupakan konsep yang luas.

GCG juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* perusahaan. Jika perusahaan dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG, maka perusahaan bisa lebih efisien, kompetitif, memiliki *return* yang tinggi, dan bisa menyeimbangkan hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan, konsumen, *supplier*, dan *stakeholder* lainnya. Dengan demikian, tidak ada standar formula GCG yang efektif yang dapat diterapkan dalam seluruh perusahaan karena penerapan sistem GCG akan disesuaikan dengan keadaan masing-masing perusahaan. Untuk itulah, maka perusahaan harus memformulasikan standar GCG mereka sendiri berdasarkan keadaan perusahaan mereka masing-masing dengan tetap mengacu pada standar GCG yang berlaku di Indonesia dan standar internasional.

2. Prinsip-Prinsip GCG

Pada dasarnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sudah lama menjadi fokus perhatian di negara-negara maju, seperti di Amerika, Prancis, Inggris, Jepang, Korea yang kemudian juga menyebar ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada dasarnya prinsip GCG menghendaki keberadaan dunia usaha dan praktek bisnis pada umumnya harus dapat menyeimbangkan antara *profit orientation* dengan *customer service*. Dunia usaha dapat mengembangkan modal dan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi di sisi lain juga harus memenuhi aturan main (*rule of game*) yang berlaku sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat konsumen. Sutiyoso (2006: 20-22) mengemukakan prinsip-prinsip GCG, antara lain:

a. Prinsip kepatuhan terhadap aturan dan hukum, yaitu ketaatan penyelenggaraan usaha atau bisnis terhadap hukum yang berlaku. Secara tertulis hukum itu dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, atau kesepakatan tertulis antara dua orang atau lebih. Selain hukum formal, juga terdapat hukum non-formal yang merupakan konsensus sebuah kelompok masyarakat.
b. Prinsip transparansi atau keterbukaan, yaitu prinsip untuk bersedia melakukan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai jasa, produk, dan kebijakan dari institusi atau perusahaan kepada *stakeholder* dan *shareholder*, baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal. Transparansi sering juga diidentikkan dengan kesempurnaan atau keutuhan informasi.

c. Prinsip akuntabilitas/tanggung gugat *(accountability*), yaitu prinsip bisnis beretika berkelanjutan yang berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan atau institusi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efesien.

d. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu prinsip kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan atau institusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu prinsip ini juga bermakna pemenuhan kewajiban institusi atau perusahaan kepada semua pemangku kepentingan baik di internal maupun eksternal yang menjadi hak mereka.

e. Prinsip kewajaran (*fairness*), yaitu prinsip pengelolaan perusahaan atau institusi yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Prinsip kejujuran (*honesty*), yaitu prinsip kesesuaian antara perkataan, perbuatan dengan kondisi sebenarnya dan atau aturan yang ada menyangkut materi atau informasi yang relevan dalam kegiatan, praktek atau pengelolaan perusahaan atau institusi. Secara praktis adalah tidak adanya kebohongan antara perusahaan dengan semua *stakeholder* dan *shareholder* menyangkut materi dan informasi yang relevan bagi mereka.

g. Prinsip empati (*compassion*), yaitu prinsip perlakuan kepada *stakeholder* dan *shareholder* oleh sebuah perusahaan atau institusi sebagaimana mereka sendiri ingin diperlakukan dalam pengelolaan bisnis atau usaha. Secara

operasional adalah bagaimana memperlakukan pihak lain seolah-olah memperlakukan diri sendiri. Jika diri sendiri tidak ingin dibohongi, maka pihak lain juga menginginkan yang sama. Jika diri sendiri ingin diperlakukan sopan, maka semestinya memperlakukan pihak lain dengan sopan juga.

h. Prinsip kemandirian (*independence*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan atau institusi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Saat ini sudah banyak peraturan tentang GCG, di antaranya adalah UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 19 tahun 2003 Tentang BUMN. Selain itu, komitmen untuk melakukan GCG sudah dimulai, baik oleh pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, maupun sektor swasta. Terbukti dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), pembentukan komite audit bagi BUMN, lahirnya *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), dan lain sebagainya. Akan tetapi, meski sudah banyak peraturan tentang GCG, pada prakteknya GCG belum benar-benar dilaksanakan baik di instansi pemerintah ataupun swasta.

3. Manfaat GCG

Dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung

dengan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006: 2) menyebutkan manfaat-manfaat penerapan GCG adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan, baik secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

C. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Definisi CSR

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya, Bank Dunia menyebutkan "*CSR is the commitmen of bussiness to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society for bussines and good for development*". Dalam hal ini CSR itu berarti komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dengan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan, serta masyarakat umum.

Menurut Suhandari (dalam Untung, 2008: 1) *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Definisi CSR menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (dalam Wibisono, 2007: 7) adalah sebagai berikut:

> "*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis,

beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat luas".

Menurut Brenket (2004) istilah lainnya yang berkaitan dengan kepedulian sosial perusahaan, seperti melakukan investasi yang sesuai dengan etika bisnis dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (*socially responsibility and ethical investment*), yang mengacu pada prinsip-prinsip; *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik), *good corporate citizenship* (menjadi warga perusahaan yang baik bagi masyarakat dan lingkungannya), dan selain itu perusahaan yang memiliki program atau ingin menjadikan *good citizen brands* atas merek produk yang dapat diterima sepenuhnya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan secara khususnya bermanfaat baik bagi konsumennya.

Menurut Basar, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dimaknai sebagai bukan hanya sekedar upaya kemitraan dengan pihak luar akan tetapi mengandung makna upaya ke dalam bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawannya, mengelola limbah buangan industrinya pun bisa dikatakan sebagai bentuk dari CSR perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Praktek yang paling terkenal dari CSR adalah pengembangan masyarakat (*community development*), meskipun keduanya tidak dapat disamakan.

Community development merupakan prinsip dasar CSR yang didefinisikan sebagai upaya sistematik untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan berdasar potensi seluruh sumber daya yang dapat diaksesnya.

Menurut Untung (2008: 35) kontribusi CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR.

Masyarakat yang ada di wilayah dampak adalah pemangku kepentingan CSR yang dapat disebut terpenting. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok yang karena aspek struktural, kultural atau penyebab lain berada di posisi kurang beruntung. Kelompok ini adalah yang paling rentan menghadapi berbagai kondisi, termasuk kemungkinan dampak negatif perusahaan. Karenanya menjadi penting memetakan kelompok ini, kemudian dibuat program khusus, yakni *community development* untuk mengurangi kerentanan tersebut.

Dari beberapa pengertian mengenai CSR di atas maka dapat disimpulkan bahwa CSR adalah sebuah program yang di dalamnya terdapat implementasi dan kontribusi dari sebuah perusahaan atas dampak aktivitas produksinya dengan tujuan agar pembangunan yang sedang dilakukan dapat berjalan terus-menerus dan berkelanjutan serta menjaga keharmonisan antarperusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada.

2. Prinsip-Prinsip CSR

Prinsip-prinsip CSR menurut Wibisono (2007: 10) antara lain sebagai berikut:

a. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
b. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah.
c. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktek dalam negeri.
d. Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan.
e. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu lain.
f. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik.
g. Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuhkembangkan

relasi saling percaya di antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi.

h. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan.

i. Menahan diri untuk tidak melakukan penebangan secara liar dan indisipliner.

j. Mengembangkan mitra bisnis termasuk para pemasok dan subkontraktor untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.

3. Tahap-Tahap Penerapan CSR

Menurut Wibisono (2007: 121-125) umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menerapkan CSR dalam kegiatannya menggunakan pertahapan sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan, perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu:

1) *Awareness Building*, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.

2) *CSR Assessement*, merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.

3) *CSR Manual Building*, hasil *assessement* merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman, dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Tahap implementasi, dalam memulai implementasi pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang harus dijawab. Siapa orang yang akan menjalankan, apa yang harus dilakukan, serta bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan. Tahap implementasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu: (a) Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Tujuan utama dari sosialisasi adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari komponen perusahaan dan tidak akan menemui kendala serius. (b) Pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun. (c) Internalisasi, mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan.

c. Tahap evaluasi, adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi ini dilakukan untuk pengambilan keputusan seperti misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan atau memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah

diimplementasikan, sehingga evaluasi dapat membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

d. Pelaporan, ini diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholders* yang memerlukan.

4. Kategori Perusahaan Menurut Implementasi CSR

Menurut Untung (2008: 7-9) terkait dengan praktek CSR, pengusaha dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok di antaranya:

a. Kelompok hitam, adalah mereka yang tidak melakukan praktek CSR sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan dan sosial sekelilingnya dalam menjalankan usaha, bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

b. Kelompok merah, adalah mereka yang mulai melaksanakan praktek CSR tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapat tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. CSR jenis ini kurang berimbas pada pembentukan

citra positif perusahaan karena publik melihat kelompok ini memerlukan tekanan dan gertakan sebelum melakukan praktek CSR. Praktek jenis ini tidak akan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

c. Kelompok biru, adalah perusahaan yang menilai praktek CSR akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan suatu investasi, bukan biaya.

d. Kelompok hijau, adalah perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya. CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.

Hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan. Di samping itu dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR, bagi sebagian besar perusahaan CSR dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya "*capital maintenance*".

5. Pembagian Wilayah dan Alokasi Dana CSR

Dasar pembagian wilayah ini sangat fleksibel, bisa berdasarkan lokasi, dampak, jenis, ukuran, dan dana yang disediakan oleh perusahaan. Untuk mengetahui pembagian wilayah dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Pembagian Wilayah CSR

Ring	Lokasi	Dampak Operasi	Keterangan
I	0-500 meter dari pabrik	Terkena dampak langsung	Desa yang berhimpitan dengan pabrik
II	501-1000 meter dari pabrik	Potensi terkena dampak langsung	Desa di sekitar pabrik di luar ring I
III	1001-1500 meter dari pabrik	Tidak terkena dampak langsung	Kecamatan di luar pabrik
IV	Lebih dari 1500 meter dari pabrik	Tidak terkena dampak langsung	Seluruh wilayah di luar ring I dan III

Sumber: Wibisono, 2007: 143

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa ring I merupakan wilayah terdekat dari lokasi pabrik dan merupakan wilayah yang terkena dampak langsung dari beroperasinya suatu pabrik. Ring I ini berjarak antara 0-500 m dari pabrik.

Pada penelitian ini ring I PT HM Sampoerna *plant* Sukorejo meliputi empat desa sekitar pabrik Sampoerna, yaitu Desa Suwayuwo, Ngadimulyo, Gunting, dan Bulukandang. Empat desa tersebut merupakan desa yang memiliki jarak paling dekat dengan wilayah beroperasinya PT HM Sampoerna.

Untuk memperjelas pembagian alokasi dana pada masing-masing wilayah CSR dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Alokasi Dana CSR

Prioritas Bantuan	Alokasi (%)	Lingkungan (%)	Pedidikan (%)	Kesehatan (%)	Prasarana Umum (%)	Sarana Ibadah (%)
Ring I	45	5	20	35	20	20
Ring II	25	5	25	30	20	20
Ring III	20	5	25	30	20	20
Ring IV	10	5	25	30	20	20

Sumber: Wibisono, 2007: 144

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa wilayah ring I mendapat alokasi dana CSR lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah yang lainnya, yaitu sebesar 45%. Hal ini dikarenakan wilayah ring I merupakan wilayah yang terkena dampak langsung dari operasi pabrik dan biasanya letaknya berhimpitan dengan pabrik. Wilayah ring II mendapat alokasi dana CSR sebesar 25%, ring III 20% dan ring IV mendapat alokasi dana paling rendah yaitu sebesar 10%. Bagi perusahaan yang tidak mempunyai anggaran yang relatif besar, yang harus dititikberatkan adalah asas manfaat dan dampaknya.

6. Konsep *Triple Bottom Line*

Jika suatu perusahaan ingin berkelanjutan, maka *triple bottom line* menjadi suatu syarat utamanya. Dalam *triple bottom line*, tanggung jawab sosial perusahaan harus berkaitan dengaan tiga aspek yaitu ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka perusahaan itu gagal dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya atau yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu jika perusahaan hanya menekankan pada satu aspek dalam penerapannya, maka perusahaan akan dihadapkan pada berbagai bentuk resistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga perusahaan akan sulit atau bahkan tidak mampu beraktivitas secara berkelanjutan.

Sebagaimana dinyatakan Porter dalam Ibrahim (2005) menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung

pada keadaan lokasi dimana perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karena itu, piramida tanggung jawab jawab sosial perusahaan yang dikembangkan oleh Archie B. Carrol harus dipahami sebagai satu kesatuan. Ibrahim (2005: 105) menyatakan bahwa Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines* (3P), yaitu:

a. *Profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
b. *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program TSP seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.
c. *Planet*, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program TSP yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, dan pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep *triple bottom lines* dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1
Konsep *Triple Bottom Lines*

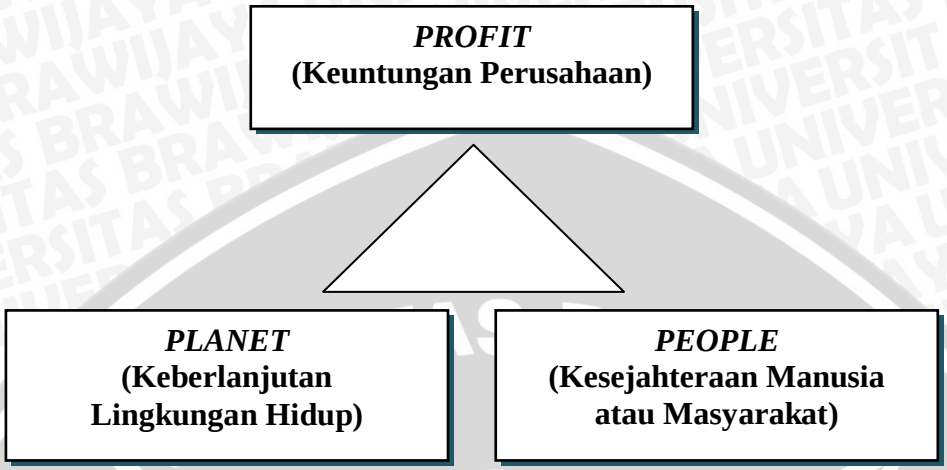

Sumber: Ibrahim, 2005: 105

Ibrahim (2005: 107) mengatakan bahwa secara tradisional, para teoritisi maupun pelaku bisnis memiliki interpretasi yang keliru mengenai keuntungan ekonomi perusahaan. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa mencari laba adalah hal yang harus diutamakan perusahaan, di luar mencari laba hanya akan mengganggu efisiensi dan efektivitas perusahaan. Karenanya, seperti yang dinyatakan Friedman dalam Ibrahim (2005) tanggung jawab sosial perusahaan tidak lain dan harus merupakan usaha mencari laba itu sendiri.

D. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

1. Definisi *Community Development*

Wrihatnolo (2007: 74) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang

diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Lebih lanjut FCDI (dalam Zubaedi, 2007: 18) mendefinisikan pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal-balik, dan pembelajaran secara terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.

Menurut Soetarso (dalam Huraerah, 2008: 129) pengembangan masyarakat adalah suatu proses ketika suatu masyarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber (dari dalam dan/ dari luar masyarakat), mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya ini dan dalam pelaksanaan keseluruhannya, memperluas dan mengembangakan sikap-sikap dan praktek-praktek kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat. Latar belakang adanya *community development* ini adalah:

1. Kebutuhan dari masyarakat (*demand oriented development*) yang sarat dengan muatan lokal yang spesifik.
2. Arus reformasi dan terjadinya krisis di segala bidang telah menimbulkan implikasi yang serius terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
3. Kepedulian BUMN dalam penanganan *community development* untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Lebih lanjut, Soetarso (dalam Huraerah, 2008: 132) mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan perencanaan, pengorganisasian atau proyek, dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.

Tujuan pengembangan masyarakat juga dikemukakan oleh Zubaedi (2007: 17) adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Upaya ini menurut pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses kepada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat.

Secara umum *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program *community development*

memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Dalam membahas *image* suatu perusahaan, selama ini perusahaan selalu dianggap sebagai biang rusaknya lingkungan, pengeksploitasi sumber daya alam, dan hanya mementingkan profit semata. Sebagian besar para perusahaan melibatkan dan memberdayakan masyarakat hanya untuk mendapat simpati. Program mereka hanya sebatas sumbangan, santunan, dan lain-lain. Tetetapi dengan adanya konsep tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dijelaskan di atas, akan memberikan konsep yang berbeda dimana perusahaan secara sukarela menyumbangkan sesuatu demi masyarakat yang lebih baik, dan karenanya, citra perusahaan di mata masyarakat sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Salah satu dari bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah *community development*, dimana perusahaan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat, sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial

perusahaan untuk terus maju dan berkembang. Pada akhirnya akan tercipta dan tumbuh *trust and sense of belonging* dalam diri masyarakat.

Program pengembangan masyarakat yang dilancarkan perusahaan rokok pada hakikatnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) terhadap masyarakat sekitar industri rokok secara yuridis merupakan pengakuan (*recognition*) dari perusahaan pengolah tembakau bahwa ia telah mengambil hak alih hak penguasaan atas sumber daya milik penduduk setempat. Wujud dari tanggung jawab sosial dan recognisi tersebut adalah pemberian sejumlah bantuan baik berupa uang maupun sarana dan fasilitas-fasilitas umum dari perusahaan rokok kepada masyarakat setempat.

Kegiatan *community development* sebagai bagian dari program CSR tersebut telah diadopsi banyak perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dengan tujuan dan aktifitas kegiatan yang lebih luas. Perubahan sosial politik setelah reformasi menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam membangun hubungan tersebut pengembangan ekonomi lokal atau pengembangan usaha kecil di sekitar perusahaan adalah salah satu *entri* poin stategis yang sering dipilih oleh sebagian perusahaan. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau membutuhkan dukungan dan kerjasama masyarakat dalam melancarkan operasional perusahaan. Kegiatan tersebut dengan publikasi yang tepat akan sangat membantu membentuk citra perusahaan dan menggalang kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan. Pengembangan masyarakat menjadi bagian penting dari CSR karena kelompok masyarakat rentan baik itu secara struktural,

kultural, maupun individual biasanya memiliki akses paling kecil terhadap dampak positif operasi perusahaan, sekaligus menerima dampak negatif paling parah. Jika mereka tidak mendapatkan perhatian ekstra dari perusahaan, kondisi tersebut akan terus-menerus mendera mereka.

2. Ruang Lingkup Program *Community Development*

Menurut PLN online program *community development* merupakan prinsip dasar dan bagian dari program CSR yang mencakup beberapa hal antara lain:

a) *Community Relation,* yaitu pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada *stakeholder*, yang pada umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat setempat dan pemerintah daerah.

b) *Community Service*, yaitu program pemberian bantuan berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum termasuk di dalamnya bantuan untuk bencana alam, bantuan prasarana umum termasuk tempat ibadah, dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat setempat.

c) *Community Empowering*, yaitu sebuah usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga memiliki akses yang baik untuk menunjang kemandiriannya, sebagai contoh program pemberian beasiswa, peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis potensi setempat serta bantuan untuk pengembangan atau penguatan kelompok swadaya masyarakat. (www.Pln.co.id)

3. Tujuan *Community Development*

Tujuan *community development* menurut Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi di antaranya sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar wilayah perusahaan.
b. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat di wilayah sekitar perusahaan yang didasarkan pada skala prioritas dan potensi wilayah.
c. Mengembangkan potensi kewirausahaan yang didasarkan pada potensi sumber daya lokal.
d. Mengembangkan kelembagaan lokal di sekitar wilayah perusahaan.
e. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya *community development* dilaksanakan oleh perusahaan dan masyarakat setempat, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator kepentingan perusahaan dan masyarakat. Maka untuk itu diperlukan suatu organisasi yang beranggotakan wakil-wakil perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai koordinator kegiatan yang diajukan masyarakat, forum konsultasi, dan penentuan program yang akan dilaksanakan dan sebagai pengawas atas pelaksanaan program yang sedang berjalan. Sedangkan tujuannya adalah merumuskan usulan masyarakat dan mensosialisasikan program kepada masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan yang artinya tidak harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan kebutuhan yang akan datang, akan tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa selanjutnya pada generasi kemudian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan pokok-pokok perumusan masalah yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah tertentu (Sugiyono, 2011: 6).

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. Untuk memperoleh gambaran mengenai peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna secara menyeluruh dan tuntas, serta dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah yang menyangkut peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya

melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Bogdan & Taylor dalam Sugiyono (2011: 15), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipandang lebih mendukung dan memberi arti dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen maupun wawancara dalam memahami realitas. Dokumen diteliti baik secara tekstual maupun kontekstual.

Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dilakukan dengan terjun langsung di lapangan dengan latar yang alami (*natural setting*). Di samping itu, melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini dapat bersifat holistik dan mempunyai kedalaman data yang valid melalui penyajian argumen yang didapatkan dari hasil interaksi antara peneliti dengan responden. Dimana responden tersebut adalah *Community Development Executive* PT HM Sampoerna, *Site Manager* PPK Sampoerna, ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo, masyarakat ring I Desa Suwayuwo, mayarakat ring I Desa Ngadimulyo, mayarakat ring I Desa Gunting dan masyarakat ring I Desa Bulukandang.

Responden tersebut merupakan kelompok-kelompok atau individu yang memiliki keragaman latar belakang dan pengalaman, sehingga dalam

mempersepsikan permasalahan seringkali memiliki makna subyektif. Dengan pengamatan yang mendalam dan menyeluruh diharapkan makna dan fenomena yang mendasari tingkah laku aktor yang terlibat serta permasalahan yang ada di rumusan masalah dapat dijawab dengan tuntas. Selain itu, jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini juga bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih kaya makna daripada sekedar data yang berbentuk angka.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian kualitatif, peneliti harus menetapkan suatu fokus. Spradley (dalam Sugiyono, 2011: 286) menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*". Maksudnya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial yang ada di lapangan. Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi peneliti sehingga tidak terjebak pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan. Selain itu penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan, meskipun menarik tetapi karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan. Berkenaan dengan hal tersebut, fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan yaitu bagaimana peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat

(*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I dan apa sajakah faktor pendukung serta faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I maka fokus yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I:
   c. Bentuk pelaksanaan program CSR PT. HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada masyarakat ring I PPK Sampoerna.
   d. Proses pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh PPK Sampoerna melalui program *community development* dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I.
      1) Tahap perencanaan
      2) Tahap pelaksanaan
      3) Tahap monitoring dan evaluasi
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I:
   a. Faktor pendukung dalam pelatihan dan pembinaan.
   b. Faktor penghambat dalam pelatihan dan pembinaan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian perlu dipertimbangkan apakah lokasi tersebut sesuai dengan masalah yang akan diteliti, keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan pada kemudahan dalam obyek penelitian, di samping adanya kemudahan terhadap data yang diperlukan, secara spesifik Kabupaten Pasuruan adalah salah satu daerah yang mempunyai komitmen cukup tinggi dalam dunia perindustrian dan beberapa industri besar di Kabupaten Pasuruan seperti PT HM Sampoerna telah melaksanakan CSR-nya dengan baik.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi situs penelitian antara lain:

1. Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna
2. Rumah ketua kelompok masyarakat ring I PPK Sampoerna yang berada di Desa Suwayuwo
3. Beberapa rumah masyarakat ring I PPK Sampoerna yang berada di Desa Suwayuwo, Ngadimulyo, Gunting, dan Bulukandang

Alasan pemihan situs penelitian di atas dikarenakan melalui situs tersebut peneliti dapat berinteraksi secara lagsung dengan responden yang terkait dengan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK). Dimana PPK Sampoerna memiliki prospek yang baik sebagai salah satu program *community development* perwujudan CSR PT HM Sampoerna. Selain itu, PPK Sampoerna mampu memberi masukan (*entry*), baik berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan deskriptif mendalam.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana saja data dapat diperoleh. Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut sangat penting atau diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama (narasumber) baik dari individu atau perorangan yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian maupun permasalahan yang ada. Dalam hal ini data

primer dapat diperoleh dengan cara mengamati atau melakukan wawancara dengan informan berada dalam organisasi yang diteliti dengan substansi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer, yaitu:

a. *Community Development Executive* PT HM Sampoerna, yaitu Ibu Wido
b. *Site Manager* PPK Sampoerna, yaitu Bapak Christamam Herry Wijaya
c. Ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo, yaitu Bapak Kasnanto
d. Mayarakat ring I Desa Suwayuwo, yaitu Bapak Agus Setiono, Ibu Sunarti, Ibu Yuli, Bapak Benu, dan Bapak Punoto
e. Mayarakat ring I Desa Ngadimulyo, yaitu Ibu Hidayati, Ibu Muriyati, dan Ibu Ummi Fadlilah
f. Mayarakat ring I Desa Gunting, yaitu Bapak Hadi Purnomo dan Bapak Arifin Saptianto
g. Mayarakat ring I Desa Bulukandang, yaitu Bapak Kaiman, Bapak Ilham Rocman, dan Bapak Ali Murtadlo

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan melalui dokumen atau arsip dan laporan yang akan melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Dengan demikian, yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Arsip-arsip atau dokumen yang dimiliki data primer yang berkaitan dengan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna, baik yang diperoleh dari *Community Development Executive* PT HM Sampoerna, *Site Manager* PPK Sampoerna, ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo, mayarakat ring I Desa Bulukandang, Ngadimulyo, Gunting, dan Bulukandang.

b. Data lain yang menunjang, misalnya undang-undang, buku, jurnal, dan juga data yang berasal dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

   Wawancara adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. *Community Development Executive* PT HM Sampoerna, yaitu Ibu Wido
b. *Site Manager* PPK Sampoerna, yaitu Bapak Christamam Herry Wijaya
c. Ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo, yaitu Bapak Kasnanto
d. Mayarakat ring I Desa Suwayuwo, yaitu Bapak Agus Setiono, Ibu Sunarti, Ibu Yuli, Bapak Benu, dan Bapak Punoto
e. Mayarakat ring I Desa Ngadimulyo, yaitu Ibu Hidayati, Ibu Muriyati, dan Ibu Ummi Fadlilah
f. Mayarakat ring I Desa Gunting, yaitu Bapak Hadi Purnomo dan Bapak Arifin Saptianto
g. Mayarakat ring I Desa Bulukandang, yaitu Bapak Kaiman, Bapak Ilham Rocman, dan Bapak Ali Murtadlo

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi obyek penelitian. Observasi sebagai pengumpul data diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan tanpa ada usaha yang sengaja untuk melakukan atau mempengaruhi dan memanipulasinya. Teknik ini dapat juga digunakan secara bersamaan pada saat wawancara, pengambilan dokumentasi dan survei lapangan. Dalam menggunakan teknik ini, peneliti mengamati fenomena, peristiwa, sikap dan tingkah laku responden secara teliti dan cermat. Tetapi pengamatan di sini bersifat tanpa peran serta,

sebab peneliti hanya mengadakan pengamatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah cara pengumpulan data sekunder dengan cara mencatat langsung data yang tersedia pada sumber data penelitian berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, tulisan-tulisan ilmiah serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah laporan-laporan, arsip-arsip yang berkaitan dengan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna, baik yang diperoleh dari *Community Development Executive* PT HM Sampoerna, *Site Manager* PPK Sampoerna, ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo, mayarakat ring I Desa Bulukandang, Ngadimulyo, Gunting, dan Bulukandang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat dan lengkap serta sistematis sehingga mudah diolah. Adapun alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri (*human instrument*), yaitu instrumen utama yang berfungsi sebagai penggali data, baik itu melalui wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang telah tersedia.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
3. Catatan lapangan (*field notes*), yaitu catatan yang berisi pokok-pokok informasi (apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan) yang diperoleh dari melakukan wawancara maupun penelitian di lapangan.
4. Perangkat penunjang, yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis-menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

G. Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2011: 334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis model interaktif. Model ini bergerak pada empat komponen yaitu pengumpulan data

kemudian dianalisa dalam bentuk interaktif pada ketiga komponen tersebut. Sistem kerja teknik analisa model interaktif ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2
Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

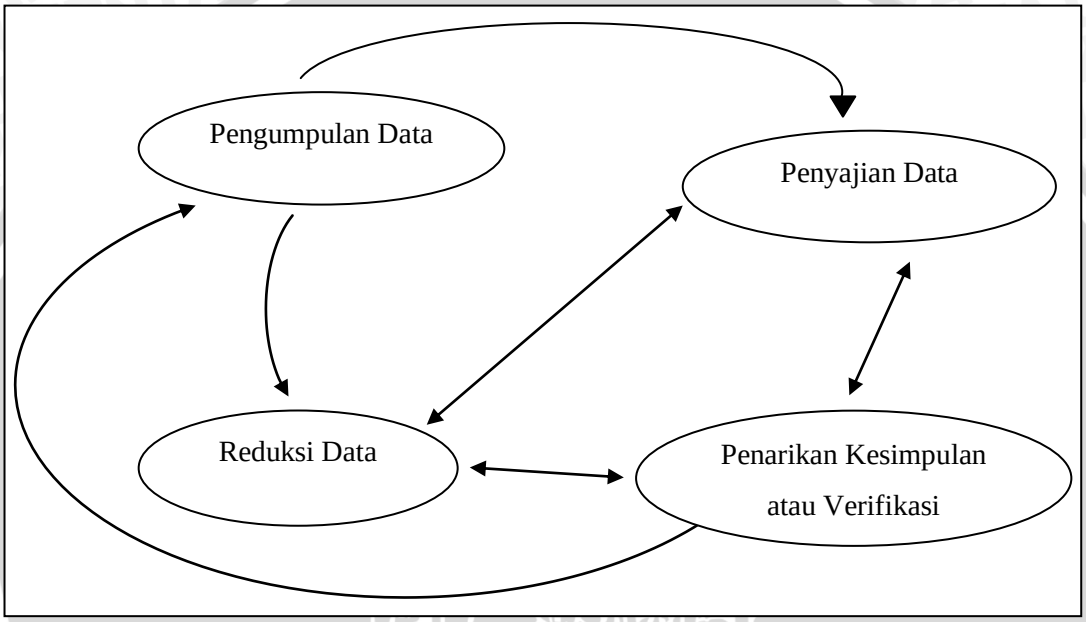

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 338)

Mencermati gambar 1 di atas, Miles dan Huberman berpandangan bahwa analisis data kualitatif memiliki langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid.
2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian "kasar" yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Dalam reduksi ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemudian laporan itu akan direduksi, dirangkum dan diseleksi hal-

hal pokok, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

3. Penyajian data, merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat mememudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, sehingga dengan melihat penyajian dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
4. Penarikan kesimpulan, merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagai yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat sementara.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data model interaktif yang bergerak pada empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga model analisis interaktif ini merupakan model yang akomodatif bagi penelitian ini. Dimana data sekunder atau data primer yang dikumpulkan sebelum disajikan dalam penelitian ini harus diklasifikasikan melalui proses yang dinamakan dengan reduksi data. Setelah itu disajikan dalam bentuk angka, kalimat atau teks sehingga mudah dipami dan bisa diambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

a. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak antara 112˚ 33′ 55″ hingga 113˚ 05′ 37″ Bujur Timur dan 07˚ 32′ 34″ Lintang Selatan. Kabupaten Pasuruan merupakan kawasan segitiga emas karena terletak pada poros distribusi ekonomi tiga kawasan, yaitu jalur Surabaya-Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya-Malang, dan Malang-Jember/Banyuwangi/Bali. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi di Kabupaten Pasuruan. Batas administratif wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Pasuruan, Selat Madura, dan Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang

b. Visi, Misi dan Lambang Kabupaten Pasuruan

1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang Lebih Maju, Mandiri, Dinamis, dan Agamis”. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi

yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Pasuruan secara terpadu.

2. Misi

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknplogi yang berbasis kompetensi, iman, dan takwa.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih maju, mandiri, dan dinamis dengan mengoptimalkan potensi daerah, pembangunan wilayah, dan kemitraan serta pemeliharaan stabilitas pengembangan dunia usaha.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial serta pembinaan pemuda, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

3. Lambang Kabupaten Pasuruan

Gambar 3
Lambang Kabupaten Pasuruan

Sumber: www.pasuruankab.go.id

Berdasarkan PERDA No. II Tahun 1988 Pasal 3 tentang bentuk lambang daerah, maka lambang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Perisai dengan warna hijau tua melambangkan sifat-sifat ketahanan dan ketabahan dalam mencapai kesejahteraan dan kedamaian.
2. Bingkai warna hitam melambangan garis-garis kebijaksanaan.
3. Pita bertuliskan "KABUPATEN PASURUAN", menunjukkan satu daerah yang dilukiskan dalam lambang daerah.
4. Bintang yang terletak di tengah bagian atas, berwarna kuning emas, melambangkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang harus dijunjung tinggi penuh keagungan, sedangkan pancaran sinarnya yang berjumla lima buah mencerminkan PANCASILA.
5. Kubah berwarna biru muda, melambangkan tempat ibadah agama, secara khusus merupakan kehidupan spiritual masyarakat Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan dengan penuh ketakwaan.
6. Keris berwarna hitam dan kuning dengan garis tepi berwarna putih melambangkan sikap kepahlawanan.
7. Tebu dan Kapuk Randu melambangkan salah satu gambar penghasilan serta merupakan penunjang perekonomian yang menonjol bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.
8. Gunung, Daratan, dan Laut masing-masing berwarna hijau tua, kuning tua, dan biru tua, melambangkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pasuruan secara khusus sangat strategis dan terletak di antara ketiganya yang

masing-masing mengandung potensi perekonomian yang dapat dikembangkan dan bersifat dinamis.

9. Pita Putih bertuliskan "Guna Karya Sarana Bhakti", merupakan motto pembangunan yang berarti kerja yang bermanfaat sebagai amal untuk berbakti.

c. Geologi

Dengan luas wilayah ± 147.401,50 ha (3,13% luas Propinsi Jawa Timur), morfologi Kabupaten Pasuruan terdiri dari lima bagian yaitu kerucut gunung api, pegunungan, perbukitan, dataran pasir, dan dataran rendah sebagai berikut:

1. Kerucut gunung api di sebelah barat dan tenggara, dengan ciri bentuk strato dan kerucut gunung api, berketinggian antara 2000-3350 mdpl. Puncaknya antara lain Gunung Welirang, Gunung Arjuna, Gunung Ringgit, dan Gunung Bromo.
2. Pegunungan, terdapat di bagian barat dan barat laut, bercirikan strato dengan ketinggian 600-2000 mdpl. Puncaknya antara lain adalah Gunung Penanggungan. Daerah ini sebagian besar masih tertutup semak dan hujan tropik dengan batuan piroklastika dan epiklastika.
3. Perbukitan, bercirikan gelombang deretan bukit, pegunungan, atau pematang, berketinggian 25-600 mdpl. Puncak utamanya adalah Gunung Baung, Gunung Tinggi, dan Gunung Pule dengan aliran sungai yang menonjol adalah Sungai Welang. Daerah ini sebagian merupakan lahan pertanian dan perkebunan, membentang dari wilayah Kecamatan Tosari, Puspo sampai barat, yakni Kecamatan Tutur, Purwodadi, dan Prigen.

4. Dataran rendah, membentang di daerah bagian utara dan sekitar pantai utara. Dengan ketinggian 0-25 mdpl memiliki endapan alluvium, membentang dari timur yakni wilayah Kecamatan Nguling ke arah barat yakni Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton, dan Bangil. Sebagian besar merupakan lahan pertanian, pertambakan, dan perkebunan. Sungai utamanya adalah Sungai Rejoso.

Jenis geologi di Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api. Dengan banyaknya jenis batuan yang ada, menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang cukup kaya. Untuk mengetahui wilayah Kabupaten Pasuruan menurut struktur geologi tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Struktur Geologi
Tahun 2010

No.	Geologi	Luas	
		(ha)	(%)
1	*Alluvium*	14.512,00	9,85
2	*Young quarternary*	77.287,80	52,43
3	*Pleistocene volcanis*	2.748,00	1,86
4	*Pleistocene sediment*	488,00	0,33
5	*Pleiocene sediment*	849,00	0,58
6	*Old quarternary*	51.516,70	34,95
Jumlah		**147.401,50**	**100,00**

Sumber: Updating Database Kabupaten Pasuruan, 2010

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua kelompok besar, yaitu gunung api kuarter muda (*young quarternary*) seluas 77.287,80 ha atau 52,43% dan kuarter tua (*old*

quarternary) dengan luas 51.516,70 ha atau 34,95%. Sedangkan yang terendah adalah kelompok *pleistocene sediment* seluas 488,00 ha atau 0,33%.

d. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan berbukit dan daerah dataran rendah yang mempunyai ketinggian bervariasi antara 25-100 meter di atas permukaan laut. Kelandaian dataran miring ke utara. Secara umum topografi Kabupaten Pasuruan dapat dibedakan menjadi tiga daerah, yaitu:

1. Wilayah pantai dengan ketinggian 0-12,5 mdpl seluas 18.819,04 ha atau 12,77%. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan, dengan lokasi penyebaran pada Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, dan Nguling.
2. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 12,5-500 mdpl seluas 80.169,44 ha atau 54,39% dari luas wilayah, tepat difungsikan untuk kawasan pertanian tanaman pangan dan semusim serta untuk pengembangan perkotaan dan pedesaan, meliputi Kecamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, Puspo, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Prigen, Purwosari, Pandaan, Sukorejo, Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Rejoso, Gondangwetan, Grati, Lekok, Winongan, dan Nguling.
3. Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500-1000 mdpl seluas 21.877,17 ha atau 14,84% dari luas wilayah. Peruntukannya sesuai untuk tanaman keras atau tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan

air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem terasiring. Meliputi Kecamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, Prigen, Gempol, dan Pasrepan.

4. Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1000-2000 mdpl seluas 18.615,08 ha atau 12,63% dari luas wilayah berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, meliputi kawasan Kecamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
5. Wilayah dengan ketinggian di atas 2000 mdpl seluas 7.920,77 ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukan sebagai hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya, tersebar pada Kecamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

Keadaan kemiringan tanah di Kabupaten Pasuruan sangat bervariasi, dengan kemiringan sebagai berikut:

1. Kemiringan 0-5 derajat meliputi ± 20% luas wilayah. Daerah ini merupakan dataran rendah yang terletak di bagian utara.
2. Kemiringan 10-5 derajat meliputi ± 20% luas wilayah. Daerah ini merupakan dataran yang bergelombang yang terletak di bagian tengah.
3. Kemiringan 25-45 derajat meliputi ± 30% luas wilayah. Daerah ini merupakan yang bersambung dengan perbukitan (di bagian barat dan timur).
4. Kemiringan di atas 45 derajat meliputi ± 30% luas wilayah. Daerah ini merupakan pegunungan yang terletak di bagian selatan.

e. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam enam kelompok besar, yaitu alluvial, mediterian, regosol, labosal dan litasol. grumasol, dan andosal. Secara keseluruhan jenis tanah yang ada di Kabupaten Pasuruan sesuai untuk pertanian. Dalam pemanfaatannya harus diperhatikan kelestarian kesuburan tanah mengingat besarnya tingkat erosi seluruh jenis tanah kecuali litasol.

f. Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor curah hujan. Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis, dengan klasifikasi Schimdt dan Fergusan. Sebagian besar kecamatan tipe iklim C dan selebihnya tipe B. Temperatur sebagian besar wilayah antara 24º-32º C, sedangkan untuk wilayah di atas 2.770 meter temperatur terendah mencapai 5º C terdapat di Kecamatan Tosari, Puspo, dan Tutur. Variasi curah hujan untuk masing-masing wilayah rata-rata berada di bawah 1.750 mm dengan rata-rata hari hujan 66-138 HH.

Curah hujan Kabupaten Pasuruan banyak dipengaruhi oleh angin muson yang bertiup dari Benua Australia dan Asia dengan kecepatan rata-rata 12-30 knot. Angin Muson Timur merupakan angin yang kering, sedangkan angin yang bertiup dari arah barat relatif basah. Berdasarkan intensitas curah hujan daerah Pasuruan dan sekitarnya, maka intensitas curah hujannya dapat dikelompokkan menjadi empat zona curah hujan sebagai berikut:

1. Zona curah hujan antara 2.000-2.500 mm/tahun, zona ini dijumpai di daerah sekitar Pasrepan dan daerah sekitar Kolursari dan selatan Purwosari.
2. Zona curah hujan antara 1.750-2.000 mm/tahun, zona curah hujan ini tersebar di bagian barat, yaitu di daerah sekitar Purwosari dan daerah sekitar Beji.
3. Zona curah hujan antara 1.500-1.750 mm/tahun, zona curah hujan ini tersebar di daerah bergelombang hingga perbukitan, antara lain di sekitar daerah Bangil, Rembang, Wonorejo, Kejayan, dan daerah Lumbang.
4. Zona curah hujan <1.500 mm/tahun, zona curah hujan ini tersebar di daerah sepanjang pantai di sekitar daerah Kraton, Kota Pasuruan, Gondangwetan, Lekok, Grati, dan Nguling.

Dengan keadaan iklim di atas, maka berbagai kegiatan masyarakat seperti pertanian, peternakan dan perikanan sangat terdukung. Oleh sebab itu, selain keadaan geografis, kondisi iklim dan cuaca merupakan salah satu faktor penunjang tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Pasuruan.

g. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir enam sungai besar yang bermuara di Selat Madura, yaitu Sungai Lawean bermuara di Desa Penunggul Kecamatan Nguling, Sungai Rejoso Bermuara di Wilayah Kecamatan Rejoso, Sungai Gembong bermuara di wilayah Kota Pasuruan, Sungai Welang bermuara di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton, Sungai Masangan bermuara di Desa Raci Kecamatan Bangil dan Sungai Kedunglarangan bermuara di Desa Kalianyar

Kecamatan Bangil. Oleh karena itu tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian cukup memadai.

Selain potensi sungai di atas, terdapat danau dan sejumlah mata air. Danau Ranu Grati dengan volume efektif sebesar 5.013 m^3 dan volume maksimum sebesar 5.217 m^3 mampu mengeluarkan debit maksimum 980 liter/detik dan debit minimum 463 liter/detik. Selain itu terdapat 471 sumber mata air yang tersebar di 24 kecamatan dengan debit air antara 1 sampai dengan 5.650 liter/detik. Yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maksimumnya 5.650 liter/detik, kemudian Sumber Air Banyu Biru yang juga terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maksimumnya 225 liter/detik. Sedangkan pada lereng perbukitan banyak ditemui sumur-sumur bor tertekan (artesis) atau tidak tertekan dengan debit sekitar 5-10 liter/detik. Dengan debit yang sangat besar tersebut, maka sumber air yang berasal dari danau dan mata air tersebut dapat digunakan sebagai salah satu penunjang suplai kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat baik untuk Kabupaten dan Kota Pasuruan maupun maupun bagi daerah lain di sekitar Kabupaten Pasuruan, seperti Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik yang memanfaatkan Sumber Air Umbulan dengan debit sebesar 6.607,51 liter/detik.

h. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan terdiri atas permukiman, persawahan, tegal, kebun campur, perkebunan, hutan, rawa/danau, tambak/kolam, padang rumput, tanah tandus/rusak dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2010

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (km^2)
1	Permukiman	155,71
2	Persawahan	443,11
3	Tegalan	426,65
4	Kebun campur	49,88
5	Perkebunan	34,89
6	Hutan	282,09
7	Rawa/danau	3,08
8	Tambak/kolam	31,13
9	Padang rumput	0,14
10	Tanah tandus/rusak	22,92
11	Lain-lain	23,97
Jumlah		**1.473,57**

Sumber: Updating Database Kabupaten Pasuruan, 2010

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh persawahan yang mencapai 443,11 km^2. Kemudian tegalan 426,65 km^2, hutan 282,09 km^2, permukiman 155,71 km^2, kebun campur 49,88 km^2, perkebunan 34,89 km^2, tambak/kolam 31,13 km^2, penggunaan lainnya 23,97 km^2, tanah tandus/rusak 22,92 km^2, rawa/danau 3,08 km^2, dan padang rumput 0,14 km^2.

i. Wilayah Administratif

Secara administratif, Kabupaten Pasuruan terbagai menjadi 24 kecamatan yang terdiri dari 365 desa/kelurahan, 1.464 dusun/lingkungan, 2.991 Rukun Warga (RW), dan 8.765 Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah desa/kelurahan, dusun/lingkungan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) menurut kecamatan di Kabupaten Pasuruan akan disajikan dalam tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan Tahun 2010

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Dusun / Lingkungan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Purwodadi	13	58	112	397
2	Tutur	12	70	110	295
3	Puspo	7	37	79	198
4	Tosari	8	25	31	126
5	Lumbang	12	44	83	208
6	Pasrepan	17	39	128	289
7	Kejayan	25	89	157	447
8	Wonorejo	15	61	114	378
9	Purwosari	15	68	169	414
10	Prigen	14	62	217	702
11	Sukorejo	19	72	180	478
12	Pandaan	18	92	221	620
13	Gempol	15	109	200	663
14	Beji	14	93	120	402
15	Bangil	15	10	118	446
16	Rembang	17	63	139	340
17	Kraton	25	78	123	392
18	Pohjentrek	9	33	48	160
19	Gondangwetan	20	46	105	288
20	Rejoso	16	46	81	265
21	Winongan	18	76	113	211
22	Grati	15	65	115	404
23	Lekok	11	76	114	309
24	Nguling	15	52	114	333
Jumlah		**365**	**1.464**	**2.991**	**8.765**

Sumber: Updating Database Kabupaten Pasuruan, 2010

Berdasarkan tabel 5 di atas, Kabupaten Pasuruan jika ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Kejayan dan Kecamatan Kraton memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sama-sama memiliki 25 desa/kelurahan, jika ditinjau dari dusun/lingkungan Kecamatan Gempol memiliki jumlah dusun/lingkungan terbanyak, yaitu 109 dusun/lingkungan, jika ditinjau dari jumlah Rukun Warga (RW) Kecamatan Pandaan memiliki jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak

dengan jumlah 221 RW dan jika ditinjau dari jumlah Rukun Tetangga (RT) maka Kecamatan Prigen memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak dengan jumlah 702 RT.

j. Ekonomi

Untuk mengetahui sampai berapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah biasanya dilihat pada tingkat laju perekonomian daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, menunjukkan semakin mantapnya perekonomian daerah tersebut. Gambaran perekonomian di Kabupaten Pasuruan biasanya diperoleh dengan menghitung semua jenis produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu atau yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain dengan memperhatikan kondisi dan potensi perdagangan juga memperbaiki sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka menunjang:

1. Kelancaran terhadap distribusi barang khususnya sembilan bahan pokok dan pengendalin gejolak harga.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan terciptanya stabilitas daerah dan kemudahan berinfestasi.
3. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui pemberian kemudahan dalam mengembangkan usaha, pemberian kredit, dan permodalan.

Untuk memperjelas angka pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Pasuruan
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2010

No.	Sektor	Tahun	
		2009	2010
1	Pertanian	3,20	4,56
2	Pertambangan dan penggalian	7,40	3,19
3	Industri pengolahan	6,24	4,01
4	Listrik, gas, dan air bersih	5,92	4,69
5	Bangunan	7,96	5,95
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	8,47	6,44
7	Angkutan dan komunikasi	4,40	10,18
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	6,78	7,94
9	Jasa-jasa	5,24	6,74
Pertumbuhan Ekonomi		**5,89**	**5,31**

Sumber: Updating Database Kabupaten Pasuruan, 2010

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 9 sektor perekonomian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pasuruan, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor keuangan, persewaan, serta sektor jasa. Dari sektor tersebut, sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan kontributor terbesar tahun 2009 dengan kontribusi sebesar 8,47, sedangkan kontributor terendah pada tahun 2009 adalah dari sektor pertanian dengan kontribusi 3,20 pada harga konstan. Sektor angkutan dan komunikasi merupakan kontributor terbesar tahun 2010 dengan kontribusi sebesar 10,18 sedangkan kontribusi terendah tahun 2010 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,19 pada harga konstan.

k. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan akhir tahun 2010 sebesar 1.510.261 jiwa dengan rincian 747.376 jiwa penduduk laki-laki atau 49,49% dan 762.885 jiwa penduduk perempuan atau 50,51%. Pertumbuhan penduduk pertahun terhitung sebesar 1,01%. Dengan luas wilayah sekitar 1.474,015 km^2 yang didiami oleh 1.510.261 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 1.025 orang per km^2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan lebih jelasnya digambarkan dalam tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2010

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Purwodadi	32.738	32.650	65.388
2	Tutur	26.010	25.877	51.887
3	Puspo	13.336	13.903	27.239
4	Tosari	9.132	9.349	18.481
5	Lumbang	16.126	16.669	32.795
6	Pasrepan	24.364	25.486	49.850
7	Kejayan	30.134	32.415	62.549
8	Wonorejo	27.349	28.999	56.348
9	Purwosari	38.775	39.029	77.804
10	Prigen	41.305	40.978	82.283
11	Sukorejo	40.231	40.765	80.996
12	Pandaan	51.944	53.195	105.139
13	Gempol	61.923	61.280	123.203
14	Beji	38.958	39.232	78.190
15	Bangil	40.971	43.291	84.262
16	Rembang	29.638	30.831	60.469
17	Kraton	44.866	44.103	88.969
18	Pohjentrek	14.210	14.119	28.329
19	Gondangwetan	25.869	26.711	52.580
20	Rejoso	21.790	21.806	43.596
21	Winongan	20.452	20.787	41.239
22	Grati	36.600	37.279	73.879
23	Lekok	33.812	35.934	69.746
24	Nguling	26.843	28.197	55.040
Jumlah		**747.376**	**762.885**	**1.510.261**

Sumber: Updating Database Kabupaten Pasuruan, 2010

Berdasarkan tabel 7 dapat dikatakan bahwa dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Kraton adalah tiga kecamatan dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak, yakni masing-masing berjumlah 123.203 orang, 105.139 orang, dan 88.969 orang. Sedangkan Kecamatan Tosari merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya, yakni sebanyak 18.481 orang.

Kabupaten Pasuruan juga memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah Suku Jawa dan yang lain terdiri dari Suku Madura serta keturunan seperti Cina, Arab dan India. Di samping itu masih dapat ditemui satu suku dengan sosial budaya khas, yaitu masyarakat Tengger yang hidup di kawasan Pegunungan Tengger dan Gunung Bromo Kecamatan Tosari. Sistem sosial dan religi masyarakat Tengger ini sangat unik dan khas dengan berbagai aktivitasnya seperti perayaan Hari Raya Kasodo dan Hari Raya Karo yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai religius dan sejarah. Masyarakat Kabupaten Pasuruan, juga dikenal sebagai masyarakat agamis dengan kerukunan dan toleransi beragama yang sangat terbina dengan harmonis. Agama yang dianut sebagian besar Islam serta lainnya Kristen Protestan, Katholik, Budha dan Hindu.

l. Pendidikan

Pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara. Secara global pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mengetahui lebih jelasnya gambaran komposisi pendidikan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Pasuruan
Tahun 2009-2010

No.	Strata Pendidikan	Tahun 2009		Tahun 2010	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Tamat SD	549.649	37,35	544.524	36,91
2	SD	528.635	35,92	536.111	36,34
3	SMP	238.311	16,19	237.927	16,13
4	SMA/SMK	136.278	9,26	136.633	9,26
Sub. Jumlah		**1.452.873**	**98,64**	**1.475.365**	**98,72**
5	Akademi/D3	9.370	0,64	22.918	0,73
6	D4/S1	8.912	0,61	10.923	0,60
7	S2	364	0,02	968	0,03
8	S3	45	0,00	87	0,00
Sub. Jumlah		**18.691**	**1,27**	**34.896**	**1,36**
Jumlah		**1.471.564**	**100,00**	**1.510.261**	**100,00**

Sumber: Updating Database Kabupaten Pasuruan, 2010

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Pasuruan terbesar tingkat pendidikan sampai pendidikan menengah, yaitu pada tahun 2009 mencapai 1.452.873 atau 98,64% sedangkan pada tahun 2010 mencapai 1.475.365 atau 98,72%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasuruan yang berlatar belakang pendidikan sampai pendidikan menengah pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,08% jika dibandingkan tahun 2009. Penduduk Kabupaten Pasuruan yang berlatar belakang pendidikan akademisi tahun 2009 sebanyak 18.691 atau 1,27% sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 34.896 atau 1,37%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasuruan yang berlatar belakang pendidikan akademisi pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,09% jika dibandingkan tahun 2009 dan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang berlatar belakang pendidikan sampai pendidikan menengah.

m. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan aspek penting dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia. Pekerjaan yang layak dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mengetahui lebih jelasnya gambaran jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9
Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Pasuruan
Tahun 2009-2010

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun 2009		Tahun 2010	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Bekerja	580.385	39,44	578.014	39,18
2	Petani	442.826	30,09	440.221	29,84
3	PNS	12.053	0,82	13.284	0,90
4	TNI/POLRI	4.662	0,32	6.974	0,47
5	Pedagang	63.041	4,28	64.204	4,35
6	Pegawai swasta	106.164	7,21	108.539	7,36
7	Jasa-jasa	113.325	7,70	114.638	7,77
8	Lainnya	149.108	10,13	149.491	10,13
Jumlah		**1.471.564**	**100,00**	**1.510.261**	**100,00**

Sumber: Updating Database Kabupaten Pasuruan, 2010

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 dan 2010 sebagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Pasuruan adalah bekerja sebagai petani, usaha jasa, pegawai swasta, pedagang, PNS, dan TNI/POLRI. Penduduk Kabupaten Pasuruan yang tidak/belum bekerja menempati jumlah terbesar pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang tidak/belum bekerja sebanyak 580.385 jiwa atau sekitar 39,44%, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang tidak/belum bekerja 578.014 jiwa atau sekitar 39,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang tidak/belum bekerja mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2009.

2. Gambaran Umum Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna

a. Sejarah

Sampoerna Entrepreneurship Training Centre (SETC) atau Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna merupakan program yang khusus dilakukan oleh PT HM Sampoerna sebagai bagian dari aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR), terutama terkait dalam pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat. PPK Sampoerna didirikan di atas lahan seluas ± 27 hektar di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. PPK Sampoerna didirikan sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan terpadu untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil di bidang agribisnis dan teknologi kejuruan tepat guna serta menyediakan berbagai fasilitas terpadu seperti ruang-ruang pelatihan, bengkel, serta lahan pertanian dan peternakan. Fasilitas tersebut memberikan pelatihan praktis dan kecapakan kerja yang dapat mereka gunakan untuk memulai usaha baru atau meningkatkan usaha mereka yang telah berjalan. PPK Sampoerna menyelenggarakan berbagai program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar pabrik serta para karyawan yang memasuki masa persiapan pensiun.

Dalam pelaksanaan program pelatihan dan konsultasi bisnis serta pengembangan pasar PPK Sampoerna bekerja sama dengan PT Primakelola Agribisnis Agroindustri, yakni sebuah unit lembaga bisnis di bawah naungan Institut Pertanian Bogor (IPB). Primakelola bergerak di bidang agribisnis agroindustri, baik dalam bentuk jasa maupun bisnis riil. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Primakelola Agribisnis Agroindustri yaitu sebagai berikut:

a. Pelatihan

Pelatihan dititikberatkan dalam meningkatkan keterampilan analisis dan teknis bagi pelaku atau calon pelaku agribisnis agroindustri, atau tenaga yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan riil agribisnis agroindustri.

b. Konsultansi

Memberikan jasa konsultan bisnis, utamanya pada agribisnis agroindustri, perencanaan, pembangunan dan pengendalian agribisnis agroindustri. Jasa konsultansi diberikan baik bagi pelaku bisnis perseorangan, perseroan, BUMN atau lembaga lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan agribisnis agroindustri.

c. Penelitian

Kegiatan penelitian dititikberatkan pada kaji tindak (*action research*), studi kelayakan atau hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan bisnis bidang agro. Primakelola tidak melayani kegiatan *research* yang berorientasi pada pengembangan ilmu dan teknologi secara teoritis, tetapi lebih banyak bergerak pada aplikasi (terapan).

d. Monitoring dan Evaluasi

Pelayanan monitoring dan evaluasi diberikan kepada mitra untuk suatu kegiatan proyek-proyek di lapangan, terutama yang berkaitan dengan bidang agribisnis agroindustri.

e. Asistensi atau Pendampingan

Primakelola melayani permintaan asistensi atau pendampingan baik "*on call*", maupun "*on job consultation*", Primakelola akan menyediakan tenaga asisten atau pendamping profesional sesuai dengan tingkatan yang diinginkan oleh mitra.

f. Pembinaan

Primakelola akan menyediakan tenaga-tenaga profesional untuk pembinaan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang agribisnis agroindustri yang dilakukan oleh perusahaan swasta, BUMN/BUMD, maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam skala usaha kecil, menengah, dan besar.

g. Kontrak Manajemen

Kontrak manajemen diberikan kepada mitra untuk suatu kegiatan bisnis maupun non-bisnis, dalam hal ini pengelolaan seluruh aktivitas tersebut dilakukan oleh Primakelola.

Melalui pusat pelatihan PPK Sampoerna ini, peserta didik mendapatkan serangkaian pelatihan teknik budidaya pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan makanan, perbengkelan, dan lain-lain. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi ekonomi di daerah asal peserta. Untuk mendukung program pengembangan lembaga dalam upaya menciptakan wirausahawan baru, PPK Sampoerna bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pembiayaan.

b. Visi, Misi, Logo, Tujuan dan Penerima Manfaat PPK Sampoerna

PPK Sampoerna memiliki visi, misi, logo, tujuan, dan penerima manfaat yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan program-program pelatihan. Adapun visi, misi, logo, tujuan, dan penerima manfaat dari PPK Sampoerna adalah sebagai berikut:

1. Visi PPK Sampoerna

Visi dari PPK Sampoerna adalah "Menjadi Model Pengembangan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil di Indonesia Berbasis Pertanian dan Teknologi Kejuruan Tepat Guna, serta Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan".

2. Misi PPK Sampoerna

Untuk mewujudkan visi PPK Sampoerna menjabarkannya ke dalam misi PPK Sampoerna. Adapun misi PPK Sampoerna adalah "Memberdayakan dan Mengembangkan Masyarakat untuk Menjadi Wirausahawan yang Handal dan Berwawasan ke Depan dengan Melibatkan *Stakeholders*".

3. Logo PPK Sampoerna

Gambar 4
Logo PPK Sampoerna

Sumber: Profil PPK Sampoerna, 2010

Berdasarkan gambar 4 di atas, logo PPK Sampoerna memiliki arti sebagai berikut:

a. Warna merah melambangkan perusahaan PT HM Sampoerna, Tbk
b. Warna biru melambangkan karyawan PT HM Sampoerna dan masyarakat
c. Lingkaran warna kuning melambangkan bahwa PT HM Sampoerna melindungi dan mengayomi karyawan dan masyarakat, baik masyarakat yang berada di sekitar perusahaan maupun masyarakat yang berada di luar perusahaan agar tercipta suatu kesejahteraan hidup masyarakat

4. Tujuan

Adapun tujuan dari PPK Sampoerna, antara lain:

a. Menumbuhkan dan mengembangkan wirausahawan di bidang agribisnis dan teknologi kejuruan tepat guna.
b. Menjadi model pemberdayaan dan bisnis bagi usaha kecil di Indonesia.
c. Menjadi sarana penelitian langsung di lapangan (*action research*) mengenai sistem pertanian terpadu (*integrated farming system*).

5. Penerima Manfaat

Beberapa penerima manfaat dari PPK Sampoerna antara lain:

a. Masyarakat di sekitar wilayah operasional PT HM Sampoerna Tbk
b. Karyawan Sampoerna pra-pensiun
c. Pengusaha mikro dan kecil
d. Pemerintah
e. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan beserta dengan anak didiknya

f. Masyarakat luas (terutama calon wirausahawan)

c. Fasilitas

Guna mendukung aktivitas-aktivitas pelatihan dan penelitian yang berbasis agribisnis dan teknologi kejuruan, Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna menyediakan berbagai fasilitas terpadu. Secara detail, fasilitas di PPK Sampoerna dapat dilihat dalam tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10
Fasilitas Terpadu PPK Sampoerna
Tahun 2010

No.	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Unit kandang sapi	5	Berkapasitas 12 ekor sapi
2	Unit kandang kambing	7	Berkapasitas 20 ekor kambing
3	Unit pembuatan pupuk organik	1	Dilengkapi dengan mesin-mesin pembuat kompos, pupuk hijau, bokasi, dan silase
4	Unit pembuatan pupuk cair	1	Menggunakan teknologi *Urine Fermentation Technology* (UFT)
5	Kolam ikan	6	-
6	Lahan hortikultura	1	Seluas 4 hektar dengan jenis tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman potong untuk praktek lapangan
7	Unit rumah kaca (*green house*)	1	-
8	Unit pembibitan	1	-
9	Unit pengolahan pangan dan hasil pertanian FAPP (*Food and Agricultural Processing Plant*)	1	Dilengkapi dengan mesin-mesin: pengolah tahu, pembuatan beraneka keripik, pembuat sari buah, pembuat rempah instan, pembuat bakso, pembuat sayuran kering, dan mesin kemasan
10	Bengkel	1	Untuk kegiatan pelatihan otomotif kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Sumber: Profil PPK Sampoerna, 2010

Lanjutan Tabel 10 tentang Fasilitas Terpadu PPK Sampoerna Tahun 2010

No.	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
11	Ruang pelatihan I	1	Berkapasitas 40 orang dan dilengkapi dengan AC
12	Ruang pelatihan II	1	Berkapasitas 30 orang dan dilengkapi dengan AC
13	Ruang pelatihan III	1	Ruang pelatihan kandang dengan kapasitas 30 orang (tanpa AC)
14	Unit bisnis kecil dan pengembangan pasar	1	-
15	Perpustakaan	1	-
16	Asrama	1	-
17	Pendopo	1	-
18	Musholla	1	-

Sumber: Profil PPK Sampoerna, 2010

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa PPK Sampoerna telah memiliki fasilitas terpadu yang cukup memadai. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya areal peternakan dan pertanian terpadu yang terdiri atas unit kandang sapi, kandang kambing, unit pembuatan pupuk organik, unit pembuatan pupuk cair, kolam ikan, lahan hortikultura, unit rumah kaca (*green house*), unit pembibitan, serta unit pengolahan pangan dan hasil pertanian. Selain itu, pada pelatihan kejuruan tepat guna juga disediakan fasilitas berupa bengkel untuk kegiatan pelatihan otomotif kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Semua fasilitas tersebut masih digunakan sebagaimana fungsinya.

Fasilitas yang tidak kalah pentingnya adalah ruang pelatihan yang terdiri dari ruang pelatihan I, ruang pelatihan II, dan ruang pelatihan III yang berupa ruang pelatihan kandang. Selain itu, untuk menunjang semua kegiatan yang

dilaksanakan PPK Sampoerna juga menyediakan unit bisnis dan pengembangan pasar, perpustakaan, asrama, pendopo, dan musholla.

d. Jenis - Jenis Pelatihan

Beberapa jenis pelatihan yang ditawarkan oleh PPK Sampoerna yaitu:

1. Pelatihan Sosial

   Pelatihan sosial adalah pelatihan yang diberikan kepada masyarakat ring I, yaitu warga yang tinggal di sekitar lokasi *plant* atau pabrik PT HM Sampoerna dengan jarak antara 0-500 meter dari wilayah operasional perusahaan, pelatihan ini bersifat tanpa pembebanan. Untuk pelatihan sosial biasanya melalui pemberitahuan ke masyarakat, aparatur pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat. Sistem yang digunakan "*getok tular*", yakni sistem tanpa sarana pemberitahuan khusus karena pesertanya dekat dengan lokasi pelatihan.

2. Pelatihan Reguler

   Pelatihan reguler adalah pelatihan untuk umum namun dengan pembiayaan yang terbatas, umumnya masih disubsidi. Misalnya: pelatihan PNPM, dinas-dinas pemerintahan, koperasi masyarakat, karang taruna, organisasi masyarakat (ormas), dan lain-lain. Pelatihan reguler menggunakan metode pemasaran dan penawaran langsung, biasanya dilakukan oleh *Departement External Communication* PT HM Sampoerna, umumnya dilakukan setelah *press conference*.

3. Pelatihan Komersil

Pelatihan komersil adalah pelatihan premium, umumnya diberikan bagi para pengusaha pro dan/atau hubungan dengan perusahaan lain. Metode pelatihan komersil juga sama dengan pelatihan reguler, yakni dengan menggunakan metode pemasaran dan penawaran langsung.

e. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PPK Sampoerna digambarkan dalam gambar 5 dan gambar 6 di bawah ini:

Gambar 5
Struktur Organisasi PPK Sampoerna

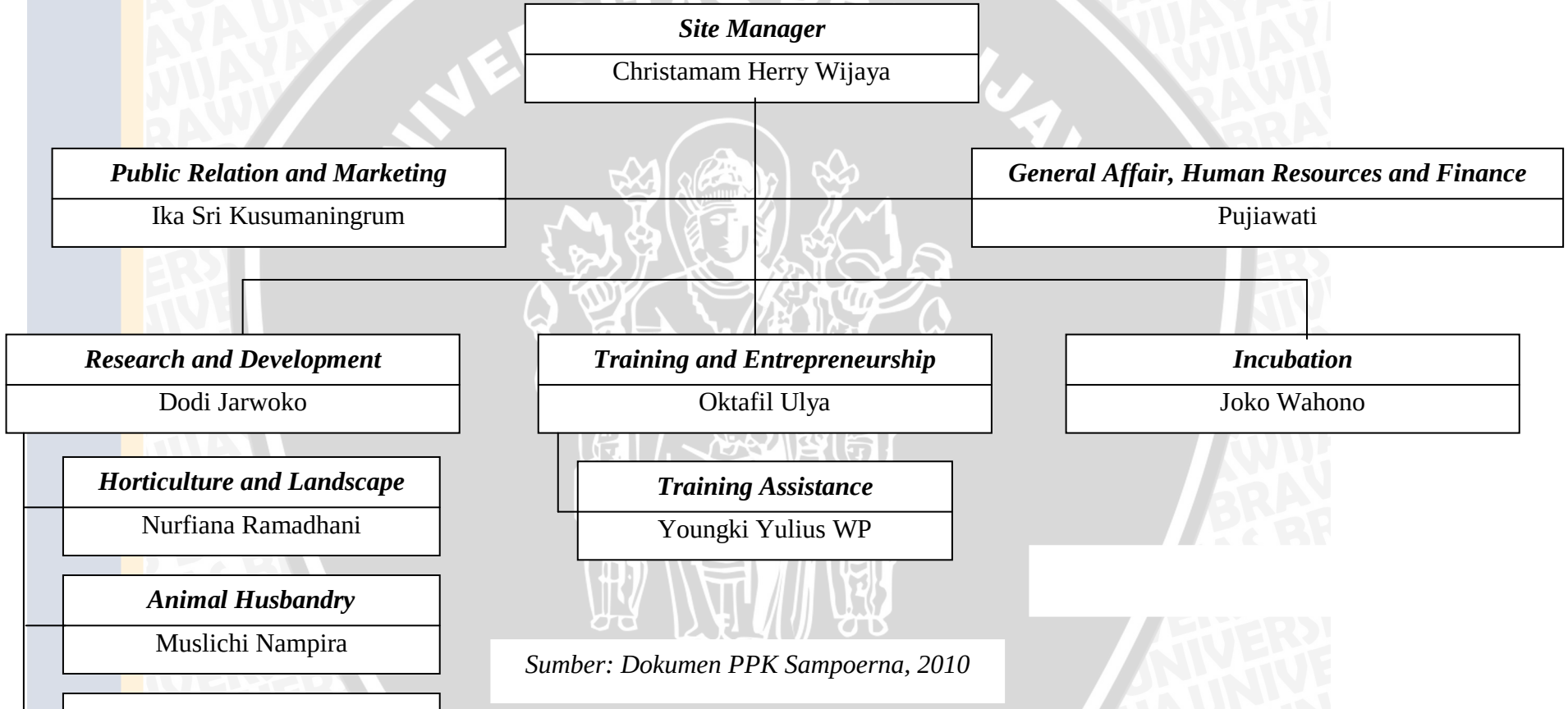

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2010

Gambar 6
Hubungan Struktur Organisasi PPK Sampoerna dengan Pekerja Lapang

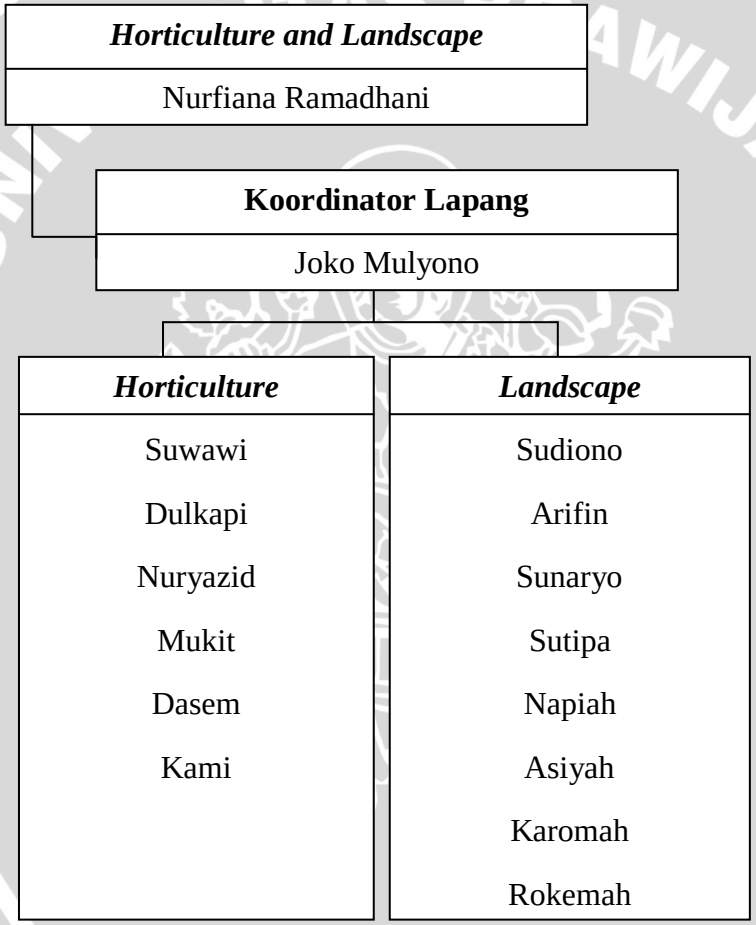

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2010

Lanjutan Gambar 6 tentang Hubungan Struktur Organisasi PPK Sampoerna dengan Pekerja Lapang

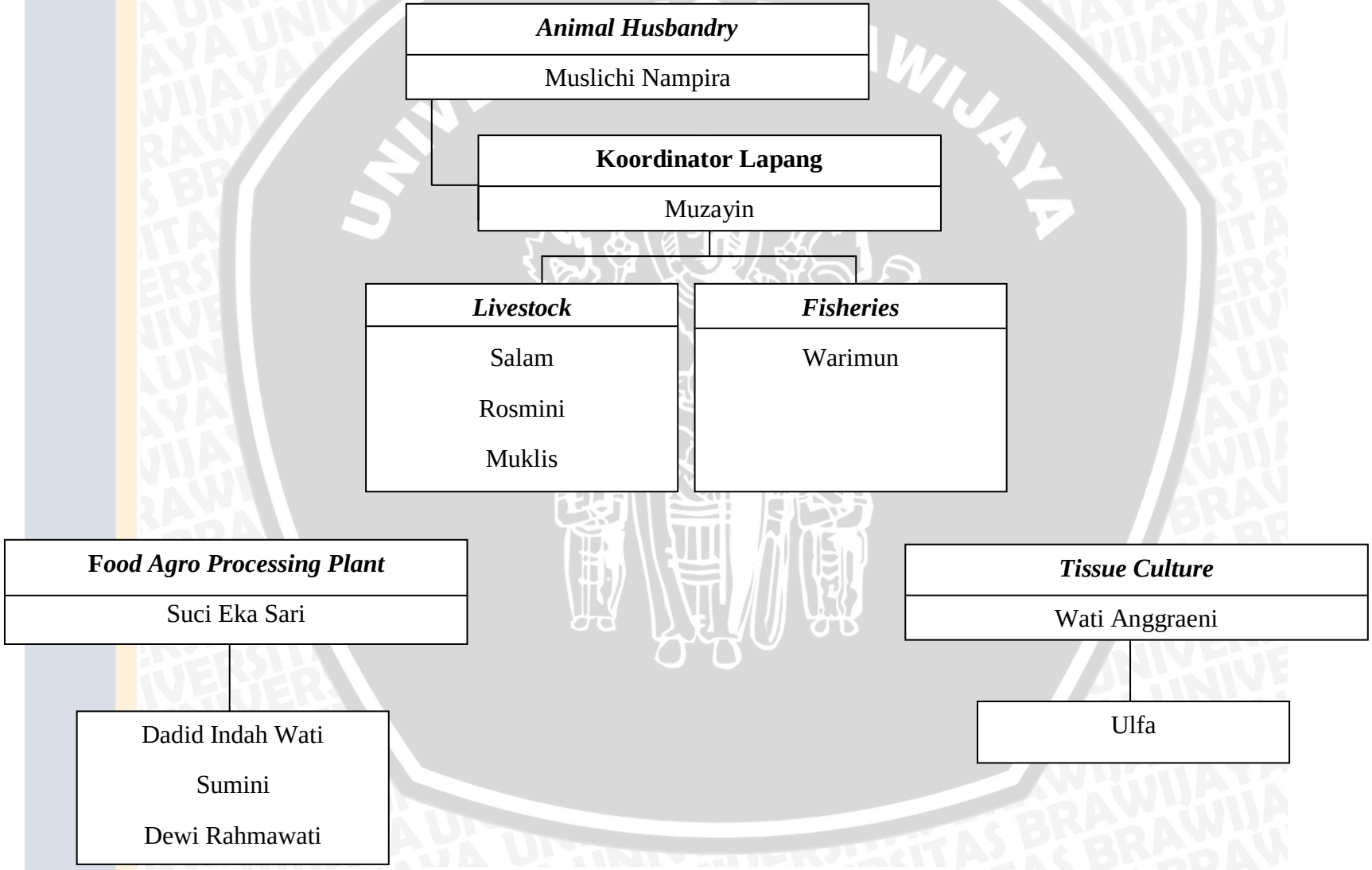

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2010

Berdasarkan gambar 5 dan 6 di atas dapat diketahui masing-masing tugas sebagai berikut:

1. *Site Manager*, mempunyai tugas antara lain:
   a. Bertanggung jawab terhadap jalannya operasional dan teknis PPK Sampoerna
   b. Melaksanakan fungsi manajerial dalam pelaksanaan program PPK Sampoerna
   c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan kontrol terhadap jalannya kegiatan PPK Sampoerna
   d. Mengkoordinir staff PPK Sampoerna
2. *Public Relation and Marketing*, mempunyai tugas antara lain:
   a. Bertanggung jawab dalam pengaturan penerimaan kunjungan PPK Sampoerna
   b. Menjalin hubungan dan komunikasi dengan pihak diluar PPK Sampoerna
   c. Menjalankan fungsi pemasaran dalam memperkenalkan produk, program, dan pelatihan PPK Sampoerna kepada pihak lain
   d. Pengembangan kerjasama
3. *General affair, Human Resources and Finance*, mempunyai tugas antara lain:
   a. Bertanggung jawab terhadap keadaan umum PPK Sampoerna
   b. Melaksanakan fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana PPK Sampoerna
   c. Mengkoordinir kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana PPK Sampoerna yang melibatkan pihak ketiga

d. Melakukan evaluasi terhadap pengaturan pekerja PPK Sampoerna
e. Melakukan perencanaan keuangan PPK Sampoerna
f. Melakukan evaluasi anggaran dan upaya peningkatan efisiensi anggaran PPK Sampoerna
g. Dokumentasi surat dan arsip
h. Melakukan pembayaran-pembayaran
i. Mengumpulkan dan mengarsipkan bukti transaksi
j. Membuat catatan harian, buku bantu, dan jurnal keuangan
k. Melakukan pelaporan keuangan dan evaluasinya kepada manajer PPK Sampoerna

4. *Head of Research and Development*, mempunyai tugas antara lain:
   a. Menjalankan fungsi perencanaan kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan unit-unit PPK Sampoerna
   b. Mengkoordinir jalannya kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan setiap unit di PPK Sampoerna (belanja bahan, pengamatan, dan pelaporan)
   c. Melakukan evaluasi jalannya kegiatan penelitian dan pengembangan serta kegiatan harian setiap unit PPK Sampoerna
5. *Head of Training and Entrepreneurship*, mempunyai tugas antara lain:
   a. Melakukan perancangan program pelatihan tahunan PPK Sampoerna
   b. Menyusun anggaran pelatihan PPK Sampoerna
   c. Melakukan pengaturan jadwal dan kegiatan pelatihan PPK Sampoerna
   d. Menjalin komunikasi dengan instruktur pelatihan PPK Sampoerna

e. Menjalin komunikasi dengan calon peserta pelatihan PPK Sampoerna
f. Penyiapan sarana prasarana dan materi pelatihan
g. Penyelenggaraan pelatihan, pelaporan, dokumentasi, dan evaluasi pelatihan
h. Menjalankan fungsi monitoring terhadap peserta pelatihan PPK Sampoerna

6. *Head of Incubation*, mempunyai tugas antara lain:
   a. Melakukan perancangan program inkubasi PPK Sampoerna yang ditujukan bagi warga ring I PT HM Sampoerna
   b. Menyusun anggaran program inkubasi
   c. Memperkenalkan dan induksi program inkubasi PPK Sampoerna kepada masyarakat ring I maupun aparatur pemerintahan yang berkepentingan
   d. Melakukan komunikasi dengan calon peserta program inkubasi PPK Sampoerna
   e. Melaksanakan fungsi seleksi dan pemilihan terhadap calon peserta program inkubasi PPK Sampoerna
   f. Mengkoordinir jalannya program inkubasi dengan unit-unit PPK Sampoerna yang berhubungan
   g. Mengatur sistem pembagian hasil
   h. Mengevaluasi jalannya program inkubasi PPK Sampoerna
   i. Menyusun laporan program inkubasi

7. *Horticulture and Landscape*, mempunyai tugas antara lain:
   a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penelitan dan pengembangan yang berkaitan dengan hortikultura
   b. Melaksanakan kegiatan harian Unit Hortikultura PPK Sampoerna
   c. Melakukan pengamatan dan evaluasi kegiatan harian dan program penelitian dan pengembangan Unit Hortikultura
   d. Melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi Unit Hortikultura kepada Kepala RnD
   e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana produksi pertanian Unit Hortikultura
   f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan pertamanan PPK Sampoerna
   g. Melaksanakan kegiatan regenerasi dan pemeliharaan tanaman pertamanan PPK Sampoerna
   h. Berkoordinasi dengan Divisi Inkubasi bila terdapat program inkubasi yang relevan
8. *Animal Husbandry*, mempunyai tugas antara lain:
   a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penelitan dan pengembangan yang berkaitan dengan peternakan dan perikanan
   b. Melaksanakan kegiatan harian Unit Peternakan dan Perikanan PPK Sampoerna
   c. Melakukan pengamatan dan evaluasi kegiatan harian dan program penelitian dan pengembangan Unit Peternakan dan Perikanan

d. Melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi Unit Peternakan dan Perikanan kepada Kepala RnD
e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana produksi yang dimiliki Unit Peternakan dan Perikanan
f. Berkoordinasi dengan Divisi Inkubasi bila terdapat program inkubasi yang relevan

9. *Food Agro Processing Plant* (FAPP), mempunyai tugas antara lain:
   a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penelitan dan pengembangan yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian, baik pangan maupun non-pangan
   b. Melaksanakan kegiatan harian Unit FAPP PPK Sampoerna
   c. Melakukan pengamatan dan evaluasi kegiatan harian dan program penelitian dan pengembangan Unit FAPP
   d. Melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi Unit FAPP kepada Kepala RnD
   e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana produksi yang dimiliki Unit FAPP
   f. Berkoordinasi dengan Divisi Inkubasi bila terdapat program inkubasi yang relevan
10. *Tissue Culture*, mempunyai tugas antara lain:
    a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penelitan dan pengembangan yang berkaitan dengan kultur jaringan
    b. Melaksanakan kegiatan harian Unit Kultur Jaringan PPK Sampoerna

c. Melakukan pengamatan dan evaluasi kegiatan harian dan program penelitian dan pengembangan Unit Kultur Jaringan
d. Melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi Unit Kultur Jaringan kepada Kepala RnD
e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana produksi yang dimiliki Unit Kultur Jaringan
f. Berkoordinasi dengan Divisi Inkubasi bila terdapat program inkubasi yang relevan
g. Menjalin komunikasi dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengembangan produksi komoditas pertanian yang dapat diperbanyak melalui teknik kultur jaringan

11. *Training and Entrepreneurship*, mempunyai tugas antara lain:
    a. Membantu Kepala Divisi Pelatihan dalam perencanaan kegiatan pelatihan PPK Sampoerna
    b. Mengkoordinir jalannya kegiatan pelatihan yang sedang berlangsung
    c. Menjalin komunikasi dengan instruktur dan peserta pelatihan
    d. Melakukan evaluasi dan perhitungan statistik pelatihan yang sudah berlangsung

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. HM Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Cosmmunity Development*) untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Lokal pada Masyarakat Ring I

Kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya yang terwujud melalui adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR juga dilaksanakan oleh oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. Program CSR Sampoerna dibagi menjadi beberapa program utama, yaitu: *Sampoerna goes to campus*, pendidikan, *community development*, lingkungan, sosial, dan *employee*. Salah satu program pengembangan masyarakat (*community development*) yang dijalankan adalah Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna.

PPK Sampoerna didirikan sebagai salah satu perwujudan program *Cosrporate Social Responsibility* (CSR) melalui pengembangan potensi lokal dengan sasaran masyarakat di sekitar wilayah operasional PT HM Sampoerna dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi wirausaha di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, juga termasuk industri kreatif. Selain itu, PPK Sampoerna ingin menjadi model pemberdayaan dan bisnis bagi usaha kecil di Indonesia, serta menjadi sarana penelitian langsung di lapangan (*action research*) mengenai sistem pertanian terpadu (*integrated farming system*). Bentuk fasilitasi yang ditujukan untuk kelompok petani tersebut berupa pembelajaran dan pelatihan usaha, sekaligus teknis pascapanen hingga menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai bagian dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut telah diadopsi banyak perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dengan tujuan dan aktifitas kegiatan yang lebih luas. Perubahan sosial politik setelah reformasi menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam membangun hubungan tersebut pengembangan ekonomi lokal atau pengembangan usaha kecil di sekitar perusahaan adalah salah satu entri poin stategis yang sering dipilih oleh sebagian perusahaan. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau membutuhkan dukungan dan kerjasama masyarakat dalam melancarkan operasional perusahaan. Kegiatan tersebut dengan publikasi yang tepat akan sangat membantu membentuk citra perusahaan dan menggalang kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan. Pengembangan masyarakat menjadi bagian penting dari CSR karena kelompok masyarakat rentan baik itu secara struktural, kultural, maupun individual biasanya memiliki akses paling kecil terhadap dampak positif operasi perusahaan, sekaligus menerima dampak negatif paling parah. Jika mereka tidak mendapatkan perhatian ekstra dari perusahaan, kondisi tersebut akan terus-menerus mendera mereka.

Pengembangan masyarakat (*community development*) yang dilakukan oleh PPK Sampoerna bertujuan untuk memandirikan masyarakat melalui kegiatan pelatihan yang diadakan oleh PPK Sampoerna sekaligus memandirikan UMKM yang ada agar dapat berdaya tahan dan daya saing yang tinggi artinya pula bentuk keluaran dari pengembangan masyarakat yang dilakukan melalui berbagai bentuk

pelatihan adalah terciptanya UMKM baru. Dengan kata lain pengembangan masyarakat (*community development*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Artinya dengan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PPK Sampoerna kepada masyarakat ring I diharapkan mampu memunculkan kemandirian industri kecil agar tidak menggantung pada program pemerintah dan selalu meminta bantuan pemerintah.

Seperti diketahui bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada melalui kerja sama untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dan berbagai komponen lainnya untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai bentuk pelaksanaan program CSR PT HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada masyarakat ring I PPK Sampoerna dan proses pembinaan yang dilakukan oleh PPK Sampoerna berikut ini disajikan data yang ditemukan di lapangan.

a. Bentuk Pelaksanaan Program CSR PT. HM Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) pada Masyarakat Ring I PPK Sampoerna

Pelaksanaan program CSR PT. HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal pada masyarakat ring I ini diberikan kepada warga di sekitar lokasi PT HM Sampoerna *plant* Sukorejo, yakni warga yang berada di empat desa, yaitu Desa Suwayuwo, Ngadimulyo, Gunting, dan Bulukandang. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Christamam Herry Wijaya selaku *Site Manager* PPK Sampoerna yang menyatakan:

> "Sasaran atau target pelaksanaan CSR program pengembangan ekonomi lokal pada PPK Sampoerna ini merupakan masyarakat ring I meliputi desa sekitar pabrik Sampoerna, jika berada pada *plant* Sukorejo meliputi Desa Suwayuwo, Ngadimulyo, Gunting, Bulukandang, sedangkan jika berada pada *plant* Surabaya, Malang, dan Karawang tergabung dalam bentuk program KLIP" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 13.00 WIB, di kantor PPK Sampoerna).

Pelatihan yang diberikan oleh PPK Sampoerna bagi masyarakat ring I *plant* Sukorejo digolongkan dalam program pelatihan sosial. Jenis-jenis pelatihan yang diadakan meliputi peternakan, perikanan, hortikultura, pengolahan pangan, *vocational* atau kejuruan perbengkelan sepeda motor, membatik, bordir, kerajinan kayu, dan tata rias. Hal itu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Christamam Herry Wijaya selaku *Site Manager* PPK Sampoerna yang menyatakan:

> "Layanan yang ditawarkan PPK Sampoerna terdiri dari dua layanan utama, yaitu konsultasi bisnis kecil dan pengembangan pasar serta berbagai jenis pelatihan. Pelatihan yang diberikan bagi masyarakat ring I *plant* Sukorejo meliputi peternakan, perikanan, hortikultura, pengolahan pangan, *vocational*

atau kejuruan perbengkelan sepeda motor, membatik, bordir, kerajinan kayu, dan tata rias. Namun peserta atau masyarakat dapat mengusulkan pelatihan lainnya jika dirasakan perlu" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 13.00 WIB, di kantor PPK Sampoerna).

Untuk mengetahui lebih jelasnya beberapa layanan yang ditawarkan oleh PPK Sampoerna akan digambarkan pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11
Lingkup Layanan PPK Sampoerna

1. Konsultasi Bisnis Kecil dan Pengembangan Pasar		
2. Pelatihan	***Personal Skill***	***Technical Skill***
a. Manajemen Bisnis Kecil	✓	-
b. Kewirausahaan	✓	-
c. Kepemimpinan	✓	-
d. Penjualan dan Jaringan Bisnis	✓	-
e. Pelatihan Pra-pensiunan	✓	-
f. Konsep Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming System*)	✓	-
g. Pertamanan 1. Teknik perencanaan pembuatan taman 2. Teknik pemeliharaan dan perawatan taman	✓	✓
h. Budidaya Pertanian 1. Teknik penyiapan dan pengolahan lahan 2. Teknik pembibitan tanaman hias dan perkebunan 3. Budidaya pepaya IPB 4. Budidaya hortikultura di lahan atau kebun 5. Budidaya hortikultura di lahan sempit	✓	✓

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2010

Lanjutan Tabel 11 tentang Lingkup Layanan PPK Sampoerna

2.Pelatihan	***Personal Skill***	***Technical Skill***
i. Budidaya Perikanan 1. Teknik rancang bangun kolam perikanan 2. Budidaya ikan air tawar 3. Teknik pembuatan pelet ikan konvensional 4. Teknik pembuatan pelet ikan berbahan baku limbah	✓	✓
j. Budidaya Peternakan	✓	✓
k. Pengolahan Limbah Sistem Pertanian Terpadu 1. Pembuatan silase hijauan makanan ternak 2. Pembuatan silase limbah dapur 3. Pembuatan aneka kompos 4. Pembuatan aneka bokashi 5. Pembuatan vermicompost 6. Pembuatan UFT	✓	✓
l. Teknik Kejuruan Tepat Guna 1. Perbengkelan (servis motor) 2. Pembuatan papan gypsum 3. Pembuatan *paving block*	✓	✓

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2010

Mencermati tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa lingkup layanan dari PPK Sampoerna yaitu konsultasi bisnis kecil dan pengembangan pasar serta berbagai jenis pelatihan. Pada lingkup layanan yang pertama, yaitu konsultasi bisnis kecil dan pengembangan pasar hanya terdapat *personal skill* sedangkan *technical skill* tidak terdapat pada jenis layanan ini. Pada lingkup layanan yang kedua, yaitu pelatihan ditawarkan berbagai jenis pelatihan antara lain manajemen bisnis kecil, kewirausahaan, kepemimpinan, penjualan dan jaringan bisnis, pelatihan pra-pensiunan, konsep Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming System*), pertamanan, budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya peternakan,

pertamanan, budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya peternakan, pengolahan hasil produksi pertanian, pengolahan limbah sistem pertanian terpadu, dan teknik kejuruan tepat guna.

Pada pelatihan manajemen bisnis kecil, kewirausahaan, kepemimpinan, penjualan dan jaringan bisnis, pelatihan pra-pensiunan, dan konsep Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming System*) hanya terdapat *personal skill* saja, sedangkan sisa pelatihan yang lain yaitu pertamanan, budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya peternakan, pertamanan, budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya peternakan, pengolahan hasil produksi pertanian, pengolahan limbah sistem pertanian terpadu, dan teknik kejuruan tepat guna terdapat dua macam keterampilan yaitu *personal skill* dan *technical skill*.

Dari tabel 11 di atas ada beberapa dokumentasi yang peneliti temukan dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PPK Sampoerna, yaitu dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini:

Gambar 7
Beberapa Pelatihan yang Diselenggarakan oleh PPK Sampoerna

Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak

Pelatihan *Soft skill*

Pelatihan Tata Rias

Pelatihan Tata Rias

Pelatihan Peternakan

Pelatihan Teknik Kejuruan Tepat Guna Perbengkelan (servis motor)

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2011

Selain bentuk pelaksanaan yang berupa lingkup layanan dari PPK Sampoerna di atas, PPK Sampoerna juga memiliki program kegiatan pengembangan kewirausahaan. Program kegiatan pengembangan kewirausahaan terdiri dari

beberapa aspek, yaitu aspek data, kemampuan teknik, pelatihan teknik, advokasi, konsultasi, finansial, alam dan lingkungan, serta aspek manusia. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Christamam Herry Wijaya selaku *Site Manager* PPK Sampoerna yang menyatakan:

> "Kita di sini juga mempunyai beberapa program kegiatan pengembangan kewirausahaan, seperti program kegiatan pengembangan kewirausahaan yang meliputi data, kemampuan teknik, pelatihan teknik, advokasi, konsultasi, finansial, alam dan lingkungan, serta aspek manusia. Pada masing-masing aspek terdapat beberapa aktifitas yang dilakukan dan hasil atau sasaran yang diharapkan" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 13.00 WIB, di kantor PPK Sampoerna).

Untuk lebih jelasnya, di lapangan didapatkan data mengenai program kegiatan pengembangan kewirausahaan PPK Sampoerna yang akan dijelaskan pada tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12
Program Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan

No.	Aspek	Aktifitas	Hasil atau Sasaran
1	Data	Membuat atau mengelola data UMKM setempat menjadi "SME (*Small-Medium Entreprise*) Data Center".	*SME Data base* dan *Portofolio* UMKM.
2	Kemampuan Teknik	Diarahkan pada pembentukan individu untuk memiliki jiwa *entrepreneur*.	Kemampuan dalam menyusun "*Bussines-Plan*".
3	Pelatihan Teknik	Melatih keterampilan teknik sesuai dengan bidang yang diminati.	Terampil dalam penguasaan teknik.
4	Advokasi	Melakukan pendampingan langsung di lokasi.	*Performance* bisnis yang termonitoring dan terjaga.

Sumber: Data Diolah dari Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan Site Manager PPK Sampoerna, 2011

Lanjutan Tabel 12 tentang Program Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan

No.	Aspek	Aktifitas	Hasil atau Sasaran
5	Konsultasi	Menyiapkan konsultan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.	Terciptanya bisnis yang prima.
6	Finansial	Menyiapkan infrastruktur *micro-finance* dan *banking*	Terciptanya struktur finansial yang baik dan terukur
7	Alam dan Lingkungan	Pengolahan limbah hayati yang baik	Terciptanya "*zero-waste*"
8	Manusia	Pembelajaran "*Live-Skills*"	Komunitas masyarakat yang mandiri

Sumber: Data Diolah dari Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan Site Manager PPK Sampoerna, 2011

Mencermati tabel 12 di atas dapat dikatakan bahwa semua aspek yang dimiliki oleh PPK Sampoerna, baik aspek data, kemampuan teknik, pelatihan teknik, advokasi, konsultasi, finansial, alam dan lingkungan, maupun manusia merupakan aspek penting yang dapat menunjang dalam pelaksanaan program kegiatan pengembangan kewirausahaan di PPK Sampoerna. Semua aktifitas yang dijalankan oleh masing-masing aspek memiliki hasil atau sasaran yang tepat sesuai dengan program kegiatan pengembangan kewirausahaan di PPK Sampoerna.

Proses pembentukan anggota dari masyarakat ring I diserahkan kepada masing-masing kelompok yang akan diikutkan dalam kegiatan inkubasi usaha PPK Sampoerna. Respon dari masyarakat sangat beragam, namun secara umum setiap kegiatan PPK Sampoerna yang ditawarkan kepada masyarakat selalu diikuti

oleh banyak peserta pelatihan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Kaiman, selaku mayarakat ring I Desa Bulukandang, yaitu:

> "Dulu saya menjalani pekerjaan *sing gak nggenah* (tidak benar). Karena kasihan terhadap orang tua, akhirnya saya berhenti dari pekerjaan yang *nggak* benar. Tapi, saya malah bingung mau kerja apa. Peluang kerja sangat sempit bagi saya sebab saya tidak punya ijazah, mengingat tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Dalam keadaan seperti ini, ada tawaran untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan di bidang budidaya jamur dari PPK Sampoerna, maka, tak ada pilihan lain bagi saya, kecuali mengikutinya" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 10.00 WIB, di rumah Bapak Kaiman).

Dari hasil di lapangan diperoleh data tentang jumlah peserta pelatihan berdasarkan jenis pelatihan yang digambarkan dalam gambar 8 di bawah ini:

Gambar 8
Grafik Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pelatihan
Bulan Januari-Desember Tahun 2010

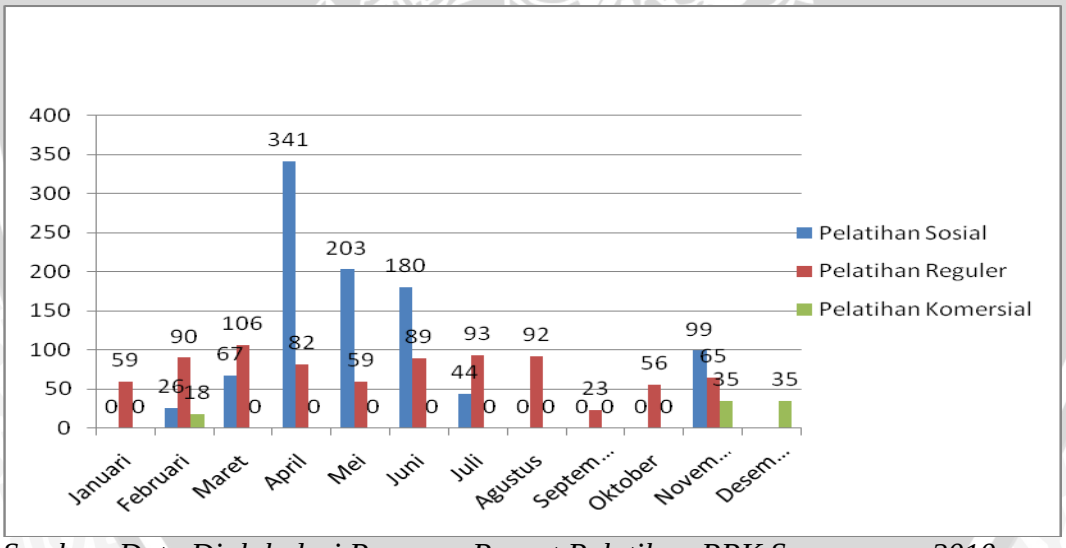

Sumber: Data Diolah dari Progress Report Pelatihan PPK Sampoerna, 2010

Mencermati gambar 8 di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta pelatihan PPK Sampoerna pada bulan April merupakan jumlah terbanyak, yakni sebanyak 341 peserta dengan jenis pelatihan sosial. Jumlah peserta pelatihan sosial terbanyak selanjutnya yaitu pada bulan Mei dengan 203 peserta, bulan Juni 180 peserta, dan bulan November 99 peserta. Jenis pelatihan reguler dengan jumlah

peserta pelatihan tiga terbanyak terdapat pada bulan Maret dengan 106 peserta pelatihan, bulan Juli 93 peserta, dan bulan Agustus 92 peserta. Sedangkan jenis pelatihan komersial hanya terdapat pada bulan November dan Desember dengan jumlah peserta pelatihan yang sama, yakni 35 orang serta bulan Februari dengan 18 peserta pelatihan.

Jenis pelatihan sosial dan komersil yang diadakan oleh PPK Sampoerna ini merupakan bentuk pelatihan yang diikuti oleh berbagai macam peserta, yaitu terdiri dari komunitas lokal, pegawai pra pensiun, dan pelatihan umum. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Christamam Herry Wijaya selaku *Site Manager* PPK Sampoerna yang menyatakan:

> "Kami selalu mengadakan ketiga jenis pelatihan yang telah ditawarkan oleh PPK Sampoerna, yaitu pelatihan sosial, pelatihan regular, dan pelatihan komersil. Pelatihan-pelatihan tersebut biasanya diikuti oleh komunitas lokal (masyarakat ring I), pegawai pra pensiun, dan pelatihan umum (masyarakat di luar ring I). Jumlah peserta pelatihan yang diikuti oleh komunitas lokal (masyarakat ring I) hampir 50% selalu lebih banyak daripada jumlah peserta dengan jenis pelatihan reguler maupun komersil. Hal ini dikarenakan PPK Sampoerna lebih memprioritaskan masyarakat ring I yang mendapatkan pelatihan karena ring I merupakan wilayah yang terkena dampak dari beroperasinya pabrik daripada wilayah lain yang jauh dari lokasi pabrik" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 13.00 WIB, di kantor PPK Sampoerna).

Untuk mengetahui lebih jelasnya jenis pelatihan yang diadakan oleh PPK akan digambarkan dalam tabel 13 dan gambar 9 di bawah ini:

Tabel 13
Jenis Pelatihan PPK Sampoerna
Bulan Januari – Desember Tahun 2010

No.	Bentuk Pelatihan	Jenis	Jumlah Peserta
1	Komunitas lokal	Sosial	990
2	Pegawai pra pensiun	Komersil	167
3	Pelatihan umum	Komersil	820
Jumlah			**1.977**

Sumber: Data Diolah dari Progress Report Pelatihan PPK Sampoerna, 2010

Gambar 9
Diagram Persentase Peserta Pelatihan
Bulan Januari - Desember Tahun 2010

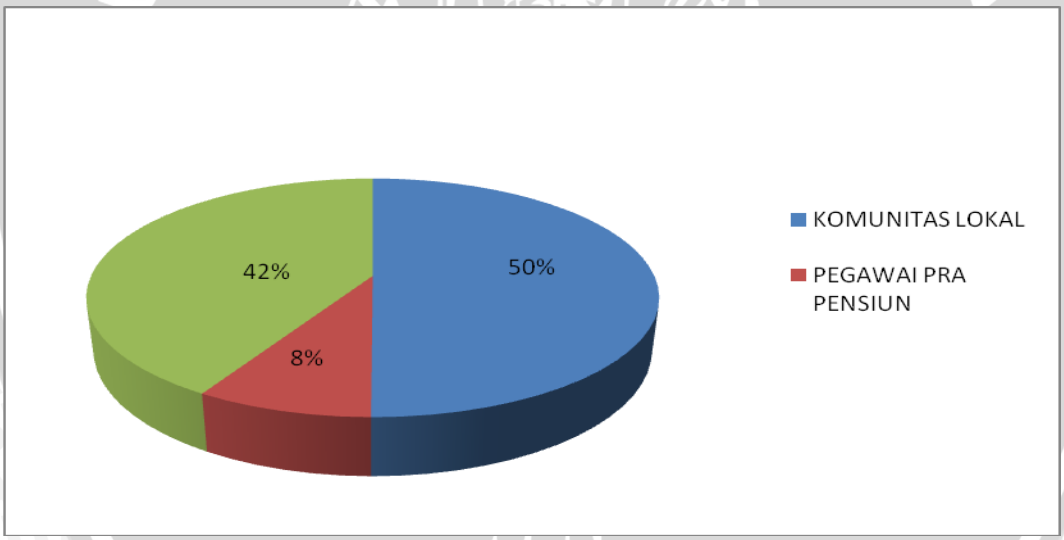

Sumber: Data Diolah dari Progress Report Pelatihan PPK Sampoerna, 2010

Mencermati tabel 13 dan gambar 9 di atas dapat dikatakan bahwa pada Bulan Januari hingga Desember tahun 2010, jenis pelatihan sosial yang diikuti oleh komunitas lokal merupakan jenis pelatihan yang paling banyak diikuti oleh peserta dengan jumlah 990 peserta dengan persentase 50%. Bentuk pelatihan yang diikuti oleh pegawai pra pensiun pada tahun 2010 berjumlah 167 peserta atau 8%, sedangkan bentuk pelatihan umum pada tahun 2010 sebanyak 820 peserta dengan

persentase 42%. Kedua bentuk pelatihan ini tergolong dalam jenis pelatihan komersil. Jadi jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan di PPK Sampoerna pada tahun 2010 berjumlah 1.977 peserta, baik berupa jenis pelatihan sosial maupun pelatihan komersil.

Jenis pelatihan yang ditawarkan oleh PPK Sampoerna selalu diikuti oleh banyak peserta pelatihan. Hal ini tidak berbeda jauh dengan kunjungan yang dilakukan oleh beberapa jenis organisasi dengan tujuan studi banding, studi lapang, atau hanya sekedar ingin mengetahui PPK Sampoerna. Untuk mengetahui lebih jelasnya daftar kunjungan PPK Sampoerna akan digambarkan pada tabel 14 dan gambar 10 di bawah ini:

Tabel 14
Daftar Kunjungan PPK Sampoerna
Bulan Januari – Desember Tahun 2010

No.	Organisasi	Tujuan	Jumlah (Org)
1	Instansi Pemerintah	• Studi banding • Kerja sama	761
2	*Non Government Organizatian* (NGO)	• Studi banding • Kerja sama • Pelatihan	715
3	Institusi Pendidikan	Studi Lapang	1.578
4	Wiraswasta	Studi Banding	95
5	Perusahaan	• Studi Banding • Pelatihan pra pensiun	3.154
6	Komunitas Lokal	• *Capacity Building* • Sosialisasi	3.672
Jumlah			**9.975**

Sumber: Data Diolah dari Progress Report Kunjungan PPK Sampoerna, 2010

Gambar 10
Diagram Presentase Jumlah Kunjungan
Bulan Januari – Desember Tahun 2010

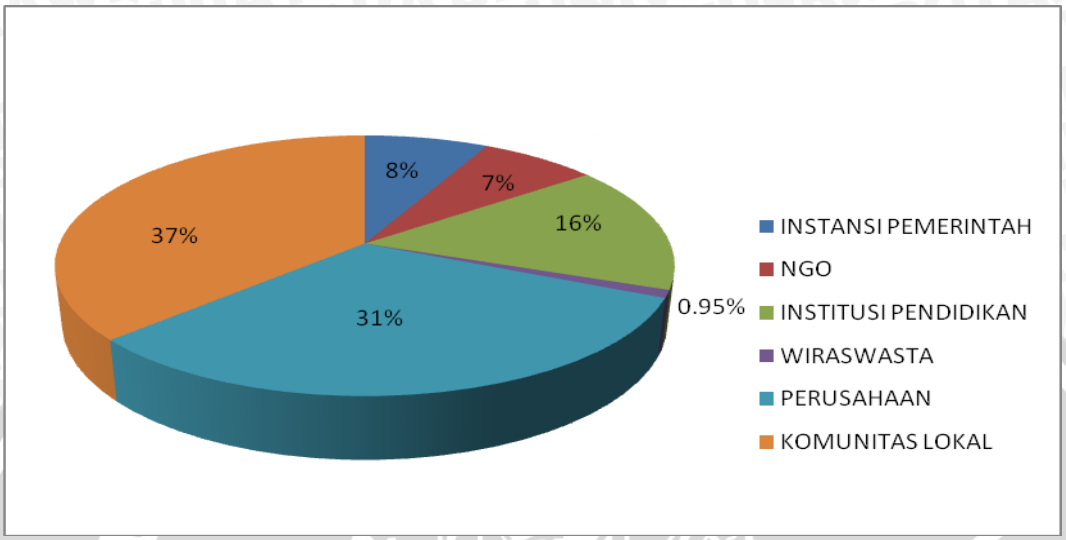

Sumber: Data Diolah dari Progress Report Kunjungan PPK Sampoerna, 2010

Mencermati tabel 14 dan gambar 10 di atas dapat dilihat bahwa kunjungan dari komunitas lokal merupakan organisasi terbanyak yang mengunjungi PPK Sampoerna sebanyak 3.672 orang atau sekitar 37% dengan tujuan *capacity building* dan sosialisasi. Daftar kunjungan PPK Sampoerna terbanyak kedua diisi oleh perusahaan yang ingin mengadakan studi banding dan pelatihan pra pensiun dengan jumlah 3.154 orang atau sebanyak 31%. Selanjutnya berasal dari institusi pendidikan sebanyak 1.578 orang atau 16% dengan tujuan studi lapang. Dari data di lapangan di atas dapat disimpulkan bahwa PPK Sampoerna tidak hanya mengadakan pelatihan untuk masyarakat saja tetapi PPK Sampoerna juga menerima kunjungan dari berbagai jenis organisasi atau kalangan.

Bapak Kaiman merupakan salah satu warga binaan dari PPK Sampoerna yang tergolong sukses. Desa tempat tinggal Bapak Kaiman memang berada di sekitar pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dioperasikan PT HM Sampoerna Tbk di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Industri rokok tersebut memiliki program

pengembangan masyarakat desa berupa pelatihan usaha sesuai potensi desa setempat, yang dilakukan melalui Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. Hal ini dapat dilihat dari modal awal Bapak Kaiman menjadi petani jamur dengan bermodalkan 1.000 unit baglog (media tanam), hingga sekarang mempunyai kumbung seluas 50 m^2 (lebar 5 meter x panjang 10 meter) dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan 5.000 unit baglog. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Kaiman, selaku mayarakat ring I Desa Bulukandang, yaitu:

> "Dengan bermodalkan 1.000 unit baglog, saya memulai usaha budidaya jamur tiram dengan penuh keseriusan. Tempat budidaya yakni bangunan berdinding gedeg atau bambu telah dimiliki, maka wirausaha jamur dapat dilaksanakan. Berdasarkan ilmu yang saya peroleh dari pelatihan, media tanam terdiri dari serbuk kayu gergajian, dedek atau katul, tepung jagung dan kalsium yang dibungkus plastik dengan bobot 1,1 kg per unit baglog. Saat ini saya mempunyai kumbung seluas 50 m^2 (lebar 5 meter x panjang 10 meter) dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan 5.000 unit baglog" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 10.00 WIB, di rumah Bapak Kaiman).

Selain Bapak Kaiman, beberapa masyarakat ring I PPK Sampoerna juga mendapatkan manfaat setelah mengikuti pelatihan yang telah diadakan oleh PPK Sampoerna. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang didapatkan di lapangan didapatkan mengenai perbandingan jumlah pendapatan masyarakat ring I sebelum dan setelah mengikuti pelatihan yang akan dijelaskan dalam tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15
Perbandingan Jumlah Pendapatan Masyarakat Ring I
Sebelum dan Setelah Mengikuti Pelatihan

No	Nama	Desa	Pekerjaan	Jenis Pelatihan	Pendapatan per Bulan (Rp)	
					Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
1	Kasnanto	Suwayuwo	Pegawai swasta	Pertanian	2.500.000	6.500.000
2	Agus Setiono	Suwayuwo	Pengangguran	Peternakan	0	800.000
3	Sunarti	Suwayuwo	Pengangguran	Pengolahan pangan	0	1.000.000
4	Ilham Rocman	Bulukandang	Pengangguran	Perbengkelan	0	1.000.000
5	Ali Murtadlo	Bulukandang	Pengangguran	Pertanian	0	4.000.000
6	Hadi Purnomo	Gunting	Pegawai swasta	Peternakan	1.800.000	2.600.000
7	Arifin Saptianto	Gunting	Pengangguran	Perbengkelan	0	1.000.000
8	Hidayati	Ngadimulyo	Pengangguran	Pengolahan pangan	0	1.200.000
9	Muriyati	Ngadimulyo	Pengangguran	Hortikultura	0	500.000
10	Ummi Fadlilah	Ngadimulyo	Pegawai swasta	Hortikultura	1.300.000	1.800.000

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara dengan Masyarakat Ring I

Mencermati tabel 15 di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat binaan ring I sebelum dan setelah mengikuti pelatihan pada PPK Sampoerna mengalami peningkatan yang cukup besar. Pelatihan yang ditawarkan oleh PPK Sampoerna sebagian besar ditujukan bagi masyarakat ring I yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau bahkan tidak bekerja, tetapi apabila ada masyarakat ring I yang sudah memiliki pekerjaan tetap serta mempunyai kemampuan dan kemauan maka masyarakat juga bisa mengikuti pelatihan di PPK Sampoerna sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut bertujuan untuk

mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasioal pabrik.

Manfaat dari adanya pelatihan tersebut sangat dirasakan oleh Ibu Sunarti yang mengikuti pelatihan pengolahan pangan. Sebelum mengikuti pelatihan Ibu Sunarti hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi setelah mengikuti pelatihan Ibu Sunarti bisa memperoleh pendapatan sendiri. Ketika usaha semakin berkembang, Ibu Sunarti tidak menemui kesulitan dalam memproduksi bahan pangan tetapi berbeda dengan yang dialami oleh Bapak Kaiman.

Dalam perintisan usahanya, Bapak Kaiman mengalami masalah pemasaran pada saat panen jamur tiram perdananya yang mengalami kesulitan mencari pasar. Bapak Kaiman melakukan penjualan keliling guna menawarkan jamur tiram ke restoran dan swalayan, sementara di pasar tradisional umumnya belum terbiasa digunakan menjual komoditas tersebut sebab masyarakat luas belum terbiasa mengkonsumsi jamur tiram. Selain mencari terobosan pasar sendiri, Bapak Kaiman juga dibantu oleh PPK Sampoerna untuk mempromosikan jamur yang dipajang di etalase PPK Sampoerna sekaligus diikutkan pameran bersama pengusaha kecil lainnya yang dibina Sampoerna. Berkat ketekunan dalam memperluas pasar, Bapak Kaiman berhasil mendapatkan order dari para pengepul maupun restoran di berbagai kota (tidak terbatas di wilayah Kabupaten Pasuruan). Seiring semakin besarnya daya serap pasar, Bapak Kaiman pun dapat meningkatkan volume usahanya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Kaiman, selaku mayarakat ring I Desa Bulukandang, yaitu:

> "Jamur tiram tergolong tanaman yang cepat tumbuh dan setiap unit baglog dapat menghasilkan panenan hingga 1 kg selama 5 bulan, lalu diganti media tanam baru. Tetapi saat panen perdana saya kesulitan mencari pasar," Selain mencari terobosan pasar sendiri, saya juga dibantu PPK Sampoerna untuk mempromosikan jamur yang dipajang di etalase PPK Sampoerna sekaligus diikutkan pameran bersama pengusaha kecil lainnya yang dibina Sampoerna" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 10.00 WIB, di rumah Bapak Kaiman).

Sejalan dengan berkembangnya usaha budidaya jamur tiram dan produksi baglog, Bapak Kaiman sekarang ini benar-benar mampu menikmati hasilnya. Bapak Kaiman optimis usaha yang digelutinya sejak empat tahun terakhir akan mampu meningkat lagi di masa-masa mendatang. Hal itu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wido, selaku *Community Development Executive* PT HM Sampoerna yang menyatakan:

> "Kaiman merupakan bagian dari puluhan pengusaha kecil binaan perusahaan tersebut yang masih perlu pendampingan hingga benar-benar mampu mandiri. Kami sejak tahun lalu juga mengoperasikan UKM (Usaha Kecil Menengah) Center di Central Business District Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan, yang memiliki fasilitas untuk men-display produk yang dihasilkan mitra binaan. UKM Center juga dijadikan ajang per-temuan sesama pengusaha kecil untuk saling tukar informasi dan berlatih tentang pemasaran" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 16.00 WIB, di kantor PPK Sampoerna).

Selain mengadakan berbagai jenis pelatihan, dalam rangka memberi dukungan dan memacu keberanian wirausaha muda untuk mengembangkan usahanya, PPK Sampoerna di bawah payung "Sampoerna untuk Indonesia" kembali mengajak UMKM dari Pasuruan, Surabaya, Malang, dan daerah lain di Jawa Timur, dan 90% -nya adalah UMKM binaan Sampoerna menggelar PPK Sampoerna Expo 2011 Wirausaha Tanpa Batas yang mengusung tema "Semangat Muda Wirausaha untuk Mengurangi Pengangguran". Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, expo tahun 2011 ini menampilkan peluncuran kegiatan penelitian

dan pengembangan yang dilakukan di Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. Di antaranya seperti produk mi pelangi dan melon kotak yang dikembangkan oleh tim ahli dari Primakelola Agribisnis Agroindustri IPB. Selain itu juga ada serangkaian *workshop*, seminar serta klinik konsultasi untuk meningkatkan *softskill* dan *hardskill* para pelaku UMKM. PPK Sampoerna Expo 2011 ini dapat menjadi ajang sosialisasi produk-produk unggulan, pusat informasi, serta pertukaran bisnis. Selain itu melalui *workshop* dan seminar yang diadakan, penggiat UMKM dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dapat menjadi seorang wirausaha yang sukses.

Gambar 11
Pemasaran Produk Masyarakat Ring I
Melalui PPK Sampoerna Expo 2010

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2010

Gambar 12
Pemasaran Produk Masyarakat Ring I
Melalui Kampoeng UKM Pasuruan 2010

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2010

Dari gambar 11 dan 12 di atas dapat dikatakan bahwa dalam setiap pameran yang direkomensikan dan diselenggarakan oleh PPK Sampoerna baik lokal maupun regional, masyarakat ring I PPK Sampoerna selalu menyertakan produk-produk mereka ke dalam pameran tersebut. Hal ini bertujuan agar produk-produk masyarakat ring I PPK Sampoerna juga diketahui atau dikenal oleh banyak publik, sehingga dapat memudahkan masyarakat ring I PPK Sampoerna dalam mendapatkan keuntungan.

Selain pemasaran dilakukan melalui pameran-pameran, juga dilakukan dengan mengikutsertakan hasil produksi dari masyarakat ring I PPK Sampoerna, yaitu dengan menyertakan produk masyarakat ring I PPK Sampoerna di pusat oleh-oleh Kabupaten Pasuruan dan memasarkannya melalui ruang *display product* PPK Sampoerna yang telah dimilikinya. Adapun dokumentasi ruang *display product* PPK Sampoerna dapat dilihat pada gambar 13 di bawah ini:

Gambar 13
Ruang *Display Product*

Sumber: Dokumen PPK Sampoerna, 2010

b. Proses Pelatihan dan Pembinaan yang Dilakukan oleh PPK Sampoerna Melalui Program *Community Development* dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Lokal pada Masyarakat Ring I

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan diawali dengan pemetaan masyarakat, survei kebutuhan masyarakat, serta survei potensi desa yang dapat dikembangkan. Kemudian PPK Sampoerna melakukan perencanaan pengembangan sesuai data yang ada. Hasil perencanaan ini kemudian diajukan kepada Comdev PT HM Sampoerna untuk di-*follow up* lebih lanjut. Dalam perencanaan program PPK Sampoerna secara global mengikutkan unsur-unsur akademik, perusahaan, pemerintahan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Sebelum membuat program pihak PPK Sampoerna pun melakukan pendekatan pada masyarakat melalui pemetaan masyarakat (*social maping*). Ini dilakukan karena bisa memberikan gambaran utuh mengenai kebutuhan dan potensi lokal masyarakat yang kemudian akan diikuti dengan pelaksanaan program yang juga memerlukan perhatian dan kontribusi serupa dari masyarakat penerima manfaat. Jadi pada *social maping* ini dilakukan pemetaan terhadap suatu kondisi sosial dan sumber daya yang ada di masyarakat tempat beroperasi, baru kemudian mengembangkan beberapa program yang sesuai dengan masyarakat setempat yang menjadi target operasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu kemandirian dari masyarakat tersebut.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Christamam Herry Wijaya selaku *Site Manager* PPK Sampoerna yang menyatakan:

> "Dalam kegiatan rembug kesiapan masyarakat program PPK Sampoerna secara global mengikutkan unsu-unsur akademik (biasanya dari perguruan tinggi), perusahaan (Sampoerna), pemerintahan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Setelah itu kita melakukan pemetaan masyarakat, biasanya kita sebut dengan *social maping*, yakni melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan potensi yang ada. Yang melakukan adalah PPK Sampoerna bersama Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (PPUMK). Selain pemberdayaan lokal, budaya dan agama juga harus diperhatikan. Intinya kami ingin menjadi bagian dari masyarakat itu" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 13.00 WIB, di kantor PPK Sampoerna).

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Agus Setiono, selaku mayarakat ring I Desa Suwayuwo, yaitu:

> "Pada awalnya saya tidak yakin ketika diminta untuk mengikuti tahap perencanaan atau pemetaan masyarakat (*social maping*) dengan tujuan untuk mendata masyarakat ring I khususnya masyarakat Desa Suwayuwo ini, karena saya merasa bukan merupakan ketua kelompok dari masyarakat ring I Desa Suwayuwo. Tetapi atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Kasnanto (ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo) maka saya bersedia untuk menggantikan beliau mengukuti tahap perencanaan ini. Beliau juga (Bapak Kasnanto) mengatakan bahwa tidak punya cukup banyak waktu dalam tahap perencanaan ini dikarenakan selain menguikuti kegiatan pelatihan pada PPK Sampoerna, beliau juga bekerja di tempat lain. Jadi, istilahnya saua yang diutus untuk mewakili beliau dalam *social maping* ini" (wawancara pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 14.00 WIB, di rumah Bapak Agus).

Survei dan identifikasi ini dilaksanakan oleh PPK Sampoerna bersama Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (PPUMK) yang dipandu oleh kepala-kepala desa ring I dan tokoh masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi dan potensi desa yang akan dikembangkan dan mendapatkan data tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat desa. Survei dan identifikasi yang dilakukan dengan mendatangi narasumber, tokoh masyarakat, dan langsung berbincang-bincang dengan sebagian masyarakat untuk memperoleh informasi yang selanjutnya dipakai sebagai bahan analisis temuan dalam menyusun laporan persiapan sebagai kelanjutan dari tahapan ini. Pada tahap ini fasilitator dari PPK

Sampoerna memanfaatkan kesempatannya untuk sekaligus mengadakan sosialisasi program walaupun sifatnya terbatas.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah melewati tahap perencanaan yang dilakukan dengan pemetaan masyarakat, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan yang meliputi pelatihan dan pembinaan menyangkut kelompok-kelompok yang telah dibentuk sendiri oleh masyarakat desa ring I yang berada di bawah bimbingan para fasilitator desa yang ditugaskan di wilayah ini.

Pada tahap ini peranan fasilitator desa sangat penting karena mereka diharapkan mampu memberikan pembekalan menyangkut pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan dalam mengelola program. Hal ini terungkap pada saat wawancara dengan Bapak Kasnanto, selaku ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo:

> "Sebenarnya pada awalnya saya tidak yakin ketika diminta untuk menjadi ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo ini, karena saya merasa kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Apalagi permasalahan yang diatasi cukup kompleks, tidak hanya menyangkut masalah pelatihan saja tetapi juga mengenai manajerial dan masalah keuangan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa saya mampu dikarenakan dukungan dari berbagai pihak, terutama para masyarakat ring I Desa suwayuwo ini yang memang menjadi obyek dari pelatihan dan pembinaan ini" (wawancara pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 09.00 WIB, di rumah Bapak Kasnanto).

Dalam pelaksanaan pelatihan program PPK Sampoerna, masyarakat ring I di empat desa tersebut banyak memperoleh pengetahuan dan kemampuan teknis, termasuk dalam pelatihan peternakan, perikanan, hortikultura, pengolahan pangan, *vocational* atau kejuruan perbengkelan sepeda motor, membatik, bordir, kerajinan

kayu, dan tata rias. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Agus Setiono selaku mayarakat ring I Desa Suwayuwo, yaitu:

> "Tujuan dari pelatihan-pelatihan yang diadakan adalah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan teknis. Dulu sebelum saya ikut pelatihan yang diadakan oleh PPK Sampoerna, saya tidak tahu bagaimana cara beternak kelinci dengan baik dan benar. Terbukti setelah saya mengikutinya, bisa dilihat sendiri jumlah kelinci saya saat ini semakin banyak. Dulu hanya 12 ekor sekarang sudah lebih dari 45 ekor. Pada pelatihan, saya diajarkan bagaimana merawat kelinci, memilih pakan yang sesuai dengan kebutuhannya dan memanfaatkan kotoran kelinci sebagai pupuk" (wawancara pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 14.00 WIB, di rumah bapak Agus).

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Sunarti, selaku mayarakat ring I Desa Suwayuwo, yaitu:

> "Dulu saya hanya menganggur di rumah, tetapi setelah saya diajak untuk mengikuti pelatihan di PPK Samporna saya jadi ada kegiatan, malah bisa jadi menambah penghasilan. Saya mengikuti pelatihan bordir dari PPK Sampoerna, setelah saya mampu membordir dengan baik, saya mencoba membuat mukena dengan hiasan bordir di sekelilingnya kemudian saya tawarkan kepada tetangga-tetangga. Hingga sekarang, Alhamdulillah banyak pesanan mukena bordir buatan saya. Lumayan, bisa dibuat uang jajan anak-anak" (wawancara pada tanggal 21 Maret 2011, pukul 08.00 WIB, di rumah Ibu Sunarti).

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Agar pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat, terutama pada pengembangan ekonomi masyarakat lokal, sesuai dengan tujuan, sasaran dan mekanisme yang telah ditetapkan, maka diperlukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat kinerja proyek pada periode berikutnya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh pelaku proyek.

Pada tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan program dan pada akhir program. Monitoring dan evaluasi pada pertengahan program

bertujuan untuk melihat jalannya program dan membandingkannya dengan tujuan yang sudah dibuat sehingga bila ada yang tidak sesuai dapat ditangani lebih awal. Monitoring dan evaluasi pada akhir program bertujuan untuk melihat jalannya program secara keseluruhan, temuan-temuan lapangan, penilaian tingkat keberhasilan program, dan upaya peningkatan program ke depannya.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Christamam Herry Wijaya selaku *Site Manager* PPK Sampoerna:

> "Monitoring dan evaluasi, biasanya kita sebut dengan monev, dilaksanakan di tengah dan di akhir program. Monev di pertengahan program bertujuan untuk melihat jalannya program dan membandingkannya dengan tujuan yang sudah dibuat sehingga bila ada yang tidak sesuai dapat ditangani lebih awal. Monev di akhir program bertujuan untuk melihat jalannya program secara keseluruhan dan upaya peningkatan program kita ke depannya" (wawancara pada tanggal 19 Maret 2011, pukul 13.00 WIB, di kantor PPK Sampoerna).

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Kasnanto, selaku ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo:

> "Pada tahap monev ini ketua kelompok dari masing-masing desa ring I (Desa Suwayuwo, Ngadimulyo, Gunting, dan Bulukandang) selalu diikutkan untuk mengawasi dan mengontrol para peserta pelatihan dari masing-masing desa yang bersangkutan. Hal ini juga dilakukan oleh ketua kelompok dari masing-masing desa ring I untuk mengetahui sejauh mana keseriusan dari anggota kelompok masyarakat desa ring I dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PPK Sampoerna. Jadi, saya sebagai ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo dapat memberikan penilaian langsung kepada anggota kelompok Desa Suwayuwo" (wawancara pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 09.00 WIB, di rumah Bapak Kasnanto).

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kinerja PPK Sampoerna dalam Usahanya Melakukan Pelatihan dan Pembinaan pada Masyarakat Ring I

Upaya untuk mengoptimalkan suatu kinerja dalam melakukan pelaihan dan pembinaan pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang keduanya tidak bisa dipisahkan dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Begitu juga dengan PPK Sampoerna, upaya untuk mengoptimalkan kinerja dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok binaan ring I juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I disajikan di bawah ini satu per satu.

a. Faktor Pendukung

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I, yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan Pemberian Dana dari PPK Sampoerna kepada Masyarakat Ring I

Salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I adalah ketepatan pemberian dana dari PPK Sampoerna pada masyarakat ring I. Artinya dana yang diberikan oleh PPK Sampoerna tidak keluar secara berbelit-belit dan telah sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, baik

bantuan dana modal atau untuk dana pengembangan usaha mereka. Pemberian dana memang langsung diberikan kepada mereka, biasanya lewat ketua kelompok binaan masing-masing desa ring I, biasanya dalam bentuk uang tunai, kemudian masyarakat binaan membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh mereka sesuai dengan jenis pelatihan yang telah mereka ikuti, misalnya hewan-hewan ternak, benih padi, atau alat-alat mekanis untuk keperluan pertanian, peternakan, atau teknologi kejuruan tepat guna. Besarnya modal yang diberikan oleh PPK Sampoerna tergantung dari jenis pelatihan yang telah diikuti oleh masyarakat binaan. Misalnya modal yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang budidaya peternakan kambing jumlahnya lebih besar daripada modal yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan budidaya peternakan kelinci. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Agus Setiono selaku masyarakat ring I Desa Suwayuwo:

> ”Saya mengikuti pelatihan budidaya peternakan, khususnya dalam ternak kelinci. Dulu kelompok saya diberi modal Rp 10.000.000,00 dari PPK Sampoerna. Memang sedikit lebih kecil daripada modal yang diberikan kepada kelompok yang ikut dalam ternak kambing, yaitu Rp 20.000.000,00 tiap kelompok. Dari modal itu tiap-tiap orang dari kelompok saya mendapatkan kelinci sebanyak 12 ekor” (wawancara pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 14.00 WIB, di rumah Bapak Agus).

2. Keterampilan Awal dalam Berwirausaha yang Telah Dimiliki oleh Masyarakat Ring I

Hal lain yang juga menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I adalah keterampilan awal dalam berwirausaha yang telah dimiliki oleh masyarakat ring I. Hal ini sudah sangat membantu kaitannya dalam

peningkatan hasil produksi baik peternakan, pertanian, ataupun perkebunan. Secara otodidak, msyarakat desa ring I sudah memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan potensi yang ada demi kelancaran usaha agro mereka. Hal ini didapat secara turun temurun dan jauh sebelum masyarakat mengikuti pelatihan di PPK Sampoerna. Sebagai contoh, masyarakat telah mengetahui bagaimana cara mengatasi berbagai hama yang biasa ada pada tanaman pertanian mereka, para petani berhasil dengan cara mencampurkan beberapa obat-obatan yang ada. Selain itu para peternak sudah bisa mengetahui tentang penyakit-penyakit yang biasa ada pada hewan ternak dan kemungkinan mengatasinya, hal ini didapat mereka tanpa ada penyuluh peternakan yang datang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Benu, masyarakat ring I Desa Suwayuwo:

> "Saya sudah sering mengatasi masalah-masalah ternak ini sendiri, seperti ternak itu tiba-tiba sakit atau bahkan saya dengan teman-teman sudah bisa melaksanakan proses inseminasi sendiri, jadi tidak perlu repot-repot memanggil pak mantri. Biasanya kita manggil pak mantri kalau akan kawin suntik saja, soalnya memang kita kan tidak mempunyai obat dan peralatannya itu" (wawancara wawancara pada tanggal 21 Maret 2011, pukul 09.00 WIB, di rumah Bapak Benu).

Hal ini sesuai juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Punoto, masyarakat ring I Desa Suwayuwo:

> "Proses pertanian mulai dari tanam sampai panen kita laksanakan sendiri, paling penyuluh pertanian yang sering datang ke sini hanya membenarkan jika ada kekeliruan, misalnya dalam hal kesesuaian pupuk yang diberikan dengan tanaman yang sedang ditanam, hal tersebut dimaksudkan agar tanaman bisa tumbuh lebih subur" (wawancara pada tanggal 21 Maret 2011, pukul 09.00 WIB, di rumah Bapak Punoto).

b. Faktor Penghambat

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak Tersedianya Fasilitas Transportasi

Salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I adalah tidak tersedianya fasilitas transportasi. Dalam hal ini, PPK Sampoerna tidak memberikan fasilitas transportasi dan sarana penunjang distribusi atau *feeder* (antar jemput) untuk peserta pelatihan dan kepada masyarakat ring I seperti halnya bis Sampoerna. Di sekitar PPK Sampoerna juga tidak terdapat angkutan umum seperti halnya angkutan kota (angkot) maupun angkutan desa (angdes), yang ada hanyalah *ojek*. Jadi, peserta pelatihan, terutama masyarakat binaan ring I datang menuju ke tempat PPK Sampoerna dengan sendiri meskipun posisi tempat PPK Sampoerna berada letaknya cukup jauh dari jalan raya. Hal inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat binaan ring I enggan mengikuti pelatihan, terutama masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Yuli selaku masyarakat binaan ring I Desa Suwayuwo:

> "Sebenarnya, saya sangat tertarik mengikuti pelatihan yang diberikan oleh PPK Sampoerna, di sana saya mengikuti pelatihan cara membuat kue basah dan kue kering. Tetapi saya mengikuti pelatihan cuma 3 hari karena saya malas datang ke sana. Tempatnya jauh banget, *ndeso*. Memang dari rumah saya cuma naek angkot Rp 1.000,00, tapi untuk masuknya ke PPK Sampoerna saya harus naik ojek Rp 10.000,00. Apalagi saya *ndak* punya kendaraan sendiri, punya sepeda motor cuma satu, itu juga dipakai suami saya

bekerja" (wawancara pada tanggal 21 Maret 2011, pukul 08.00 WIB, di rumah Ibu Yuli).

2. Pengelolaan Modal

Hal lain yang juga menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat ring I adalah masalah pengelolaan modal. Dari segi permodalan bukan menjadi hambatan utama untuk mengembangkan usaha, namun dalam pengelolaan manajemen usaha yang terkadang kurang bagus, akibat adanya beberapa SDM masyarakat yang rendah. Sekarang ini banyak penawaran yang diberikan oleh PPK Sampoerna bekerja sama dengan Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (PPUMK) dan UKM Centre untuk peminjaman modal usaha, sehingga tidak lagi kesulitan pertama adalah aspek modal.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Setiono selaku mayarakat ring I Desa Suwayuwo, yaitu:

> "Dalam pengelolaan modal, dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Karena kita harus bisa membedakan mana dana untuk modal usaha dengan dana untuk keperluan pribadi. Jadi jangan sampai antara dana modal usaha dan dana pribadi dicampuradukkan. Seringkali yang saya temui kesulitan pada masyarakat untuk mengelola dana pinjaman untuk usaha, terkadang hampir 50% dana digunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya tidak untuk mengembangkan usaha tapi untuk menutup hutang atau membeli hal yang di luar prosedur usaha" (wawancara pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 14.00 WIB, di rumah Bapak Agus).

Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Bapak Kasnanto, selaku ketua kelompok masyarakat ring I Desa Suwayuwo yang menyatakan:

> "Masyarakat di sini sering gagal dalam mengelola modal, karena memang kualitas SDM mereka rendah. Seringkali dana modal dicampuradukkan dengan dana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kurang begitu mampu untuk membedakan mana dana modal dan dana untuk dipakai pribadi"

(wawancara pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 09.00 WIB, di rumah Bapak Kasnanto).

Dari hasil wawancara di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sangat mempengaruhi dalam pengelolaan organisasi bisnis. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Kasnanto, bahwa SDM diperlukan ketika dia mengelola keuangan, mengelola modal usaha dengan dana pribadi haruslah dibedakan. Diperlukannya suatu pembinaan khusus bagi seluruh warga sebelum mereka memulai menjalankan usaha agar meminimalisir kebangkrutan yang mungkin terjadi akibat kegagalan bisnis.

C. Pembahasan

1. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. HM Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Lokal pada Masyarakat Ring I

Siagian (2001: 4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Secara umum, hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanfaatkan sumber daya pendukungnya. Pembangunan biasanya diupayakan dengan pertumbuhan ekonomi guna

mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan.

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Perusahaan dituntut untuk mengelola dampak kegiatan perusahaan agar memungkinkan terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainaibility development*). Pembangunan berkelanjutan tersebut tentunya hanya akan dapat diraih apabila sejak sekarang perusahaan-perusahaan melakukan pengelolaan dampak operasi mereka pada tiga tataran dampak, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebagai perusahaan yang memiliki bidang usaha pembuatan rokok maka aktivitas perusahaan akan mempunyai dampak bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan. Untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan maka PT HM Sampoerna ikut berperan dalam hal mengatasi dampak yang ditimbulkan dengan berbagai cara, yaitu dengan mewujudkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Secara ideal, pelaksanaan CSR oleh perusahaan pada dasarnya berorientasi dari dalam ke luar. Artinya perusahaan harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungannya. Pengelolaan yang baik ini mencakup di dalamnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Untuk melaksanakan kegiatan CSR dengan baik, perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Beberapa hal yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu CSR yang telah diwujudkan oleh PT HM Sampoerna tersebut telah sesuai dengan konsep dan pengertian mengenai CSR yang diungkapkan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Wibisono (2007: 7):

> "*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat luas."

Pendapat yang senada diungkapkan oleh Untung (2008: 35) yang menyatakan bahwa kontribusi CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR.

CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Dalam menjalankan

tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Pada tataran praktis CSR biasanya berupa program yang memiliki tujuan mengembangkan masyarakat. Konsep pengembangan masyarakat sendiri memiliki tujuan pemberdayaan. Proses pengembangan masyarakat mengajak masyarakat agar turut serta dalam berkembang, bukan hanya mendapat bantuan. Praktek yang paling terkenal dari CSR adalah pengembangan masyarakat (*community development*), meskipun keduanya tidak dapat disamakan. *Community development* merupakan prinsip dasar CSR. Pengembangan masyarakat (*community development*) didefinisikan sebagai upaya sistematik untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan berdasar potensi seluruh sumber daya yang dapat diaksesnya. Konsep pengembangan masyarakat (*community development*) mengajak dan merangkul seluruh masyarakat untuk dapat bekerja sama dan berpartisipasi penuh dalam pengembangan dan

pembangunan masyarakat. Sehingga setelah adanya bentuk kegiatan pengembangan masyarakat ini, mereka dapat lebih mandiri dan berdaya dari sebelumnya. Setelah dipetakan ada beberapa motivasi yang melandasi sebuah perusahaan untuk melakukan CSR, dari mulai menjalankan kewajiban hingga demi membantu sesama, dan beramal kepada sesama menjadi memberdayakan dan membangun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna merupakan salah satu perwujudan program CSR PT HM Sampoerna dalam bentuk pengembangan masyarakat (*community development*). PPK Sampoerna didirikan melalui pengembangan potensi lokal dengan sasaran masyarakat di sekitar wilayah operasional PT HM Sampoerna dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi wirausaha di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, juga termasuk industri kreatif. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Soetarso (dalam Huraerah, 2008: 132) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat merupakan perencanaan, pengorganisasian atau proyek, dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.

Kegiatan pengembangan masyarakat atau *community development* sebagai bagian dari program CSR tersebut telah diadopsi banyak perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dengan tujuan dan aktifitas kegiatan yang lebih luas. Perubahan sosial politik setelah reformasi menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam membangun hubungan

tersebut pengembangan ekonomi lokal atau pengembangan usaha kecil di sekitar perusahaan adalah salah satu entri poin stategis yang sering dipilih oleh sebagian perusahaan. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau membutuhkan dukungan dan kerjasama masyarakat dalam melancarkan operasional perusahaan. Kegiatan tersebut dengan publikasi yang tepat akan sangat membantu membentuk citra perusahaan dan menggalang kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan. Pengembangan masyarakat menjadi bagian penting dari CSR karena kelompok masyarakat rentan baik itu secara struktural, kultural, maupun individual biasanya memiliki akses paling kecil terhadap dampak positif operasi perusahaan, sekaligus menerima dampak negatif paling parah. Jika mereka tidak mendapatkan perhatian ekstra dari perusahaan, kondisi tersebut akan terus-menerus mendera mereka.

Berikut ini adalah analisis mengenai sub fokus dalam penelitian yang sesuai dengan temuan di lapangan. Dalam sub fokus penelitian ini akan dianalisis lebih rinci untuk melihat mengenai peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada kelompok binaan ring I yang dilihat dari bentuk pelaksanaan program CSR PT HM Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*), pada masyarakat ring I PPK Sampoerna dan proses pembinaan yang dilakukan oleh PPK Sampoerna melalui program *community development* dalam meningkatkan kemandirian masyarakat lokal pada masyarakat ring I.

a. Bentuk Pelaksanaan Program CSR PT. HM Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) pada Masyarakat Ring I PPK Sampoerna

PPK Sampoerna beroperasi melalui pengembangan potensi lokal dengan sasaran masyarakat di sekitar wilayah operasional PT HM Sampoerna. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah program yang di dalamnya terdapat implementasi dan kontribusi dari sebuah perusahaan atas dampak aktivitas produksinya dengan tujuan agar pembangunan yang sedang dilakukan dapat berjalan terus-menerus dan berkelanjutan serta menjaga keharmonisan antarperusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada. PPK Sampoerna ini memberikan berbagai jenis pelatihan bagi masyarakat ring I *plant* Sukorejo yakni warga yang berada di empat desa, yaitu Desa Suwayuwo, Ngadimulyo, Gunting, dan Bulukandang. Jenis-jenis pelatihan yang diadakan meliputi peternakan, perikanan, hortikultura, pengolahan pangan, *vocational* atau kejuruan perbengkelan sepeda motor, membatik, bordir, kerajinan kayu, dan tata rias. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Wibisono (2007: 143-144) bahwa ring I merupakan wilayah terdekat dari lokasi pabrik dan merupakan wilayah yang terkena dampak langsung dari beroperasinya suatu pabrik. Ring I ini berjarak antara 0-500 meter dari pabrik. Wilayah ring I mendapat alokasi dana CSR lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah yang lainnya, yaitu sebesar 45%. Hal ini dikarenakan wilayah ring I merupakan wilayah yang terkena dampak langsung dari operasi pabrik dan biasanya letaknya berhimpitan dengan pabrik.

Implementasi pogram CSR merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusa-haan untuk terus dekat dengan masyarakat. Menurut Budimanta (2008: 24) CSR pada dasarnya merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yang merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal), maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).

Berdasarkan pada hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) program pengembangan masyarakat (*community development*) yang dilaksanakan oleh PPK Sampoerna dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan karena strategi dalam implementasi CSR perusahaan merupakan respon atas kebutuhan riil masyarakat atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Seperti telah diuraikan di atas strategi pelaksanaan CSR perusahaan didasarkan pada pengaturan ring yang ada dari ring I hingga ring III. Masing-masing ring memiliki karakteristik persoalan yang berbeda-beda sehingga jenis dan macam kegiatannya juga berbeda-beda. Dalam hal ini menurut Untung (2008: 35) kontribusi CSR dalam pembangunan ekonomi masyarakat adalah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan CSR perusahaan. Kemiskinan sudah menjadi musuh bersama yang harus ditanggulangi oleh semua pihak. Untuk melasakanakan hal tersebut paling tidak terdapat empat pilar utama yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, format CSR yang sesuai dengan nilai lokal

masyarakat; kedua, kemampuan diri perusahaan terkait dengan kapasitas SDM dan institusi, dan ketiga adalah peraturan dan kode etik dalam dunia usaha. Berdasarkan pada integrasi ketiga pilar tersebut, masyarakat akan dapat dibangun kemampuan dan kekuatannya dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam pencapaian kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Pengembangan masyarakat (*community development*) adalah salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara umum pengembangan masyarakat (*community development*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program pengembangan masyarakat (*community development*) memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat *(community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan *(sustainability*), dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Sektor industri di Indonesia sampai dengan saat ini masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proses pembangunan nasional. Kontribusi yang diberikan oleh sektor ini tidak hanya dalam bentuk sumbangan devisa terhadap negara, tetapi juga dapat dilihat dari *multiplier effect* yang telah diciptakan oleh industri-industri baik itu di daerah-daerah ataupun tidak. Salah satu *multiplier efect* yang disumbangkan oleh industri adalah melalui program-program pengembangan masyarakat (*community development*). Program-program pengembangan masyarakat (*community development*) yang dilaksanakan oleh industry tersebut selain merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), juga dalam rangka mempersiapkan *life after mining/operation* (kehidupan setelah adanya pembangunan) bagi daerah maupun masyarakat sekitarnya.

Berbicara tentang masalah pengembangan masyarakat (*community development*) tersebut, maka dapat dilihat bahwa berbagai industri dan dunia usaha di Indonesia dan juga di seluruh dunia telah memiliki arah yang sama untuk mengembangkan hubungan yang lebih harmonis dengan komunitas lokal. Hal ini sebenarnya merupakan komitmen bersama banyak pihak sebagai implementasi paradigma pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa perusahaan melakukan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*), antara lain adalah:

1. Izin lokal untuk beroperasinya perusahaan dalam mengembangkan hubungan dengan masyarakat lokal.
2. Mengetahui sosial budaya masyarakat lokal.

3. Mengatur dan menciptakan strategi ke depan melalui program pengembangan masyarakat (*community development*). Reputasi hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat lokal dan pengembangan masyarakat (*community development*) dapat menciptakan kesempatan usaha yang baru.

Sasaran dan target program *Corporate Social Reponsibility* (CSR) yang telah dilaksanakan oleh PPK Sampoerna kepada masyarakat ring I tersebut sesuai dengan tujuan dari *community development*, dimana *community development* ini merupakan salah satu program dalam CSR. Tujuan *community development* menurut Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi di antaranya sebagai berikut:

f. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar wilayah perusahaan.
g. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat di wilayah sekitar perusahaan yang didasarkan pada skala proiritas dan potensi wilayah.
h. Mengembangkan potensi kewirausahaan yang didasarkan pada potensi sumber daya lokal.
i. Mengembangkan kelembagaan lokal di sekitar wilayah perusahaan,
j. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Pola pengembangan masyarakat (*community development*) bukan merupakan kegiatan yang sifatnya *top-down intervention* yang tidak menjunjung tinggi

aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, karena yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola ppengembangan masyarakat yang sifatnya *bottom-up intervention* yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan .

PPK Sampoerna merupakan salah satu CSR PT HM Sampoerna yang termasuk dalam program pengembangan masyarakat (*community development*), di mana perusahaan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat, sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk terus maju dan berkembang. Pada akhirnya akan tercipta dan tumbuh *trust and sense of belonging* dalam diri masyarakat. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan dari PPK Sampoerna itu sendiri, yakni mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi wirausaha di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, juga termasuk industri kreatif.

Masyarakat ring I dibentuk oleh masing-masing kelompok yang akan diikutkan dalam kegiatan inkubasi usaha PPK Sampoerna. Di sini masing-masing kelompok bebas memilih dan menentukan sendiri siapa saja warga yang akan diikutkan dalam pelatihan. Respon dari masyarakat tersebut sangat beragam, ada yang berminat ingin serius mengikuti pelatihan dan mengembangkannya kemudian, ada juga yang ingin sekedar mengetahui bagaimana jenis pelatihan

yang diberikan oleh PPK Sampoerna. Namun secara umum setiap kegiatan PPK Sampoerna yang ditawarkan kepada masyarakat selalu diikuti penuh.

Pemasaran merupakan hal penting dari setiap kegiatan yang menghasilkan suatu produk dan jasa untuk dapat mendapatkan nilai timbal balik dari keuntungan yang ingin dicapai. Untuk melakukan pemasaran produk-produk masyarakat ring I yang berada di empat desa bekerja sama dengan PPK Sampoerna melakukan pemasaran dalam bentuk pameran dan promosi serta dalam bentuk mulut ke mulut ke semua acara publik atau dalam hal lain adalah melakukan pendekatan regulasi yang bertujuan agar produk-produk kelompok binaan ring I PPK Sampoerna dapat dikenal di rekan-rekan pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan observasi dan merupakan hasil temuan menarik di lapangan, bahwa PPK Sampoerna menyediakan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat ring I PPK Sampoerna, seperti adanya ruang *display product* untuk menampilkan hasil karya kelompok binaan dan pengikutsertaan produk yang dihasilkan oleh masyarakat ring I PPK Sampoerna dalam berbagai pameran dan promosi, misalnya dalam PPK Sampoerna Expo dan Kampoeng UKM Pasuruan.

Peran PPK Sampoerna dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) dalam melakukan pemasaran produk-produk masyarakat ring I dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 16
Peran PPK Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) dalam Melakukan Pemasaran Produk-Produk Masyarakat Ring I

No.	Peran PPK Sampoerna dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) dalam Melakukan Pemasaran Produk-Produk Masyarakat Ring I
1	Membantu akses pasar dan memberikan bantuan informasi pasar
2	Memberikan bantuan promosi
3	Mengembangkan jaringan usaha (mitra usaha)
4	Membantu melakukan identifikasi pasar dan prilaku konsumen
5	Membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Untuk memicu optimisme para wirausahawan tersebut, setiap tahunnya PPK Sampoerna juga menggelar PPK Sampoerna Expo. Pemerintah sebagai *policy maker* dan penanaman modal memang harus bersinergi menumbuhkan program prioritas kewirausahaan, satu-satunya pemacu percepatan pembangunan daerah. Dengan sinergi para pelaku wirausaha, besar dan kecil, pula seluruh kawasan akan merasakan dampak, berupa terpangkasnya pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pelaksanaan program-program yang terfokus dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan dukungan berbagai pihak, PT HM Sampoerna Tbk. secara nyata turut berperan membangun kemandirian masyarakat agar dapat terus menggulirkan roda pembangunan daerah. Harapan bangsa ini adalah harapan PT HM Sampoerna Tbk., untuk mendorong dan memperkuat Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dengan pondasi ekonomi yang kuat serta sumber daya manusia yang unggul. PPK Sampoerna adalah sebuah model pelatihan berbasis

ekonomi kerakyatan yang dikembangkan untuk menggulirkan UMKM serta mendorong terciptanya wirausahawan-wirausahawan lokal. Teknologi yang digunakan dalam pelatihan ini adalah teknologi tepat guna, sehingga bisa langsung diaplikasikan di daerahnya masing-masing. PPK Sampoerna terbuka tidak hanya untuk masyarakat Pasuruan, tetapi seluruh Indonesia.

Program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PPK Sampoerna kepada warga binaan ring I di empat desa sudah mengarah kepada tidak hanya masyarakat petani dan peternak juga peran *stakeholder* untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan dan saling bekerja sama dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya dengan memakai pola pendekatan *bottom-up*, dimana usulan kebutuhan pembangunan dijaring mulai tingkat paling bawah dan dirumuskan serta diusulkan langsung oleh masyarakat I di empat desa.

b. Proses Pelatihan dan Pembinaan yang Dilakukan oleh PPK Sampoerna Melalui Program *Community Development* dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Lokal Pada Masyarakat Ring I

1. Tahap Perencanaan

Solihin (2009: 129) mendefinisikan perencanaan (*planning*) merupakan awal kegiatan penetapan dari berbagai hasil akhir (*objectives/goals*) yang ingin dicapai oleh perusahaan yang meliputi strategi, kebijakan, prosedur, program dan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kesulitan metodologis untuk menghubungkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kinerja keuangan perusahaan

(*corporate financial performance*), namun tujuan pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat dirumuskan dengan jelas.

Pelaksanaan suatu program diawali dengan tahap perencanaan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Tahap perencanaan ini sangat penting karena tahap ini menentukan apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak, sehingga menjadi landasan dasar dari jalannya suatu program. Pada tahap ini diperlukan kerja sama yang baik antara fasilitator PPK Sampoerna dan masyarakat binaan dalam melaksanakan tahap perencanaan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan.

Wibisono (2007: 121-125) salah satu tahap perencanaan CSR adalah CSR *Assessement*, yaitu upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Selain itu juga terdapat CSR *Manual Building*, hasil *assessement* merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Lebih lanjut Solihin (2009: 130) mengungkapkan bahwa hal yang perlu diperlu diperhatikan dalam pembuatan rencana CSR adalah bahwa pelaksanaan program CSR melibatkan kerja sama perusahaan dengan pihak lain. Dalam hal ini pelaksanaan CSR biasanya melibatkan pula pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat, serta pihak-

pihak calon penerima manfaat CSR misalnya masyarakat lokal. Oleh sebab itu, perencanaan CSR merupakan perencanaan yang terintegrasi dan bukan semata-mata perencanaan yang dibuat oleh perusahaan, tetapi dalam hal ini perusahaan pun harus melibatkan pihak-pihak lain yang akan teribat dalam pelaksanaan program CSR agar program CSR dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi, pada tahap perencanaan diawali dengan pemetaan masyarakat (*social maping*) untuk mengidentifikasi potensi desa yang dilakukan oleh PPK Sampoerna bersama Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (PPUMK) yang dipandu oleh kepala-kepala desa ring I dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana potensi desa yang dimiliki baik dari segi sumber daya alamnya, teknologi yang dimiliki dan kemungkinan bisa untuk lebih dikembangkan, manusianya, lingkungannya, kelembagaannya, serta kemungkinan permasalahan yang ada pada desa tersebut. Dari identifikasi ini bisa dilihat dengan spesifikasi teknologi jenis apa potensi desa tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut.

Pada intinya survei identifikasi potensi desa yang dilaksanakan oleh PPK Sampoerna sudah cukup baik karena tahap ini sudah melibatkan masyarakat (dalam hal ini kepala-kepala desa ring I dan tokoh masyarakat maupun PPK Sampoerna bersama program PPUMK. Sehingga dapat diketahui potensi masing-masing desa yang berada di wilayah ring I sekitar lokasi operasional dari PT HM Sampoerna untuk lebih bisa dikembangkan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi, sehingga bisa dicari jalan untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Sebagaimana telah desebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan program CSR melibatkan beberapa pihak, yaitu perusahaan, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat CSR. Solihin (2009: 145-146) mengungkapkan bahwa dalam implementasi program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program CSR dengan baik. Kondidi *pertama*, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat. Sebagai contoh implementasi CSR harus memperoleh persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak perusahaan sehingga pelaksanaan program CSR didukung sepenuhnya oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya finansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan CSR maupun sumber daya manusia yakni para karyawan perusahaan yang diterjunkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR.

Kondisi *kedua* yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan implementasi program CSR adalah ditetapkannya pola hubungan (*relationship*) di antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Tanpa adanya pola hubungan yang jelas di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR, maka kemungkinan besar pelaksanaan program CSR tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu tanpa adanya pola hubungan yang jelas, maka kemungkinan program CSR tersebut untuk berlanjut (*sustainable*) akan berkurang.

Kondisi *ketiga* adalah adanya pengelolaan program yang baik. Pengelolaan program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR. Perwujudan program tersebut juga memerlukan dukungan terhadap program yang tengah dijalankan dari pihak-pihak yang terlibat dan terdapat kejelasan mengenai durasi waktu pelaksanaan program serta siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara kontinuitas pelaksanaan kegiatan (misalnya untuk aktivitas *community development*) dalam bentuk pemberian fasilitas produksi kepada UKM) bila program CSR sudah berakhir.

Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya pelatihan dan pembinaan masyarakat ring I yang dilakukan oleh PPK Sampoerna melalui berbagai macam program bantuan pembinaan yang dalam hal ini bersifat mendorong, mengarahkan, membimbing, memberi pelatihan dan memotivasi serta memberi rujukan atau rekomendasi dalam bidang apapun. Masyarakat ring I yang mendapatkan bantuan, baik bantuan manajemen maupun pendanaan akan dapat meningkatkan usaha karena lebih efisien jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dan arahan.

Setelah selesai membentuk kelompok-kelompok pelaksana program pengembangan masyarakat, selanjutnya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya masyarakat ring I di empat desa agar terbentuk masyarakat yang mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembinaan berupa pendampingan kepada masyarakat melalui tenaga-

tenaga yang profesional dan terampil sesuai dengan fungsi di bidangnya. Tugas ini dilaksanakan oleh para konsultan atau fasilitator sebaga tenaga pekerja sosial dalam upaya untuk mengembangkan masyarakat desa ring I.

Dalam pelaksanaan program pengembangan masyaraat kepada masyarakat ring I di empat desa, upaya penumbuhan kesadaran dan pemberian pengetahuan serta keterampilan teknis dilakukan melalui adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh PPK Sampoerna. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat ring I untuk memberdayakan dirinya sendiri, tetapi pendampingan yang dilaksanakan adalah sifatnya bimbingan dan pengarahan, bukan mendikte masyarakat ring I untuk melakukan tindakan yang merupakan kepentingan pihak tertentu. Pembinaan dalam meningkatkan kreatifitas dan kapasitas sumber daya manusia dan produksi ini berkaitan dengan bagaimana PPK Sampoerna mengarahkan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat ring I. Sebagaimana yang dimaksud pembinaan adalah suatu usaha untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi melalui penyempurnaan atau pembaharuan, pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan kondisi yang ada sehingga tercipta sebuah kondisi yang lebih baik. Sama halnya dengan pembinaan yang dilakukan oleh PPK Sampoerna kepada masyarakat ring I, berarti dalam hal ini terdapat suatu upaya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi terhadap masyarakat ring I yang ada melalui pembaharuan pengaturan dan pengawasan untuk mencapai kondisi yang lebih baik lagi.

Untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat desa ring I, PPK Sampoerna bekerja sama dengan PT. Primakelola Agribisnis Agroindustri, mengadakan berbagai pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas baik sebagai individu maupun kelompok agar nantinya mampu mengelola pemberdayaan pada saat pelaksanaannya dan saat masa kontrak proyek berakhir.

Tujuan pelatihan dan pembinaan dalam pengembangan masyarakat (*community development*) ini adalah nyata adanya sesuai dengan misi dari PPK Sampoerna yaitu memberdayakan dan mengembangkan masyarakat untuk menjadi wirausahawan yang handal dan berwawasan ke depan dengan melibatkan *stakeholders*. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan gagasan produk yang semakin inovatif dan kreatif sehingga meningkatkan produktivitas kelompok binaan serta menambah kesejahteraan masyarakat ring I PPK Sampoerna. Karena pada prinsipnya, upaya-upaya pengembangan masyarakat (*community development*) yang dilakukan oleh PPK Sampoerna tidak diarahkan untuk meningkatkan skala usaha UMKM menjadi industri besar, melainkan diarahkan untuk mewujudkan UMKM yang kokoh dan berdaya saing tinggi.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Solihin (2009: 146) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR perlu dipantau untuk memastikan bahwa pelaksanaan program CSR tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana pencapaian tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan yang membutuhkan tindakan koreksi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam program pengembangan masyarakat pada PPK Sampoerna dilakukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme dan proses pelaksanaan monitoring proyek pengembangan masyarakat yang diberikan oleh PPK Sampoerna kepada warga binaaan ring I plant Sukorejo, Pada tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan program dan pada akhir program.

Menurut Kartasasmita (1997), bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada PPK Sampoerna dilakukan pada pertengahan dan akhir program. Monitoring dan evaluasi pada pertengahan program dilakukan untuk melihat jalannya program dan membandingkannya dengan tujuan yang sudah dibuat. Sedangkan monitoring dan evaluasi pada akhir program dilakukan untuk melihat jalannya program secara keseluruhan, temuan-temuan lapangan, penilaian tingkat keberhasilan program, dan upaya peningkatan program ke depannya. Menurut Wibisono (2007: 121-125) tahap evaluasi merupakan tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi ini dilakukan

untuk pengambilan keputusan seperti misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan atau memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah diimplementasikan, sehingga evaluasi dapat membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Sedangkan pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan shareholder juga untuk *stakeholders* yang memerlukan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PPK Sampoerna telah berjalan sesuai dengan mekanismenya, terutama dengan melibatkan secara langsung dari masyarakat binaan ring I yang mengetahui dan ikut terlibat langsung dalam proses pembinaan dan pelatihan dalam rangkan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PPK Sampoerna.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kinerja PPK Sampoerna dalam Usahanya Melakukan Pelatihan Pembinaan pada Masyarakat Ring I

a. Faktor Pendukung

1. Ketepatan Pemberian Dana dari PPK Sampoerna pada Masyarakat Ring I

UMKM yang mendapat bantuan manajemen, teknologi dan finansial akan dapat memperkuat kelangsungan hidup usahanya. Proses pemberian bantuan dapat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi proses produksi yaitu berbagai kebijakan yang dilakukan oleh UMKM dalam mengkombinasikan sumber permodalan, mengadakan perluasan pasar, menambah jumlah dan variasi produk serta meningkatkan tingkat upah. Program asistensi atau bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas produksi, penyediaan dan bantuan dalam bidang manajemen, teknik dan finansial diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha. Berbagai bentuk bantuan dengan melalui bantuan kredit perbankan ataupun asuransi menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap keberhasilan usaha (kinerja) UMKM.

PPK Sampoerna berperan penting dalam memberikan informasi peluang kerja sama dan bantuan teknis kepada usaha kecil dalam perencanaan kerja sama dan negosiasi bisnis. PPK Sampoerna dapat mendukung dan meningkatkan kerja sama dengan memantapkan prasarana-sarana dan memperkuat kelembagaan pendukung kemitraan antara lain dengan mengembangkan sistem dan lembaga keuangan yang efektif bagi industri kecil dan menengah kelompok binaannya. Hal ini penting

mengingat akses dana maupun bantuan penolong, khususnya berbaga pinjaman dengan persyaratan teknisnya, masih menjadi kendala bagi industri kecil dalam pengembangan usahanya. Bagi industri kecil lapisan bawah yang belum *bankable* barangkali patut dipikirkan pendekatan yang berbeda dengan cara-cara perbankan konvensional, termasuk pengembangan lembaga keuangan alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan industri kecil seperti bantuan permodalan dari PPK Sampoerna yang langsung memberikan bantuan kepada industri kecil mitra binaannya.

Proses pemberian bantuan dapat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi proses produksi yaitu berbagai kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat binaan ring I PPK Sampoerna dalam mengkombinasikan sumber permodalan, mengadakan perluasan pasar, menambah jumlah dan variasi produk serta meningkatkan tingkat upah. Program asistensi atau bantuan yang diberikan PPK Sampoerna dalam bentuk pemberian fasilitas produksi, penyediaan dan bantuan dalam bidang manajemen, teknik dan finansial diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha.

Berdasarkan hasil observasi, jumlah pemberian dana disesuaikan dengan jenis pelatihan yang diikuti oleh masyarakat ring I. Dana yang diberikan oleh PPK Sampoerna kepada masyarakat ring I, biasanya melalui ketua kelompok binaan masing-masing desa ring I. Dana yang diberikan biasanya dalam bentuk uang tunai, kemudian masyarakat binaan membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh mereka sesuai dengan jenis pelatihan yang telah mereka ikuti.

2. Keterampilan Awal dalam Berwirausaha yang Telah Dimiliki oleh Masyarakat Ring I

Secara otodidak, masyarakat ring I juga telah mampu mengatasi segala permasalahannya yang ada. Masyarakat ring I menggunakan potensi yang ada pada dirinya, menggunakan keterampilan yang telah mereka miliki dari dulu, baik secara turun temurun maupun yang telah menjadi tradisi dalam lingkungan mereka. Keterampilan awal dalam berwirausaha yang telah dimiliki oleh masyarakat ring I ini sangat membantu dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh PPK Sampoerna. Dengan keterbatasan teknologi yang ada, masyarakat ring I telah mampu untuk mempertahankan perolehan dari pertanian ataupun peternakannya.

b. Faktor Penghambat

1. Tidak Tersedianya Fasilitas Transportasi

PPK Sampoerna tidak menyediakan fasilitas transportasi seperti halnya bis Sampoerna kepada masyarakat binaannya. Di sekitar PPK Sampoerna juga tidak terdapat angkutan umum seperti halnya angkutan kota (angkot) maupun angkutan desa (angdes), yang ada hanyalah *ojek*. Jadi, peserta pelatihan, terutama masyarakat ring I datang menuju ke tempat PPK Sampoerna dengan sendiri meskipun posisi tempat PPK Sampoerna berada letaknya cukup jauh dari jalan raya. Sesuai data hasil observasi, hal inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat ring I enggan bahkan malas mengikuti pelatihan, terutama masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi.

2. Pengelolaan Modal

Segi permodalan bukan menjadi hambatan utama untuk mengembangkan usaha namun dalam pengelolaan manajemen usaha yang terkadang kurang bagus, akibat adanya beberapa Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang rendah. Sekarang ini banyak penawaran yang diberikan oleh PPK Sampoerna bekerja sama dengan Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (PPUMK) dan UKM Centre untuk peminjaman modal usaha, sehingga tidak lagi kesulitan pertama adalah aspek modal. Sesuai hasil observasi, dalam pengelolaan modal seringkali dana modal usaha dan dana pribadi dicampuradukkan. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesulitan pada masyarakat untuk mengelola dana pinjaman untuk usaha, terkadang hampir 50% dana digunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya tidak untuk mengembangkan usaha tetapi untuk menutup hutang atau membeli hal yang di luar prosedur usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*) pada PPK Sampoerna yaitu untuk memotivasi masyarakat memiliki jiwa kewirausahaan sehingga usaha yang dijalankan memiliki keunggulan yang kompetitif, dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta mengidentifikasi potensi usaha wirausaha baru.
2. Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja PPK Sampoerna dalam usahanya melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat ring I yaitu ketepatan pemberian dana dari PPK Sampoerna kepada masyarakat ring I dan keterampilan awal dalam berwirausaha yang telah dimiliki oleh masyarakat ring I, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak tersedianya fasilitas transportasi dan pengelolaan modal.
3. Untuk mencapai program pengembangan masyarakat (*community development*) yang optimal, maka pengembangan masyarakat (*community*

development) lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur pelibatan masyarakat dalam berbagai pelatihan, pengambilan keputusan serta kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan yang mempengaruhi masa depan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Guna lebih mengoptimalkan program pengembangan masyarakat (*community development*) pada Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna, maka berikut ini beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna agar upaya untuk mengoptimalkan pengembangan masyarakat (*community development*) yang telah dilakukan berjalan efektif maka perlu adanya:
   a. Komitmen yang sungguh-sungguh dalam mendukung, memberdayakan dan mengembangkan UKM binaan serta harus terus meningkatkan partisipasi dan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kabupaten Pasuruan maupun di luar Kabupaten Pasuruan, baik dengan masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan sebagainya.
   b. Sosialisasi yang lebih intensif dan membangun dalam mengkomunikasikan tujuan dari program pengembangan masyarakat (*community development*) yang dilakukan oleh PPK Sampoerna.
   c. Mengikutsertakan mitra binaan yaitu industri kecil ke dalam pameran yang bertingkat regional, nasional dan internasional untuk memasarkan hasil

produksinya khususnya para pengrajin agar hasil produksinya dapat dikenal luas, di tingkat lokal di tingkat lokal dalam negeri maupun merambah pada pasar mancanegara.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar menambah sarana transportasi seperti angkutan desa, penambahan tersebut dilakukan dengan adanya perpanjangan jalur angkutan. Jalur angkutan tujuan Desa Gunting tepatnya untuk menuju ke lokasi PPK Sampoerna ini sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan tidak ada karena hanya ojek saja yang tersedia, dan itupun biayanya sangat mahal. Pemberhentian terakhir hanya sampai di depan gang masuk desa sebelum Desa Gunting, yakni Desa Ngadimulyo, padahal jarak antara Desa Ngadimulyo dengan Desa Gunting masih sekitar 3,5 kilometer lagi. Selain itu penambahan sarana transportasi tersebut nantinya juga akan membuka akses yang lebuh luas dari atau menuju ke Desa Gunting, khususnya lokasi PPK Sampoerna itu sendiri. Dengan hal ini diharapkan masyarakat Desa Gunting semakin maju dan berkembang.
3. Bagi masyarakat diharapkan berpartisipasi dengan membeli hasil produksi pengusaha kecil dan menengah lokal di wilayah Kabupaten Pasuruan karena pada dasarnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Dengan lebih memilih produk hasil dari wilayah Kabupaten Pasuruan maka masyarakat telah membantu para pengusaha kecil dan menengah lokal pada khususnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.

Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budimanta, Arif dan Rudito, Bambang. 2008. *Corporate Social Responsibility, Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Indonesian Centre for Sustainability Development (ICSD).

Hadi, Sudharto P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.

Ibrahim, Rustam. 2005. *Bukan Sekedar berbisnis, Keterlibatan Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Piramedia.

Keban, Yeremias. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.

Khairandy, Ridwan dan Malik, Camelia. 2007. *Good Corporate Governance "Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum"*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.

Murdiyarso, Daniel. 2003. *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih. Jakarta*: Penerbit Buku Kompas.

Saidi, Zaim dan Abidin, Hamid. 2004. *Menjadi bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia.

Salim, Emil. 1989. *"Sustainable Development: an Indonesian Perspective"*. Makalah dipresentasikan dalam forum AISEC, Jakarta 9-10 Maret 1989.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance "Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan"*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soemarwoto, Otto. 2006. *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

----------. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Refika Aditama.

Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutikno dan Maryunani. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.

Tim Penyusun Dosen FIA Unibraw. 2009. *Pedoman dan Ujian Skripsi Program Sarjana (S1)*. Malang: Universitas Brawijaya.

Tjkroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3S.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga

Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Wrihatnolo R. R & Dwidjowijoto R. N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Website

----------. 2010. Program Community Development, diakses pada tanggal 22 Oktober 2010 dari http://www.Pln.co.id/csr/community.asp.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

LAMPIRAN

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAN TAHUN 2010-2011

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN JANUARI 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1.	16/01/2010 s/d 17/01/2010	Koperasi PT Parin Sidoarjo	Pelatihan Peternakan dan Pengolahan Limbah Ternak	Mendapatkan pengetahuan di bidang peternakan serta pengolahan limbah ternak yang baik dan pembekalan manajemen dan marketing	Reguler	26
2.	19/01/2010 s/d 20/01/2010	PNPM Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri	Pelatihan Peternakan dan Pengolahan Limbah Ternak	Mendapatkan pengetahuan di bidang peternakan serta pengolahan limbah ternak yang baik dan pembekalan manajemen dan marketing	Reguler	33
TOTAL						**59**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN FEBRUARI 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	01/02/2010 s/d 05/02/2010	PT. HM Sampoerna	Pelatihan Enterpreneurship PT. HM Sampoerna	Mendapatkan pelatihan wirausaha di bidang agrobisnis seperti hortikultura, peternakan, budidaya jamur, perikanan, pengolahan hasil pertanian, selain itu peserta dibekali materi mengenai pengembangan diri, mengelola keuangan dan manajemen bisnis kecil.	Komersil	18
2	01/02/2010 03/02/2010 05/02/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo, Suwayuwo dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Mendapatkan pelatihan dengan keterampilan dalam menjahit dan membuat bordir, sehingga dapat dibekali ketrampilan untuk usaha sendiri.	Masyarakat Ring I	11
3	06/02/2010 s/d 07/02/2010	Forum Peduli Masyarakat Pasuruan	Pelatihan Agribisnis	Mendapatkan informasi serta wawasan di bidang agrobisnis seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan hasil pertanian	Reguler	60

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
4	08/02/2010 s/d 18/02/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo, Suwayuwo dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Pelatihan rutin untuk mendapatkan pendalaman teknis bordir	Sosial-Ring I	15
5	18/02/2010 s/d 19/02/2010	PNPM Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung	Pelatihan Regular Peternakan dan Pengolahan limbah ternak	Mendapatkan pengetahuan di bidang peternakan serta pengolahan limbah ternak yang baik dan pembekalan manajemen dan marketing	Reguler	30
TOTAL						**134**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN MARET 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	01/03/2010 s/d 04/03/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo Suwayuwo dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Pelatihan rutin tentang pedalaman teknis bordir	Sosial-Ring I	15
2	10/03/2010	PNPM Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik	Pelatihan Agrobisnis	• Melaksanakan pelatihan pengolahan pangan dan pembuatan pakan konsentrat bagi anggota PNPM Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik • Memberikan gambaran cara-cara berwirausaha di bidang pengolahan pangan dan peternakan khususnya pengolahan pakan ternak • Terjalinnya kerja sama antara PNPM Kedamean dengan PPK Sampoerna	Reguler	44
3	13/03/2010 s/d 14/03/2010	STAPA Center	Pelatihan Regular Budidaya jamur Tiram	Memberikan pendidikan mengenai budidaya jamur tiram dan marketingnya kepada peserta pelatihan	Reguler	22

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
4	19/03/2010 s/d 21/03/2010	YPPI (Masyarakat Ring I)	TBM Packing dan Marketing YPPI	Memberikan informasi kepada seluruh peserta pelatihan mengenai TBM Packing dan marketing YPPI	Reguler	40
5	20/03/2010 22/03/2010 24/03/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan bordir	Sosial-Ring I	13
6	23/03/2010 s/d 25/03/2010	Masyarakat Ring I (Desa Bulukandang dan Gunting)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan ketrampilan bordir	Sosial-Ring I	13
7	27/03/2010 29/03/2010	Masyarakat Ring I (Desa Suwayuwo dan Ngadimulyo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan ketrampilan bordir	Sosial-Ring I	13
8	30/03/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan ketrampilan bordir	Sosial-Ring I	13
TOTAL						**173**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN APRIL 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	1/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan Ketrampilan bordir	Sosial-Ring I	13
2	3/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Suwayuwo dan Ngadimulyo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan Ketrampilan bordir	Sosial-Ring I	13
3	5/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Suwayuwo dan Ngadimulyo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan Ketrampilan bordir	Sosial-Ring I	13
4	5/04/2010 s/d 9/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Lemahbang)	Pelatihan Program Penguatan Keberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Mikro (Bina Swadaya)	Memberdayakan wanita yang sudah mempunyai usaha di wilayah Ring I	Sosial-Ring I	35
5	6/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan bordir	Sosial-Ring I	13
6	8/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan ketrampilan bordir	Sosial-Ring I	12

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
7	8/04/2010 s/d 9/04/2010	Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan	Pelatihan Peternakan Dan Budidaya SRI	Mendapatkan pengetahuan di bidang peternakan dan budidaya padi dengan metode SRI	Reguler	10
8	10/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Suwayuwo dan Ngadimulyo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan bordir	Sosial-Ring I	12
9	12/04/2010 s/d 13/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting, Bulukandang dan Ngadimulyo)	Pelatihan Peternakan Sapi Potong dan Kambing beserta Pengolahan Limbah dan Pakan Ternak	Memberikan pelatihan kepada masyarakat Ring I mengenai peternakan (budidaya sapi dan kambing, pengolahan limbah ternak dan pengolahan pakan ternak)	Sosial-Ring I	32 Orang
10	12/04/2010 s/d 16/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Lemahbang)	Pelatihan Program Penguatan Keberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Mikro (Bina Swadaya)	Memberdayakan wanita yang sudah mempunyai usaha di Ring I	Sosial-Ring I	45

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
11	13/04/2010 s/d 14/04/2010	Petani Bangkalan Madura	Pelatihan SRI	Pelatihan dasar-dasar SRI dan belajar tentang Pembuatan MOL serta pestisida	Reguler	2
12	19/04/2010 s/d 23/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Bulukandang, Tanjung Arum, Dayu Rejo)	Pelatihan Program Penguatan Keberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Mikro (Bina Swadaya)	Memberdayakan wanita yang sudah mempunyai usaha di wilayah ring I	Sosial-Ring I	25
13	22/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
14	23/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
15	23/04/2010 s/d 25/04/2010	PT HM Sampoerna	Pelatihan SAR	Mengadakan Pelatihan SAR di PPK Sampoerna	Reguler	70
16	26/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
17	26/04/2010 s/d 30/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Watu Agung, Gunting, Suwayuwo, Mojo Tengah dan Wedoro)	Pelatihan Program Penguatan Keberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Mikro (Bina Swadaya)	Memberdayakan wanita yang sudah mempunyai usaha di wilayah ring I	Sosial-Ring I	34
18	27/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
19	28/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
20	28/04/2010 s/d 29/04/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting, Bulukandang, Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian	Memberikan pelatihan kepada masyarakat Ring I mengenai Pengolahan Pangan Hasil Pertanian (aneka kripik buah, manisan buah, jamu instan, olahan Rosella)	Sosial-Ring I	34
TOTAL						**423**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN MEI 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	3/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
2	4/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
3	5/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
4	6/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
5	10/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
6	10/05/2010 s/d 11/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting, Bulukandang, Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Budidaya Pertanian	Mendapatkan informasi dan pelatihan mengenai budidaya pertanian, meliputi budidaya Rosella, budidaya buah naga, teknik penanaman secara hidroponik dan vertikultur	Sosial-Ring I	22

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
7	10/05/2010 s/d 13/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting, Bulukandang, Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Vocational Bengkel Sepeda Motor	Mendapatkan informasi dan pelatihan mengenai teknik-teknik perbengkelan sepeda motor	Sosial-Ring I	20
8	11/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
9	17/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
10	18/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
11	18 /05/2010 s/d 19/05/2010	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mojokerto	Pelatihan Agribisnis (Peternakan dan Pengolahan Pangan)	Memberikan pelatihan kepada masyarakat binaan Disnakertrans Mojokerto mengenai peternakan (budidaya sapi dan kambing, pengolahan limbah ternak dan pengolahan pakan ternak) dan Pengolahan Pangan (Jamu instan, Sari Kedelai dan Teh Rosella)	Reguler	40

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
12	19 /05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Suwayuwo dan Ngadimulyo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
13	19 /05/2010 s/d 20/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting, Bulukandang, Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Budidaya Perikanan	Memberikan pelatihan kepada masyarakat Ring I mengenai Budidaya Perikanan (Budidaya lele, budidaya gurami, budidaya belut dan pembuatan pakan ikan buatan / *pellet*)	Sosial-Ring I	18
14	20/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Bulukandang dan Gunting)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
15	24/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
16	26/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	11
17	27/05/2010 s/d 28/05/2010	PNPM Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Pelatihan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian	Memberikan pelatihan mengenai Pengolahan Pangan Hasil Pertanian (aneka kripik buah, jamu instan, olahan Rosella)	Reguler	19

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
18	31/05/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
TOTAL						**262**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN JUNI 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	31/05/2010 s/d 1/06/2010	KUD Sumber Rejeki Prigen	Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram	Mempelajari budidaya dan cara pengolahan Jamur Tiram	Reguler	39
2	1/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
3	2/06/2010 s/d 3/06/2010	PNPM Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	Pelatihan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian	Memberikan pelatihan mengenai Pengolahan Pangan Hasil Pertanian (aneka kripik buah, jamu instan, manisan buah, olahan Rosella)	Reguler	30
4	2/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
5	3/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	8
6	7/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	11

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
7	8/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	11
8	9/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
9	10/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
10	11/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
11	14/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
12	15/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
13	16/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting, Bulukandang, Ngadimulyo dan Suwayuwo)	Pelatihan Induksi	Induksi hasil penelitian Pertanian dan Perikanan di PPK Sampoerna	Sosial-Ring I	19

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
14	16/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
15	18/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	11
16	21/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
17	22/06/2010	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto	Pelatihan Pengolahan Jamu Instan	Mempelajari proses pembuatan jamu instan (jahe) mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan sampai dengan packaging	Reguler	20
18	29/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
19	30/06/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
TOTAL						**269**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN JULI 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	02/07/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
2	05/07/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
3	07/07/2010 s/d 08/07/2010	PNPM Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Pelatihan Peternakan	Pelatihan manajemen sapi dan kambing, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	30
4	15/07/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
5	15/07/2010	Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Petani Blora Jawa Tengah	Pelatihan SRI	Mempelajari budidaya tanamn padi dengan metode SRI, pembuatan dan aplikasi MOL (Mikro Organisme Lokal)	Reguler	30
6	20/07/2010	Masyarakat Ring I (Desa Gunting dan Bulukandang)	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	12
No.	**Tanggal**	**Nama Instansi /**	**Kegiatan**	**Tujuan**	**Bentuk**	**Jumlah**

		Peserta Pelatihan	Pelatihan		Pelatihan	Peserta (Orang)
7	30/07/2010 s/d 31/07/2010	PNPM Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri	Pelatihan Peternakan	Pelatihan manajemen sapi potong, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	33
TOTAL						**137**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN AGUSTUS 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	2/08/2010 s/d 3/08/2010	PNPM Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	Pelatihan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian	Memberikan pelatihan mengenai Pengolahan Pangan Hasil Pertanian (aneka kripik buah, jamu instan, susu jagung, olahan Rosella)	Reguler	25
2	4/08/2010 s/d 5/08/2010	PNPM Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri	Pelatihan Peternakan	Pelatihan manajemen sapi potong, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	38
3	9/08/2010 s/d 10/08/2010	PNPM Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Pelatihan Peternakan	Pelatihan manajemen sapi potong, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	29
TOTAL						**92**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN SEPTEMBER 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi/Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	28/09/2010 s/d 1/10/2010	PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) Semarang	Manajemen Bisnis Peternakan Bagi Peternak Mitra Binaan PTPN IX (PERSERO)	• Pelatihan manajemen budidaya ternak (sapi pedaging, sapi perah, kambing pedaging, kambing perah, unggas) manajemen pembuatan pakan ternak serta manajemen pengolahan limbah ternak • Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausahawan, sekaligus diharapkan agar peserta memiliki wawasan dan kecakapan sebagai pelaku bisnis di bidang peternakan.	Komersil	23
TOTAL						**23**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN OKTOBER 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	18/10/2010 s/d 22/10/2010	Pegawai Purna Tugas PT HM Sampoerna Tbk	Pelatihan Entrepreneurship	Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausahawan, menginspirasi pada para peserta, sekaligus diharapkan agar peserta memiliki wawasan dan kecakapan sebagai pelaku bisnis, mengetahui kiat-kiat bisnis yang harus dilakukan dalam mencapai keberhasilan bisnisnya	Komersil	28
2	25/10/2010 s/d 29/10/2010	Pegawai Purna Tugas PT HM Sampoerna Tbk	Pelatihan Entrepreneurship	Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausahawan, menginspirasi pada para peserta, sekaligus diharapkan agar peserta memiliki wawasan dan kecakapan sebagai pelaku bisnis, mengetahui kiat-kiat bisnis yang harus dilakukan dalam mencapai keberhasilan bisnisnya	Komersil	28
TOTAL						**56**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN NOVEMBER 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	1/11/2010 s/d 5/11/2010	Pegawai Purna Tugas PT HM Sampoerna Tbk	Pelatihan Entrepreneurship	Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausahawan, menginspirasi pada para peserta, sekaligus diharapkan agar peserta memiliki wawasan dan kecakapan sebagai pelaku bisnis, mengetahui kiat-kiat bisnis yang harus dilakukan dalam mencapai keberhasilan bisnisnya	Komersil	35
2	12/11/2010 s/d 14/11/2010	Masyarakat Desa Ring I	Pembelajaran Komunitas Calon Pendamping SRI 2010	Meciptakan calon pendamping SRI yang kompeten dalam pendampingan petani.	Sosial	29
3	21/11/2010	PNPM desa Balongdowo, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	Pelatihan Pertanian	Pelatihan manajemen sapi potong, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	15
4	22/11/2010 s/d 24/11/2010	Masyarakat Desa Ring I	Pembelajaran Komunitas Usaha Mikro Kecil 2010	Pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan pendapatan masyarakat.	Sosial	70

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
5	23/11/2010 s/d 24/11/2010	PNPM Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	Pelatihan Peternakan	Pelatihan manajemen sapi potong, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	34
6	25/11/2010 s/d 26/11/2010	PNPM Kecamatan Udan Awu Kabupaten Blitar	Pelatihan Peternakan	Pelatihan manajemen sapi potong, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	16
TOTAL						**199**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN DESEMBER 2010

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1	1/11/2010 s/d 5/11/2010	Pegawai Purna Tugas PT HM Sampoerna Tbk	Pelatihan Entrepreneurship	Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausahawan, menginspirasi pada para peserta, sekaligus diharapkan agar peserta memiliki wawasan dan kecakapan sebagai pelaku bisnis, mengetahui kiat-kiat bisnis yang harus dilakukan dalam mencapai keberhasilan bisnisnya	Komersil	35
2	8/12/2010 s/d 9/12/2010	PNPM Kabupaten Mojokerto	Pelatihan Pengolahan Pangan	Memberikan pelatihan mengenai Pengolahan Pangan Hasil Pertanian (aneka kripik buah, jamu instan, susu jagung, olahan Rosella)	Reguler	48
3	7/12/2010 s/d 9/12/2010	Masyarakat Desa Ring I	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	10
4	14/12/2010 s/d 15/12/2010	PNPM Kecamatan Sempul Kabupaten Malang	Pelatihan Peternakan	Pelatihan manajemen sapi potong, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	36

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
5	16/12/2010	Pemkab Lampung Barat	Pelatihan Tembakau	Pelatihan budidaya tembakau bersama Dept. Agronomi HMS	Komersil	9
6	14/12/2010 s/d 16/12/2010	Masyarakat Desa Ring I	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	15
7	20/12/2010 s/d 21/12/2010	PNPM Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri	Pelatihan Peternakan	Pelatihan manajemen sapi potong, pembuatan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak	Reguler	18
8	20/12/2010 s/d 23/12/2010	PT. Sadhana, Madura	Pelatihan Tembakau	Pelatihan pengolahan limbah ternak dan magang tembakau bersama Dept. Agronomi HMS.	Komersil	3
9	22/12/2010	PNPM Kecamatan Gresik	Pelatihan Pengolahan Pangan	Memberikan pelatihan mengenai Pengolahan Pangan Hasil Pertanian (aneka kripik buah, manisan buah, susu jagung, dan jamu instan)	Reguler	20
10	22/12/2010	PNPM Kecamatan Gresik	Pengolahan Limbah Perikanan dan Pembuatan Pelet Ikan	Memberikan pelatihan pemanfatan limbah ikan (pelet ikan, tepung ikan)	Reguler	20
11	28/12/2010 s/d 30/12/2010	Masyarakat Desa Ring I	Pelatihan Bordir	Meningkatkan keterampilan membordir (program rutin PPUMK)	Sosial-Ring I	15
TOTAL						**229**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN JANUARI 2011

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1.	10/1/2011 s/d 14/1/2011	PT HM Sampoerna Tbk.	Pelatihan Kewirausahaan PT HM Sampoerna Tbk.	Mendapatkan pelatihan wirausaha di bidang agrobisnis seperti hortikultura, peternakan, budidaya jamur, perikanan, pengolahan hasil pertanian, selain itu peserta dibekali materi mengenai pengembangan diri, mengelola keuangan dan manajemen bisnis kecil.	Komersil	31
2.	19/1/2011 s/d 20/01/2011	PNPM Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	Pelatihan Pengolahan Singkong dan Manisan Buah	Mendapatkan pengetahuan di bidang peternakan serta pengolahan limbah ternak yang baik dan pembekalan manajemen dan marketing	Reguler	21
3	19/1/2011 s/d 21/1/2011	Kelompok Tani Kabupaten Tulungagung	Pelatihan Peternakan dan Pengolahan Pakan Berbasis Hijauan (Silase)	Mendapatkan pengetahuan di bidang peternakan serta pengolahan pakan ternak berbasis hijauan dan pembekalan manajemen dan marketing	Reguler	24
TOTAL						**76**

PELATIHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA BULAN FEBRUARI 2011

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1.	8/2/2011 s/d 9/2/2011	Masyarakat binaan Bina Swadaya	Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pembukuan, dan Manajemen Usaha	Mendapatkan pengetahuan pengelolaan ekonomi rumah tangga, akuntansi sederhana, dan pengelolaan keuangan bagi wanita pelaku usaha	Sosial	80
2.	10/2/2011	Masyarakat Ring I (Desa Suwayuwo, Gunting, Ngadimulyo dan Bulukandang)	Pelatihan Sosial Budidaya Ternak Sapi Potong	Meningkatkan keterampilan masyarakat desa ring I pembudidaya ternak sapi potong	Sosial	30
3	11/2/2011	Masyarakat Ring I (Desa Suwayuwo, Gunting, Ngadimulyo dan Bulukandang)	Pelatihan Sosial Pembuatan Pakan Ternak Berbasis Bahan Baku Lokal	Meningkatkan keterampilan masyarakat desa ring I pembudidaya ternak sapi potong dan kambing dalam memproduksi pakan ternak dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia	Sosial	30
4	16/2/2011 s/d 17/2/2011	Masyarakat binaan Bina Swadaya	Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga,Pembukuan, Manajemen Usaha	Mendapatkan pengetahuan pengelolaan ekonomi rumah tangga, akuntansi sederhana, dan pengelolaan keuangan bagi wanita pelaku usaha	Sosial	40

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
5	18/2/2011	Kelompok Usaha TANOBAT, Desa Ngadimulyo	Pelatihan Herbal Instan Dalam Kemasan Sachet	Memberikan pendidikan dan peningkatan keterampilan Kelompok Usaha TANOBAT untuk mengemas produk herbal instannya dalam kemasan sachet	Sosial	3
6	21/2/2011	Kelompok Usaha Inkubasi Manisan Buah Semi Basah	Pelatihan Inkubasi Manisan Buah Semi Basah	Memberikan pendidikan bagi kelompok usaha pengambil paket inkubasi manisan buah semi basah dalam proses pembuatan produk manisan buah	Inkubasi	20
7	22/2/2011	Kelompok Usaha TANOBAT, Desa Ngadimulyo	Pelatihan Herbal Instan Dalam Kemasan Sachet	Memberikan pendidikan dan peningkatan keterampilan Kelompok Usaha TANOBAT untuk mengemas produk herbal instannya dalam kemasan sachet	Sosial	3
8	22/2/2011 s/d 23/2/2011	Masyarakat binaan Bina Swadaya	Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pembukuan, dan Manajemen Usaha	Mendapatkan pengetahuan pengelolaan ekonomi rumah tangga, akuntansi sederhana, dan pengelolaan keuangan bagi wanita pelaku usaha	Sosial	40

No.	Tanggal	Nama Instansi / Peserta Pelatihan	Kegiatan Pelatihan	Tujuan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
9	23/2/2011	Kelompok Usaha Inkubasi Keripik Gadung Simulasi	Pelatihan Inkubasi Keripik Gadung Simulasi	Memberikan pendidikan bagi kelompok usaha pengambil paket inkubasi keripik gadung simulasi dalam proses pembuatan produknya	Inkubasi	15
10	24/2/2011	Kelompok Usaha inkubasi Soto Jamur Instan	Pelatihan Inkubasi Soto Jamur Instan	Memberikan pendidikan bagi kelompok usaha pengambil paket inkubasi soto jamur instan dalam proses pembuatan produknya	Inkubasi	15
TOTAL						**276**

FASILITAS PELATIHAN PPK SAMPOERNA

Ruang Pelatihan

Dokumen Peneliti, 2011

Bengkel

Dokumen Peneliti, 2011

Demplot Pertanian

Dokumen Peneliti, 2011

Instalasi Biogas

Dokumen Peneliti, 2011

Instalasi Pengolahan Limbah Cair

Dokumen Peneliti, 2011

Pengolahan Kompos

Dokumen Peneliti, 2011

Kandang Sapi

Dokumen Peneliti, 2011

Kolam Ikan

Dokumen Peneliti, 2011

Asrama / Penginapan (Dormitory)

Dokumen Peneliti, 2011

Dokumen Peneliti, 2011

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Ratna Magfiroh
NIM	:	0710310121
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Surabaya, 10 Maret 1989
Agama	:	Islam
Alamat	:	Dusun Suwayuwo Klanting RT 01 RW 05 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Publik

Pendidikan

1. Tahun 1996-1999 : SD K Hasyim Surabaya
2. Tahun 1999-2001 : SD Negeri Karangjati 01
3. Tahun 2001-2004 : SMP Negeri 1 Pandaan
4. Tahun 2004-2007 : SMA Negeri 1 Pandaan
5. Tahun 2007-2011 : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Pengalaman Organisasi

Anggota AEC (*Administration English Club*) Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Tahun 2007

Pengalaman Kepanitiaan

1. Panitia Studi Banding Mata Kuliah Teori Ilmu Administrasi Publik ke Koperasi Susu Purwodadi di Sie. Konsumsi tahun 2007
2. Panitia Seminar Lingkungan "Peran Mahasiswa Dalam Menghadapi Masalah *Global Warming"* sebagai Sekretaris Panitia bulan Juni 2010

Pengalaman Kerja

Magang Kerja/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Periode April-Juni 2010